



SEMINAR SEJARAH LOKAL

PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR DINAMISASI SOSIAL

Direktorat
Kebudayaan

7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL

1983

370.760N P

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN



SEMINAR SEJARAH LOKAL

**PENDIDIKAN
SEBAGAI FAKTOR
DINAMISASI
SOSIAL**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL
1983**

Penyunting :
Drs. Anhar Gonggong

DAFTAR ISI

	hal.
Sambutan DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL	i
PENGARAHAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN P & K	v
Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Bali oleh ; A.A. Gde Putra Agung	1
Stratifikasi dan Pola Kepemimpinan lokal di daerah Sumatera Selatan. oleh ; Ma'mun Abdullah	31
Pendidikan Barat dan Modernisasi Pendidikan Agama di Aceh. oleh ; Rusdi Sufi.....	47
Peranan Madrasah pada Masa penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan. oleh H. Ramli Nawawi ..	59
Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Daerah Riau Pada Awal Abad XX. oleh ; Marleily Asmuni	71
Pendidikan dan Perkembangan Sosial Ekonomi di Bukittinggi periode 1900 – 1942. oleh ; Ishaq Taher	87
KEPUTUSAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
DAFTAR PESERTA – PEMBAWA MAKALAH	
DAFTAR PENINJAU SEMINAR SEJARAH LOKAL	
LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SEJARAH LOKAL DI DENPASAR.	

SAMBUTAN DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI KEBUDAYAAN

ARTI PENTINGNYA SEJARAH LOKAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

P E N G A N T A R

Seorang tokoh Antropologi yaitu A. Montagu menyatakan bahwa manusia sebagai salah satu bentuk kehidupan berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena ia telah mampu mengarungi *adaptive zone* atau arena adaptasi secara aktif. Kemampuan manusia mengarungi arena adaptasi itu merupakan perwujudan betapa keunggulan manusia dalam menanggapi lingkungannya dalam arti luas serta segala tantangan yang dihadapi itu telah mendorong untuk belajar, menciptakan dan menyampaikan diri dengan mengembangkan kebudayaan yang tidak hanya mempermudah kehidupan tetapi yang pada gilirannya sebagai lingkungan buatan yang baru menguasai tingkah laku manusia. Demikian manusia berhasil membina dirinya dengan menanggapi lingkungannya secara aktif, mencoba memahaminya sebelum menentukan sikap dan berbuat.

Keberhasilan manusia mengarungi *adaptive zone* itu dimungkinkan karena kemampuannya untuk belajar dan mengajar atau menyampaikan pengalaman, pengetahuan dan ide-ideanya kepada sesamanya baik yang hidup segenerasi maupun yang hidup dalam generasi yang berlainan. Kemampuan manusia untuk belajar dan mengajar itu merupakan faktor yang amat penting dalam perwujudan kebudayaan. Oleh karena itu sejarah kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan pelajaran yang harus difahami oleh setiap orang yang ingin hidup bermasyarakat secara baik.

Di dalam proses belajar dan mengajar itu manusia tidak membatasi ruang maupun lingkup waktu, Di manapun manusia hidup ia akan mengejar pengetahuan, mencari pengalaman dan mengembangkan ide-ideanya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta kemampuan perorangan maupun masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi lingkup pengetahuan yang diserapnya tidak terbatas pada apa yang tersedia di tempat dan dialami sendiri di suatu-waktu, Manusia dengan kemampuannya mengembangkan dan menggunakan lambang-lambang dapat memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, pengalaman dan gagasan mereka secara intra generasi maupun inter generasi. Karena itulah maka pengetahuan manusia bersipat

akumulatif semakin lama semakin bertimbulan dan diperkaya oleh pengetahuan yang diwarisi dari generasi terdahulu maupun dengan apa yang mereka peroleh sendiri selama hidupnya.

SEJARAH

Berdasarkan kenyataan itu, dengan tepat pula A. Montagu menyatakan bahwa "Manusia telah menciptakan hari depannya melalui karya-karyanya hari ini atas dasar apa yang telah diperbuat di masa lampau". Berpegang pada pernyataan tersebut, maka segala peristiwa dan kejadian di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat manusia menjadi penting artinya sebagai pedoman di masa kini serta pengarah di masa mendatang.

Sejarah sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan dalam arti luas (termasuk segala tantangan yang dihadapi) merupakan cermin yang tidak hanya memantulkan wajah kemanusiaan di masa lampau, melainkan mengandung kekuatan inperatif terhadap orang yang mau bercermin untuk berbuat atau tidak berbuat. Pada gilirannya sikap dan tindakan atas dasar pengalaman sejarah itu akan mempengaruhi hari depan manusia yang bersangkutan.

SEJARAH LOKAL

Berkaitan dengan kehidupan sosial bangsa Indoensia yang sedang membangun, kedudukan dan peranan sejarah amat penting. Pengetahuan sejarah amat diperlukan bukan sekedar sebagai sumber pengetahuan yang inspiratif, akan tetapi juga sebagai pedoman untuk berkarya di hari kini serta menciptakan hari depan sesuai dengan cita-cita serta nilai-nilai Pancasila yang telah sama-sama kita sepakati.

Arti pentingnya sejarah bagi masyarakat Indonesia itu menjadi lebih kuat kalau diingat bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan latar belakang kebudayaan, kemasyarakatan, keagamaan dan sejarah yang beraneka ragam. Penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan masyarakat mejemuk merupakan pekerjaan yang tidak ringan dan harus diselenggarakan dengan seksama. Ia memerlukan kesabaran, ketekunan dan penuh pengertian baik di antara penyelenggara pemerintahan maupun anggota masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan data dan informasi yang memadai tentang kebudayaan dan kemasyarakatan Indonesia baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya maupun untuk memperluas cakrawala masyarakat tentang negara dan bangsanya.

Mengingat kenyataan akan masyarakat Indonesia yang tersebar luas di kepulauan Nusantara dengan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang beraneka ragam itu, maka pengetahuan sejarah yang diperlukan tidak terbatas pada apa yang terjadi secara nasional, melainkan juga apa yang terjadi secara lokal, yang justru selama ini kurang mendapat perhatian secara mendalam. Sejarah lokal yang benar-benar merupakan kejadian setempat maupun sejarah lokal sebagai kejadian setempat yang mempunyai kaitan secara nasional mempunyai kedudukan dan peranan informan, inspiratif, dan impiratif yang sama pentingnya dalam usaha memahami masa lampau, menghayati masa kini dan merencanakan masa depan bangsa karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu bersifat Bhineka Tunggal Ika.

TUJUAN SEMINAR

Atas dasar pernyataan dan kenyataan itulah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Sejarah Lokal yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Panitia, tujuan seminar ini antara lain ialah hendak mengundang perhatian para cendekiawan, khususnya sejarawan, untuk memberikan perhatian pada peristiwa yang terjadi setempat (lokal) bukan untuk menonjolkan rasa kedaerahan yang sempit melainkan justru untuk mengungkapkan kesadaran sejarah sebagai satu bangsa yang teguh pendiriannya serta kuat berpegang pada cita-cita kemerdekaan sebagaimana tersimpul dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya dengan segala hormat kita nantikan pengarahannya Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan agar seminar mencapai hasil yang memadai dan bermanfaat bagi negara dan bangsa sesuai dengan dana yang disediakan, menggunakan waktu dan pemusatan pemikiran para peserta yang telah dicurahkan untuk keperluan ini.

**Dirrektor Sejarah Dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan,**

Dr. S. Budhisantoso.

PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN P DAN K

Dalam kehidupan budaya nasional, sejarah bangsa wajar kita beri tempat berprioritas tinggi, Sejarah bangsa itulah, yang justru mempersatukan semua individu sebagai unsur bangsa kita, yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sambil mempertahankan pula kepribadian sendiri, identitas budaya, sebagai ciri khas kebangsaannya.

Memang ciri khas kebangsaannya itu yang mampu mengangkat suatu bangsa menjadi subyek sejarah, karena justru kepribadiannya sendiri sanggup membuat sejarah bangsanya. Atas dasar ciri khas dan sejarah itu pun suatu bangsa dapat dinilai dalam tingkatan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lain.

Sebagai bangsa yang berhasil mencapai kemerdekaannya atas kekuatan sendiri, sewajarnya kita merasa berkewajiban untuk mempelajari sejarah nasional kita dengan seksama. Perang Kemerdekaan dan semua peristiwa yang menuju ke tercapainya kedaulatan bangsa kita banggakan dan perhatian sebagai unsur sejarah nasional yang paling menonjol. Seperti saya sebutkan tadi, hal itu wajar.

Namun demikian, riwayat serta keadaan kita sebagai bangsa, kita sadari pula sebagai bukan hanya meliputi saat kehidupan bangsa dalam jangkauan nasional. Sejarah bangsa secara nasional baru bisa diperhitungkan nilai, dan dalam kaitan, kemerdekaan bangsa sejak 1945. Akan tetapi, kita ketahui semua betapa jauh sebelumnya bangsa kita sudah hidup di wilayah ini, sekalipun, memang, belum dalam kaitan nasional sebagai satu bangsa yang berdaulat di seluruh wilayahnya, namun masih dalam batasan suku bangsa dan daerah masing-masing. Walaupun demikian, dalam batasan itu pun, kita ketahui bangsa kita telah mampu juga membuat sejarah. Hal ini cukup terbukti dari aneka macam berita kesejarahan, yang telah beredar, sejak awal sekali tentang wilayah kita, dan yang timbul baik di luar maupun di dalam daerah bersangkutan, meliputi, tidak jarang pula, kepentingan bagian besar, bahkan keseluruhan wilayah kita.

Maka dapat dikatakan, bahwa di bidang sejarahpun keadaan bangsa kita tepat sesuai dengan lambang negara yang telah kita pilih : Bhinneka Tunggal Ika. Jelas pula, bahwa dalam mempelajari dan meneliti sejarah bangsa kitapun berkepentingan dengan menelaah kedua aspek bangsa, ialah ke-bhinneka—an, maupun ke—tunggal—annya.

Di bidang sejarah hal itu dengan sendirinya berarti, bahwa di samping sejarah yang berjangkauan nasional dan meliputi bangsa Indonesia secara menyeluruh serta sebagai bangsa berdaulat, kitapun mempelajari dan meneliti sejarah yang terjadi pada masing-masing sukubangsa kita dan di masing-masing sukubangsa kita dan di masing-masing daerah. Sejarah jenis itulah yang kita sebut dengan istilah teknis sejarah lokal dan yang sekarang ini kita jadikan pokok seminar.

Ingin saya garisbawahi di sini, bahwa dalam sejarah lokal itupun tampak jelas kaitan dengan keadaan sosial-budaya bangsa kita seperti telah disebutkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah dalam sejarah lokal itupun kita hadapi kedua aspek bangsa :

- 1; Aspek bhinneka, yaitu sejarah lokal yang meliputi peristiwa-peristiwa terbatas dalam hubungan kehidupan masing-masing sukubangsa atau daerah.
2. Aspek tunggal ika, yaitu sejarah lokal yang, sekalipun menyangkut peristiwa di daerah atau pada sukubangsa tertentu, namun memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah yang berjangkauan nasional, atau yang kejadiannya telah didasari pemikiran yang berjangkauan nasional.

Kedua aspek sejarah lokal itu sama pentingnya apabila dinilai dari sudut ilmiah, Maka kedua aspek itu pula berhak dan perlu diperhatikan dan diteliti secara ilmiah.

Namun demikian, ingin saya tegaskan, bahwa ilmu beserta penelitiannya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia secara keseluruhan. Maksudnya, sebagai sarjana dan ilmiawan, dalam pekerjaan yang betapa ilmiahnyapun sifatnya, kita tidak mungkin melepaskan diri dari tanggung jawab kita sebagai manusia, termasuk tanggung jawab sebagai manusia Indonesia yang hidup di dalam perbatasan negara Indonesia dan dalam hubungan erat dengan bangsa Indonesia itu.

Hal ini saya anggap sangat penting dan hendaknya dijadikan pegangan dalam kehidupan ilmiah kita. Sejarah, lagi pula, termasuk bidang sosial budaya. Dan, sebagaimana kita ketahui, penelitian di bidang sosial-budaya di Indonesia tidak jarang

mengandung bahaya dapat menjerumuskan peneliti yang kurang berpengalaman dan waspada, dalam mempertajamkan unsur bhinneka bangsa, keaneka-ragaman dan perbedaan-perbedaannya, dengan melupakan kaitannya dengan keadaan tunggal bangsa, yaitu dasar budaya yang diketahui memang sama serta tujuan kita untuk membina kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bernegara.

Dalam usaha kita meningkatkan kesadaran bersejarah secara umum dan dalam penelitian sejarah lokal secara khusus, kita tidak ingin membangkitkan justru rasa kedaerahan atau kesukuan yang sempit.

Perhatian kita untuk ke aneka-ragaman, ke—bhineka—an bangsa, bukan bertujuan memisah-misahkan dan memecah-belah. Unsur bhinneka bangsa kita perhatikan untuk dapat menyajikan pilihan guna memberi nuansa, variasi warna-warni yang menarik dalam pengembangan kebudayaan nasional, namun dengan tetap berpijak pada kesamaan dasar yang memang ada serta mengarah ke kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara.

Untuk bidang sejarah lokal secara khusus hal itu berarti, bahwa yang hendaknya ditekankan dalam perhatian kita ialah kesamaan dan kebersamaan dalam sejarah kita sebagai satu bangsa yang memiliki dasar budaya yang sama, memakai bahasa daerah yang semuanya termasuk rumpun bahasa yang sama dan yang hidup dalam wilayah yang sama serta telah sepakat membangun negara kesatuan dalam persatuan. Artinya, yang ditekankan bukan justru keaneka ragam pengalaman sejarah yang dapat merusak rasa kesatuan, memecah-belah bangsa dan mempengaruhi kita untuk berpikiran kedaerahan atau kesukuan secara sempit.

Di samping itu saya merasa perlu pula mengingatkan di sini; bahwa sejarah merupakan ilmu, sehingga berkembang terus seperti ilmu-ilmu lain. Dan sebagaimana layaknya suatu ilmu, setiap penemuan dalam penelitian tentu tidak pernah mungkin dapat dianggap sebagai tuntas secara mutlak, sekalipun peneliti bersangkutan sendiri, dalam antusiasme bekerja, kadang-kadang cenderung merasa telah mendapatkan sesuatu yang sefinal-finalnya. Hal ini memang sering menjadi masalah. Masyarakat awam acapkali kurang memahami sifat ilmu, yang dalam perkembangannya selamanya bisa berubah, mengikuti terungkapkannya data yang tersedia dan yang juga selalu bisa bertambah-tambah. Demikianlah setiap ilmu berkembang tanpa henti-hentinya, tidak ada data yang dapat dianggap memberi jawaban yang mutlak final.

Maka jelas kiranya, bahwa dalam pengungkapan hasil penelitian kita perlu bersikap hati-hati dan bijaksana. Tanggungjawab sebagai sarjana dan ilmiawan memang dengan sendirinya menuntut sikap berhati-hati dan bijaksana itu, karena justru sarjana dan ilmiawan selalu sadar akan relatifnya setiap penemuan.

Selanjutnya, ingin saya tegaskan kembali, bahwa sejarawan sebagai sarjana dan ilmiawan pula, memikul tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia, anggota masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia, sehingga perlu tetap menyadari tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu membina kesatuan dan persatuan. Penyebarluasan penemuan dan hasil penelitian yang bagaimana juga tidak dapat dianggap tuntas secara mutlak, dan yang mungkin bisa menimbulkan salah tafsir, salah paham, hendaknya dibatasi pada para ahli saja, yang mampu mengevaluasi relativitasnya dan mengerti sangkut-paut ilmiahnya, bukan diedarkan untuk konsumsi masyarakat luas yang awam dan tidak terdidik dalam konvensi ilmiah secara umum dan ilmu sejarah secara khusus.

Dengan harapan, bahwa seminar ini akan berhasil meningkatkan kemampuan ilmiah, memperdalam kesadaran sejarah dan juga memperkuat tanggungjawab kita kepada negara dan bangsa, saya buka Seminar Sejarah Lokal secara resmi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi sekalian usaha baik kita.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio

PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR DINAMISASI SOSIAL DI BALI

Oleh :

A.A. Gde Putra Agung

I

Seperti halnya masyarakat di daerah-daerah lainnya di Indonesia, sampai pada masa pembangunan sekarang ini masyarakat di Bali merupakan masyarakat yang sedang mengalami transisi yaitu dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Berbagai sistem sosial yang masih memiliki nilai-nilai tradisional seperti sistem perkawinan, sistem kekerabatan, berbagai bentuk upacara adat dan keagamaan, kesenian dan sebagainya masih tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Di pihak lain, dalam zaman pembangunan dewasa ini kita juga dihadapkan kepada kemajuan teknologi seperti apa yang kita saksikan di kota Denpasar, lalu-lintas semakin ramai, jalan-jalan sudah mulai diperlebar, gedung-gedung hotel yang bertingkat dengan peralatannya serba luks ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat di Bali sudah mengalami proses modernisasi. Dichotomy antara tradisional dan modern ini di dalam masyarakat yang sedang mengalami peralihan selalu menjadi pangkal pembicaraan karena kedua unsur tersebut selalu ada berdampingan; bahkan di beberapa daerah di Indonesia seperti di daerah Bali ini justru unsur tradisionalnya kelihatan lebih dominan.

Di dalam menelaah proses kemajuan di negara-negara sedang berkembang, para ahli sering ada kecenderungan menghubungkan dengan proses modernisasi. Memang masalah modernisasi ini menyangkut semua aspek kehidupan, sehingga para sarjana pun melihat gejala modernisasi ini dari masing-masing disiplin ilmunya. Pendapat yang bersifat umum mengatakan bahwa modernisasi dapat dirumuskan sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktifitas masyarakat, ² dan melalui ilmu pengetahuan orang mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dan secara sadar ingin menambah daya dorong mereka ke arah kemajuan.³ Bagaimana pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tidak dapat disangkal lagi, lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang membangun ini dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kunci proses sosial dalam jangka panjang.⁴

Dinamikanya pendidikan yang mampu mengadakan berbagai perubahan dalam masyarakat tertuang dalam bentuk ga-

gagan-gagasan baru, ide-ide baru dari golongan intelektual, dari orang yang telah mengenyam pendidikan Barat. Pada tahap permulaannya kita kenal golongan ini sebagai inovator atau golongan pembaharu, dan ide-ide pembaharuan itu mereka serah terimakan kepada mereka yang bertugas mendifusikan inovasi tersebut, dan golongan ini kita kenal sebagai agen perubahan (change agent). Dalam proses pembaharuan ini peranan pemimpin opini (opinion leader) juga memegang peranan penting sebagai partner dari agen perubahan dalam membangun masyarakat yang diinginkannya.⁵

Sejak tahun 1920 telah banyak pelajar-pelajar dari Bali yang telah menamatkan pelajarannya di Jawa mereka kembali ke Bali, ada yang bekerja di kantor pemerintah, ada yang bekerja sebagai guru, dan ada juga yang membuka kursus-kursus seperti Nomaal Coersus (NC) di Singaraja. Dari merekamerka inilah muncul ide-ide pembaharuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di Bali yang pada waktu itu dirasakan sangat terbelakang dibandingkan dengan keadaan di Jawa. Walaupun mereka itu kebanyakan dari kalangan guru, namun pandangan mereka sudah agak luas. Ide-ide pembaharuan mereka salurkan melalui penerbitan majalah bulanan yaitu majalah "Bali Adnyana" (terbit tahun 1924) dan majalah "Surya Kanta" (terbit tahun 1925). Cita-cita dari golongan elit modern pada waktu itu lebih dikenal dengan istilah "paham kemajuan" terutama ingin memajukan masyarakat Bali di bidang pendidikan, di bidang agama, dan ingin mengadakan perubahan di bidang adat istiadat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman.

Dalam mengamati dinamika masyarakat di Bali dalam keadaan transisi seperti itu latar belakang sosial-kultural dan sosial-politik masih perlu mendapat perhatian. Sebagai masyarakat tradisional, ikatan-ikatan tradisional dan nilai-nilai tradisional yang terlihat dalam aturan-aturan, norma-norma, dan tatanan masyarakat akan banyak memberikan hambatan-hambatan ataupun benturan-benturan terhadap nilai-nilai baru yang diterapkan di tengah-tengah suatu sistem sosial. Tidak jarang akan terlihat pula konflik-konflik sosial akibat dari benturan nilai yang belum menyerap ke dalam masyarakat, walaupun konflik tadi dapat berupa pertentangan kasta dan pertentangan pandangan.

Lahimya ide-ide pembaharuan yang berlandaskan pada sistem pendidikan Barat itu memang lahir di tengah-tengah masyarakat kolonial, dan ini berarti pula ia tumbuh dan di-besarkan dalam iklim kolonial. Dari pihak pemerintah Belanda akan muncul berbagai pandangan tentang sistem pendidikan di Bali yang disesuaikan dengan politik kolonialnya.

Dari kedua faktor di atas akan banyak melibatkan permasalahan dalam melihat pendidikan sebagai faktor dinamisasi masyarakat di Bali.

Beberapa permasalahan yang penting antara lain : Sejauh mana peranan pendidikan dapat memberikan rangsangan terhadap tumbuhnya inovasi dalam masyarakat di Bali? Siapa atau golongan mana yang menjadi pelopor dalam penyebaran inovasi itu? Apa yang dipakai sebagai sarana penyebaran? Bagaimana arti pendidikan dalam hubungannya dengan status sosial? Dinamika apa yang diberikan oleh faktor pendidikan dalam perubahan sosial? Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat? Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, pertama-tama kita perlu melihat perkembangan pendidikan di Bali serta implikasi-implikasinya terhadap masyarakat lingkungannya.

II

Perkembangan pendidikan di Bali terasa sangat jauh terbelakang dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di Jawa.⁶ Pemerintah Belanda di Bali baru pada tahun 1914 mendirikan beberapa sekolah berupa *Inlandsche sholen* di tingkat kedistrikan (sekarang kecamatan) seperti di Sukasada dan Kubutambahan yang terletak di Bali Utara, di Penebel termasuk daerah Tabanan di Bali Selatan dan di Tegalcangkring di daerah Jembrana di Bali bagian Barat. Pada tahun yang sama *Tweede Klasse Inlandsche school* di kedistrikan Manggis yang terletak di daerah Karangasem dan baru pada tahun 1920 menyusul di beberapa daerah lainnya di Bali Utara maupun di Bali Selatan.⁷ Pada tahap permulaan dibukanya sekolah-sekolah di Bali, banyak mengalami kesulitan-kesulitan terutama dalam mendapatkan murid. Orang-orang tua belum mempunyai pengertian dan kesadaran untuk menyekolahkan anaknya disamping ada hambatan-hambatan tradisi dalam adat-istiadat seperti golongan Tri-wangsa (Brahmana, Ksatria dan Wesia) takut menyekolahkan anaknya karena takut "ditebah" oleh golongan Jaba dalam hubungannya dengan penggunaan bahasa percakapan sehari-hari (tatanan bahasa halus, sedang dan kasar atau dalam bahasa Jawa : kromo hinggil, kromo, dan ngoko) atau dalam sistem permainan saling lompat-melompati, hal mana menurut anggapan pada zaman itu si anak dapat dianggap "susud" atau turun kasta. Di sinilah nanti akan tampak pengaruh pendidikan dan kaitannya dengan masalah kasta dan masalah status yang kita akan bicarakan dalam menelaah mobilitas sosial.

Dari segi kepentingan kolonial di bidang administrasi dalam sistem birokrasinya, maka pada tahun 1914 di Singaraja dibuka **Holland Inlandsche School (HIS)** dan kemudian pada tahun 1918 dapat dibuka di Denpasar, dan Klungkung. Berbeda dengan sekolah Bumiputra (**Inlandsche school**), di H.I.S. di samping diajar membaca, menulis dan berhitung juga diberikan pelajaran bahasa Belanda di samping bahasa Melayu. Murid-murid yang diterima di HIS keadaannya masih sangat terbatas, kebanyakan dari keluarga penguasa (raja dan punggawa), bangsawan dan orang-orang tertentu yang dianggap kaya. Di sini tampak pula kepada kita bahwa struktur masyarakat pada waktu itu khususnya yang menyangkut masalah status sosial ternyata status kekayaan juga telah menduduki tempat yang penting di samping status yang berdasarkan pada kasta dan kekuasaan.⁸

Pada masa mulai dibukanya sekolah-sekolah di Bali, kota Singaraja menduduki tempat yang penting pula karena sejak tahun 1882 ditetapkan menjadi ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok,⁹ di samping itu juga sebagai kota pelabuhan. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi dengan sendirinya juga oleh pemerintah dipakai tempat pusat pendidikan. Hal ini dibuktikan dibukanya sekolah untuk orang-orang Tionghoa yaitu **Holland Chineesche School** pada tahun 1914 dan **Europeeschool** pada tahun 1916, dan yang terakhir ini hanya untuk orang-orang Belanda dan sebagian kecil dari kalangan anak-anak raja. Melihat perkembangan sekolah-sekolah di Bali dari tahun 1920 sampai tahun 1932 dapat dikatakan masih sangat kurang dan tingkat pendidikannya hanya tingkat Sekolah Dasar.¹⁰ Oleh Sebab itu pelajar-pelajar Bali banyak yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa, pada tahun 1927 dapat diketahui pada sekolah MULO (**Meer Uitgebreid Lager Onderwijs**) tercatat 36 orang, di AMS (**Algemeene Middelbare School**) 1 orang, di **Kweekschool** : 9 orang, di **Ambachtschool** : 8 orang, di **NIAS (Nederlandsche Indische Artsenschool)** 1 orang, di **OSVIA (Opliedingschool voor Inlanddsche Amtenaren)** 4 orang, di **HKS (Hoogere Kweekschool)** 1 orang dan di OSVIA Makasar sampai tahun 1927 tercatat 10 orang.¹¹ Sekitar tahun "dua puluhan" sudah banyak putra-putra Bali yang melanjutkan sekolahnya di Jawa antara lain ke Banyuwangi, Probolinggo, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta.

Keaktifan pelajar-pelajar Bali yang bersekolah di Jawa di samping keperluan studinya juga telah melibatkan diri dalam kegiatan politik melalui perkumpulan pergerakan, hal ini terbukti pada kongres ke II Perkumpulan Jong Java di Yogyakarta pada tahun 1919 telah dimasukkan pula pemuda-pemuda Bali di dalam perkumpulannya.¹² Dari pihak pemerintah Belanda dengan

melihat gejala seperti ini timbul kekhawatiran, sehingga berusaha membatasi pelajar-pelajar Bali melanjutkan pelajarannya ke Jawa dengan menganjurkan kepada pelajar-pelajar Bali dan Lombok yang sudah menamatkan pelajarannya di **Tweede Klasse School** dan **HIS** mau bekerja dengan mendapatkan penghasilan yang cukup. Rupanya kehausan dan kesadaran menuntut ilmu pada waktu itu sedang meluap-luap, sehingga banyak pelajar-pelajar Bali melanjutkan pelajarannya di **OSVIA** Makasar (sekarang Ujungpandang).¹³ Para pelajar ini setelah menamatkan pelajarannya lalu pulang ke Bali dan menyebarkan benih-benih ide pembaharuan ke tengah-tengah masyarakat melalui bidang pendidikan dengan jalan mendirikan perkumpulan-perkumpulan.¹⁴

Pada tahun 1921 lahir sebuah perkumpulan di Singaraja yang bergerak di bidang pendidikan dan agama dengan nama **Suita Gama Tirta** yang dipimpin oleh I Gusti Putu Jelantik (anggota pengadilan di Singaraja) dengan tujuan mempelajari soal-soal keagamaan dengan jalan mengadakan pembacaan-pembacaan lontar. Oleh karena perkumpulan ini tidak panjang umurnya maka di antara mereka yang masih haus akan pengetahuan kemudian mendirikan perkumpulan **Shanti** yang juga bergerak di bidang pendidikan dengan mengadakan kursus-kursus agama, di mana anggotanya kebanyakan dari **Sekehe Jongkok** yaitu suatu perkumpulan simpan-pinjam uang (mungkin sekarang dapat disamakan dengan sistem arisan). Berkat bantuan dari pemerintah dan para pemuka masyarakat di Singaraja, perkumpulan ini berhasil mendirikan Sekolah Perempuan **Shanti** dan menerbitkan kala warta bernama **Shanti Adnyana**. Walaupun perkumpulan-perkumpulan yang timbul pada waktu itu umumnya tidak berlangsung lama, namun sudah memberikan arti bagi kita bagaimana besarnya pengaruh paham pembaharuan yang dipelopori oleh beberapa tokoh terpelajar sebagai pemimpin opini yang secara aktif sebagai pimpinan-pimpinan perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan. Semangat ingin maju di bidang ilmu pengetahuan tidak terbatas pada golongan anak-anak, tetapi juga tumbuh di kalangan para ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar membaca dan menulis pada sore hari di dalam Sekolah Perempuan **Shanti**. Sekolah Perempuan **Shanti** ini didirikan oleh sebuah panitia yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat pada waktu itu yaitu Wayan Ruma, Ketut Nasa, Made Kaler, Nyoman Kadjeng, I Gusti Putu Djelantik, I Gusti Tjakra Tenaya serta dilengkapi oleh penasehat-penasehat yang terdiri dari Ida Bagus Gengel dan Pedanda Putu Geria. Kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan terbukti pula dengan munculnya beberapa perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan seperti perkumpulan **Setiti Bali** yang berdiri di Singaraja pada tahun 1917 yang

bertujuan memajukan masyarakat Bali dalam bidang pendidikan, agama, adat-istiadat dan dalam bidang perekonomian. Kemudian pada tahun 1921 muncul pula sebuah perkumpulan di Singaraja dengan nama **Suita Gama Tirta** yang dipimpin oleh I Gusti Putu Djelantik. Perkumpulan ini mempunyai tujuan untuk memajukan pendidikan dan agama dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan yang termaktub di dalam lontar-lontar di Bali yang memuat berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti keagamaan, kesusastraan, etika dan filsafat. Suatu hal yang sangat penting artinya dalam dunia ilmu pengetahuan di Bali yang telah dirintis oleh perkumpulan Suita Gama Tirta ini yang dapat dianggap sebagai "zaman pencerahan" adalah usaha menghilangkan paham "ajrawera" yang telah lama menghantui pikiran orang-orang Bali yaitu suatu paham atau kepercayaan yang melarang setiap orang membaca atau mengetahui isi lontar-lontar di Bali sebelum orang tersebut disucikan yaitu melakukan upacara **pawintenan** atau **mewinten**. Di dalam usaha memajukan bidang pendidikan ini, sudah ada pula perkumpulan yang bergerak di bidang studi-fonds yaitu sebuah perkumpulan yang bernama **Perhimpunan Satya Samudaya Baudanda Bali dan Lombok (SSBBL)** lahir di Karangasem pada tanggal 1 Januari 1925. Perhimpunan ini didirikan atas usaha orang-orang terkemuka di daerah itu antara lain oleh raja Karangasem, para punggawa dan beberapa orang pendeta yang ikut serta mengusahakan dana untuk mengatasi pembiayaan sekolah bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, sehingga anak-anak yang dipandang cakap dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi bahkan tidak sedikit yang disekolahkan sampai ke Jawa.

Suatu hal yang cukup memperlihatkan kemajuan dalam bidang pendidikan adalah di samping telah terbentuknya beberapa perkumpulan yang beraktivitas dalam bidang pendidikan, juga telah diterbitkannya majalah-majalah sebagai sarana media komunikasi yang memuat gagasan-gagasan atau ide-ide pembaharuan itu yang dikenal pada waktu itu dengan istilah paham kemajuan dan memuat ilmu pengetahuan sehingga mempercepat proses inovasi ketengah-tengah masyarakat serta menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsanya. Dua buah majalah yang muncul dalam waktu yang hampir bersamaan adalah majalah "Bali Adnyana" yang dipimpin oleh I Gusti Tjakratanaya dan I Gusti Ketut Putra, mulai terbit 1 Januari 1924 dan yang satu lagi adalah majalah "Surya Kanta" yang diterbitkan oleh suatu perkumpulan bernama **Perkumpulan Surya Kanta** yang pengurusnya terdiri dari Ketut Sandi, Ketut Nasa, Nengah Metra, Ketut Kaler, Ketut Purna, Ketut Mudasara dan Wayan Ruma,¹⁶ sedangkan anggota-anggotanya hanya terdiri dari golongan Jaba.

Dilihat dari latar belakang berdirinya kedua majalah itu dapat kita ketahui bahwa antara pendiri Bali Adnyana dan Surya Kanta terjadi pertentangan pendapat atau pandangan yang menyangkut masalah status sosial yaitu tentang masalah kasta. Kita mudah memahami mengapa terjadi pertentangan semacam itu antara lain karena sistem kasta sebagai stratifikasi sosial dalam masyarakat tradisional di Bali banyak sangkut-pautnya dengan sistem sosial lainnya seperti misalnya sistem perkawinan. Pada waktu itu di dalam masyarakat Bali berlaku aturan dalam sistem perkawinan yang disebut **Asu Pundung** dan **Alangkahi Karang Hulu**. Asu Pundung mempunyai pengertian bahwa seorang laki-laki dari kasta Ksatria, Wesia maupun Sudra (Jaba) dilarang kawin dengan seorang gadis dari kasta Brahmana, sedangkan Alangkahi Karang Hulu adalah dilarangnya suatu perkawinan terhadap laki-laki dari kasta yang lebih rendah (Sudra maupun Wesia) mengawini seorang gadis dari kasta yang lebih tinggi (Ksatria). Dalam sistem pemerintahan, peralihan dari birokrasi tradisional ke birokrasi kolonial belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi moderen. Sistem pengangkatan para pejabat seperti raja maupun tingkat punggawa masih dilakukan berdasarkan atas keturunan sehingga hubungan politik antara penguasa (raja) dan bawahannya lebih banyak bersifat patrimonial sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan atau wewenang mencerminkan hubungan yang berbentuk **clientchip**. Demikian pula bila kita lihat dalam sistem birokrasi kolonial, hubungan antara penguasa pusat dengan penguasa daerah, antara Residen dengan Regent (raja), menunjukkan hubungan patron-klien (**patron-client**).¹⁷ Keadaan seperti inilah menyebabkan golongan Jaba merasa tertekan, sehingga lewat perkumpulan Surya Kanta dan majalah Surya Kanta mereka menuntut adanya kesamaan hak dan perlakuan, serta menginginkan agar sistem pengangkatan dilaksanakan secara legal rasional.¹⁸

Akibat perbedaan sikap dan pandangan antara golongan Tri Wangsa dengan golongan Jaba itu menyebabkan timbulnya konflik yang berkisar pada masalah sistem kasta. Ide-ide dari kedua yang bertentangan ini disalurkan dalam bentuk polemik-polemik lewat majalah yang mereka terbitkan yaitu majalah Bali Adnyana memuat ide-ide atau buah pikiran golongan Triwangsa. Dalam hal ini yang banyak menyumbangkan buah pikiran adalah I Gusti Tjakratanaya, seorang tokoh elite tradisional, sedangkan majalah Surya Kanta memuat ide-ide atau buah pikiran dari golongan Jaba yang mempunyai pandangan yang lebih maju. Konflik semacam ini akhirnya menimbulkan semacam kompetisi dalam memajukan masyarakat Bali, dan ini menunjukkan kepada kita suatu ciri dari pertumbuhan masyarakat moderen.

Di tengah-tengah memuncaknya usaha-usaha untuk memajukan masyarakat Bali dalam bidang ilmu pengetahuan melalui

pendidikan, timbul pula beberapa pendapat tentang masuknya pengaruh kebudayaan Barat ke Pulau Bali, tidak saja menyangkut masalah pendidikan seperti penggunaan bahasa Belanda, cara berpakaian, gaya hidup dan lain-lain, tetapi juga mengenai masuknya agama Nasrani ke Bali. Perbedaan pendapat tentang agama dan kebudayaan ini timbul di kalangan bangsa Belanda sendiri, yaitu Dr. Schmutzer pimpinan Katholieke Volksraad-fractie dan Van Helsdingen dari Christelijk-Ethische Partij, juga Dr. H. Kraemer di mana ketiga tokoh misi itu menghendaki agar pemerintah memperbolehkan agama Nasrani berkembang di Bali, sedang pihak golongan orientalis yaitu Dr. R. Goris dan Fr. F. D.K. Bosch menghendaki agar kebudayaan Bali tetap utuh dan tidak dipengaruhi oleh kebudayaan Barat.¹⁹

Dari kalangan golongan terkemuka masyarakat Bali pun timbul protes yaitu dari raja-raja, para pemuka agama dan para elite moderen yang dipelopori oleh Tjokorde Gde Raka Sukawati wakil anggota Volksraad dari Bali, dengan gigih menentang masuknya agama Kristen ke Bali. Untuk mengatasi kegelisahan masyarakat, pemerintah bersama-sama beberapa pemuka masyarakat di Bali berhasil mendirikan HIS. "Sila Dharma" di Klungkung yang dipimpin oleh seorang Belanda bernama H. te Flierhaar mencoba menerapkan sistem pendidikan dengan menyesuaikan sistem pendidikan Barat dengan memasukkan unsur-unsur kebudayaan Bali dalam bidang pendidikan. Dalam cita-cita untuk membangkitkan kecintaan terhadap kebudayaan sendiri yaitu kebudayaan Bali, di Ubud (Gianyar) lahir suatu perkumpulan yang diberi nama "Pita Maha" di bawah asuhan Tjokorde Gde Raka Sukawati yang bertujuan menghimpun para seniman Bali untuk meningkatkan ketrampilan kerjanya dalam bidang kerajinan di antaranya di bidang tenun, ukir-ukiran dan lukisan. Usaha-usaha untuk memasukkan unsur-unsur kebudayaan Bali dalam dunia pendidikan terus ditingkatkan dan baru mencapai puncaknya pada tahun 1939 yang kemudian dikenal dengan sebutan "Balisering" yaitu : Dalam membangun bangunan sekolah hendaknya mempergunakan corak Bali, artinya dengan arsitektur dan hiasan ukir-ukiran Bali, mengubah metode menggambar dengan cara tradisional, mengajarkan pula nyanyian daerah (tembang), memasukkan unsur-unsur tari-tarian Bali ke dalam pendidikan olah raga.

Membicarakan masalah pendidikan dalam peranannya nanti sebagai penggerak atau dinamisasi masyarakat, perlu juga dikemukakan organisasi-organisasi pelajar-pelajar dan pemuda yang tumbuh pada waktu itu. Pada tanggal 14 Juli 1935 di Denpasar berdiri sebuah perkumpulan pelajar bernama Eka Laksana yang anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar dari Bali dan Lombok serta bertujuan mempelajari serta memajukan kebuda-

yaan Bali dan Lombok di samping itu pula bertujuan saling membantu di antara sesama pelajar Perkumpulan Eka Laksana ini membuka cabangnya hampir di seluruh Bali bahkan meluas ke Jawa, antara lain di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.²⁰ Setelah hampir satu tahun berjalan, perkumpulan Eka Laksana kemudian menggabungkan diri dengan **Balische Studiefonds** dengan nama Bali Dharma Laksana. Penggabungan ini terjadi di Denpasar pada tanggal 26 Juli 1936 dengan tujuan memberikan bantuan kepada putra Bali yang sedang belajar di sekolah menengah maupun di sekolah tinggi, terutama bagi mereka yang dipandang cakap, mengumpulkan dana serta memajukan kebudayaan Bali dalam arti seluas-luasnya. Perkumpulan ini juga menerbitkan majalah dengan nama "Djatajoe" yang berfungsi sebagai media komunikasi diantara para anggotanya, di samping juga berfungsi sebagai tempat untuk menuangkan pendapat-pendapat, ide-ide, seruan-seruan bagaimana usaha untuk memajukan masyarakat Bali dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga tulisan-tulisan tentang berbagai cabang ilmu seperti kebudayaan hukum, ekonomi dan lain-lainnya.

Satu organisasi yang perlu juga dikemukakan di sini adalah Perkumpulan Putri Bali Sadar yang lahir di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 1936. Perkumpulan ini bergerak dibidang sosial dan pendidikan. Adapun mengapa timbulnya perkumpulan ini, antara lain karena terdorong oleh rasa kesadaran dikalangan para wanita Bali yang sudah berpendidikan untuk menolong kaum putri Bali yang putus sekolah karena latar belakang ekonominya lemah, disamping itu di dalam masyarakat Bali masih banyak yang buta huruf. Oleh karena di kalangan putri Bali ada yang sudah sadar akan pentingnya pendidikan pada waktu itu, maka perkumpulan itu pun dinamakan Putri Bali Sadar.²¹

Sebagai suatu keunikan yang ikut memberikan motivasi dalam peranannya pendidikan sebagai faktor dinamisasi masyarakat di Bali adalah berdirinya perguruan Taman Siswa di Bali yang dimulai di Denpasar pada tahun 1933, kemudian di Jembrana (1936), Karangasem (1939), dan di Tejakula, Singaraja (1940). Sudah cukup memberikan arti bagaimana tingkat kesadaran masyarakat yang telah dapat menerima gagasan-gagasan baru seperti pendirian Perguruan Taman Siswa sebagai sekolah swasta yang berazaskan kebangsaan di tengah-tengah pemerintahan kolonial Belanda yang sedang kuatnya berkuasa pada saat itu.

III

Dalam mempelajari cita-cita "paham kemajuan" dan pembaharuan (**Progress and modernity**) oleh golongan pelajar, pimpinan opini dan beberapa orang terpelajar yang dapat kita go-

longkan sebagai kelas elite,²² kita dapat memahami tingkat pemikiran mereka lewat tulisan-tulisan di dalam majalah yang mereka terbitkan dan juga dengan mempelajari azas dan tujuan dari organisasi-organisasi yang mereka bentuk.

Pada bab di atas telah kami singgung bahwa dalam proses penyerapan ide-ide pembaharuan (inovasi) sering mengalami konflik karena adanya benturan-benturan nilai-nilai, seperti apa yang kita lihat timbulnya perbedaan pandangan antara golongan Tri Wangsa dengan golongan Jaba, di mana perbedaan pandangan mereka ini dapat kita pelajari lewat tulisan-tulisan mereka di dalam majalah "Bali Adnyana" dan "Surya Kanta". Sebagai salah satu contoh bagaimana pandangan golongan Tri Wangsa terhadap hal-hal yang menyangkut masalah status sosial (kasta) dan harga diri dalam hal ini mengenai pemakaian bahasa sehari-hari, I Gusti Tjakratanaya dari golongan Tri Wangsa berpendapat bahwa adanya tingkatan bahasa itu (halus = **utama**, sedang = **madya**, kasar = **nista** atau di Jawa kita kenal dengan **kromo hinggil**, **kromo** dan **ngoko**) disebabkan karena budi, kewangsaan dan derajat.

. . . . Tjontoh : **Boedi** : seorang Soedra jang oetama boedinja mendapat ia bahasa madya dari orang Tri Wangsa, dan oetama dari Soedra.

Kewangsaan : seorang Tri Wangsa walaupun bodoh sekalipun (koerang berboedi) mendapat ia bahasa oetama dari orang Soedra.

Deradjat : seorang Soedra jang berpangkat atau baik laksana, mendapat ia bahasa madya dari orang Tri Wangsa dan oetama dari orang Soedra.

Beginilah memang soedah berlakoe di Bali dan Lombok bagi orang Bali Hindoe jang tahoe pada adat tata loka tjara.²³

Berdasarkan kutipan tersebut di atas tampaklah bahwa golongan Tri Wangsa masih tetap menginginkan status yang lebih tinggi dari golongan Jaba, sedangkan dari golongan Jaba yang sudah terpelajar menghendaki adanya perubahan sikap dan pandangan dari golongan Tri Wangsa yaitu agar mulai saling hormat-menghormati sesama orang Bali. Dalam hal ini memang tampak bahwa golongan Jaba mempunyai pandangan yang lebih maju, hal ini tampak dari uraian Nengah Metra, Presiden Hoofdbes-tuur dari perkumpulan Surya Kanta yang mengatakan :

. . . . S.K. (Surya Kanta) boeat mentjari kemajoean menoe-roet djaman sekarang beralaskan kemoesiaan serta berdasar dengan boedhi itoelah jang dapat menghaloeskan perasaan bathin dan mengekalkan tali persaudaraan dengan alasan kemanusiaan Soepaja lebih jelas bandingkanlah keadaan diri sendiri sekarang dengan beberapa tahoen

jang telah laloe, terdapat beberapa peroebahan jang semata-mata terbit karena adat dan pikiran menoeroet oekoeran pengetahuan, berapa poela peroebahan jang akan didapat oleh anak tjoetjoe kita²⁴

Mengenai tentang konsepsi atau pandangan terhadap stratifikasi sosial yang dibentuk oleh sistem kasta yang menimbulkan perbedaan status sosial di Bali, pihak elite Jaba Ktut Nasa seorang guru yang menjabat Wakil Presiden perkumpulan Surya Kanta mengatakan bahwa pertingkatan kasta itu tidak lain dari pada pertingkatan budi yang dinilai berdasarkan perbuatan.²⁵ Bagaimana penting artinya pendidikan serta peningkatan harga diri (**status and prestige**) melalui ilmu pengetahuan dapat kita ketahui dari pendapat Nengah Metra yang mengatakan :

Kita kaoem Jaba tidak perloe mentjari (djangan mengharap) gelaran Ida, Dewa, Goesti. Marilah kita kaoem Jaba selaloe mengoetamakan boedhi, dan marilah kita beroesaha sekoeat-koeatnya kita, kedjarlah gelaran Mr. Dr. Ir. dan Prof. karena boedhi dan kepandaian itoelah jang dapat mengangkat kita kaoem Djaba.²⁶

Studi tentang konflik sosial ini memang sangat menarik untuk diteliti dan dipelajari untuk membuktikan sejauh mana faktor pendidikan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial seperti perobahan status maupun perobahan nilai-nilai yang jelas sudah menunjukkan kepada kita bahwa pengaruh pendidikan pada tahap itu sudah menimbulkan gejolak-gejolak dalam masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, ada pihak yang ingin memasukkan nilai-nilai baru dan ada pula yang masih mempertahankan nilai-nilai lama. Hal seperti inilah kadang-kadang sering menimbulkan konflik dalam masyarakat, ada kalanya berbentuk konflik phisik ada pula hanya berupa konflik dalam bentuk ide, gagasan, pikiran dan pandangan. Secara teoritis kita mengetahui bahwa masuknya inovasi ke dalam suatu sistem sosial mengalami suatu proses dan tahapan-tahapan bahkan tidak jarang pula dalam peresapannya suatu nilai baru itu menghendaki jangka waktu yang agak panjang. Di dalam proses perubahan-perubahan menuju masyarakat yang lebih maju atau modern, kita lihat dari pihak golongan Tri Wangsa itu lebih berhati-hati dalam menerima pengaruh kebudayaan Barat. Apakah ini karena untuk mempertahankan status sosial saja, apakah ada keawatiran dengan masuknya agama Kristen ke Bali di mana masalah-masalah masuknya kebudayaan Barat pada waktu itu juga menjadi pembicaraan masyarakat. Bagaimana pandangan golongan Tri Wangsa terhadap kemajuan masyarakat pada waktu itu dapat dilihat dalam kutipan dibawah ini .

. . . Oentoek mendjaga keroekoenan Bali (Sang Tjatoer Wangsa) haroes diperhatikan adat ketimoeran, djangan hendaknya mempeladjar pengetahoean Barat dengan mengabaikan pengetahoean Timoer²⁷

Bila kita bandingkan dengan pandangan golongan "Surya Kanta" nampaknya sudah melangkah jauh lebih maju, hal ini dapat kita pelajari dari tulisan N.S. dalam **Surya Kanta** no. 2 Th II halaman 17 yang berjudul : " Angan-angan" antara lain :

. . . . Bahwasanja, oleh karena pendirian djaman, kemaean natuur (**paileh djagat**) beberapa bangsa didoenia ini, sekarang ini sedang masing-masing beroesaha memadjoean negerinya, ada jang soenggoeh-soenggoeh hanja mengedjar kemaadjoean pengadjaran, memperbaiki nasibnja, economienja, agar dapat sedjadjar berdiri dengan bangsa-bangsa jang telah majoe; ada djoega jang mengedjar kepandaean dengan maksoed memboeang penindasan lain bangsa, sebagai telah oemoem diketahui orang, oempamanya dengan menggerakannya orang di Hindia Inggris, Tiongkok, Filipina, Mesir, dan lain sebagainya ,
Betapa besar hati saedara-saedara kita di tanah Djawa menjempoet poetra-poetranja jang baroe datang dari Europa, dengan gelaran Meester, Doctor, Ingenieur, Arts, dan lain-lain.? Wah !!! mengingat hal itoe, terkenanglah kami akan negeri Bali ini, apakah akan djadinnja kemaadjoean djika masih sebagai sedia kala? Siapakah kiranya diantara kita pendoedoek Bali ini jang dapat mengichtiarkan, soepaya kita djangan terlaloe djaoeh ketinggalan dibelakang dari saedara-saedara kita di Djawa ??

Di samping cita-cita memajukan masyarakat di bidang pendidikan, juga sangat banyak sumbangan pikiran untuk pembaharuan di bidang sosial ekonomi seperti penyederhanaan dan penghematan pembiayaan dalam upacara **ngaben** (pembakaran mayat),²⁸ dalam bidang adat istiadat agar diadakan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, seperti misalnya sistem perkawinan.²⁹ Juga di dalam bidang pemerintahan pihak golongan pembaharuan dari Surya Kanta telah ada tuntutan agar pihak pemerintah dalam sistem pengangkatan pegawai, tidak lagi berdasarkan atas kasta atau keturunan (**ascription**) tetapi hendaknya berdasarkan ukuran kepandaian (**achievement**).³⁰

Cita-cita kemajuan dan modernisasi akan lebih tampak lagi di dalam cita-cita yang timbul di dalam tubuh organisasi-organisasi yang timbul kemudian seperti lahirnya emansipasi wanita yang telah dirintis oleh Perkumpulan Shanti dengan mendirikan Sekolah Perempuan Shanti dan perkumpulan Putri Bali Sadar

juga memajukan putri Bali dengan membuka kursus ABC. Melalui bidang pendidikan kita juga melihat benih-benih Nasionalisme di Bali sudah mulai tumbuh, baik melalui pelajar-pelajar Bali yang menuntut ilmunya di Jawa, tumbuh di dalam tubuhnya masyarakat Bali sendiri dimana rasa kesadaran akan persatuan di kalangan Tri Wangsa dan golongan Jaba, dan sebagai kenyataan dalam bentuk lembaga pendidikan kita dapat lihat dengan berdirinya Perguruan Taman Siswa di Bali.

IV

Pada bagian terakhir ini kita akan melihat dinamika apa yang ditimbulkan oleh pengaruh pendidikan di dalam perubahan masyarakat. Perubahan-perubahan masyarakat itu sudah mulai tampak di dalam mobilitas sosial, terutama yang ada kaitannya dengan status sosial dan kemajuan-kemajuan di bidang kehidupan masyarakat sejalan juga dengan aktivitas pemerintah kolonial pada waktu itu. Di dalam bidang politik, pemerintah sudah mulai memperhatikan tuntutan-tuntutan yang menghendaki agar pemerintah dalam sistem pengangkatan di bidang pemerintahan dilakukan dengan cara legal rasional, artinya tidak lagi berdasarkan kriteria askriptip (*ascription*) tetapi dengan kriteria *achievement*. Hal ini sudah dapat dibuktikan bahwa pada tahun 1926 beberapa punggawa sudah dijabat oleh golongan Jaba yaitu I Nyoman Raka menjadi punggawa di distrik Kubutambahan,³¹ I Ketut Sandi menjabat punggawa kota di Singaraja,³² sedangkan I Nyoman Kadjeng telah menjabat *Adjunt Commies* pada kantor Resident di Singaraja.³³ Di bidang pendidikan, sejak pemerintah kolonial Belanda timbul kekhawatiran terhadap pelajar-pelajar Bali yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa yaitu dilarangnya pelajar-pelajar Bali melanjutkan pelajarannya di Probolinggo, maka sejak itu pula diperbolehkan bagi semua golongan masuk pada *Europeesche School* yang telah ada di Singaraja.³⁴

Di dalam tata pergaulan sehari-hari sudah tampak juga perubahan di bidang status sosial yaitu tidak lagi mengindahkan aturan-aturan dalam tatanan adat yang terikat pada tinggi-rendahnya kasta, seperti dalam pemakaian bahasa di mana para pelajar maupun golongan elit moderen dari semua golongan sudah mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa percakapan. Demikian pula akibat pengaruh tata kehidupan moderen seperti cara berpakaian, cara bertamu, pertemuan-pertemuan umum dengan mempergunakan kursi, menyebabkan dalam tata kesopanan pergaulan sudah mulai ada kesamaan tingkatan antara semua golongan masyarakat. Tata kehidupan moderen seperti itu lama-kelamaan dapat mempengaruhi juga dalam sikap dan pandangan masyarakat, sehingga nilai-nilai pembaharuan

dapat menyerap di dalam sistem masyarakat yang ada. Di dalam mobilitas sosial terutama yang menyangkut masalah perubahan status, rupanya faktor kekuasaan seperti **policy** pemerintah kolonial ikut juga menentukan. Hal ini tampak dalam sistem perkawinan di Bali yang tak dapat dilepaskan dengan adat-istiadat dan juga menyangkut tentang hukum adat perkawinan, sehingga lama dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dalam hal ini, walaupun pemerintah kolonial Belanda sudah ada banyak menaruh perhatian seperti apa yang dikemukakan oleh V.E. Korn di dalam **De Indische Gids** (Maret, 1922) yang telah menulis tentang perkawinan di Bali, di mana dalam artikel itu dinyatakan bahwa pemerintah ingin mengadakan persamaan hak di dalam hukum secara perlahan-lahan di antara keempat golongan (kasta) di Bali.³⁵ Seorang Belanda lainnya H. Graandijk telah lama mengecam tentang sistem perkawinan di Bali serta telah memberikan gambaran bagaimana nasib golongan Sudra akibat sistem perkawinan itu.³⁶ Apa yang dicita-citakan oleh golongan Surya Kanta sebagai pelopor paham kemajuan dalam mewujudkan kesamaan status dalam sistem perkawinan di Bali, baru pada tahun 1951 dapat direalisasi yaitu dengan dihapuskannya Alangkahu Karangulu dan Asu Mundung oleh Pemerintah Bali.³⁷

Sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang telah meresap di kalangan masyarakat Bali akibat dari pengaruh pendidikan yang semakin maju itu, di berbagai tempat di Bali sudah mulai berdiri Koperasi partikelir yang diatur oleh suatu peraturan tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari setiap anggotanya di dalam suatu **awig-awig** (aturan-aturan), atau mengikuti **Regeling op de Cooperatie en Vereniging**, 1 Juni 1927, no.1.

Kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi selain telah didirikannya beberapa koperasi, juga di bidang perbankan telah juga mengalami kemajuan. Pada akhir bulan Desember 1925 bekerja pada kantor pusat dan pada **onderafdeeling** Buleleng 2 agen. Pada kantor cabang di Denpasar ada 5 **onderafdeeling** yaitu : Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Karangasem telah dibuka 4 agen. Pada kantor cabang di Mataram, Lombok terdapat 3 **onderafdeeling** yaitu : Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur dapat dibuka 3 agen, sehingga pada tahun 1925 di Keresidenan Bali dan Lombok sudah dapat dibuka Bank Rakyat Bali berjumlah 9 agen.

Untuk mengetahui bagaimana kemajuan-kemajuan perbankan pada tahun-tahun berikutnya dapat pula digambarkan pada akhir tahun 1928 tercatat : di Kantor Pusat dengan 2 **onderafdeeling** yaitu Buleleng dan Jembrana dengan 5 agen,

pada kantor cabang di Denpasar dengan 4 **onderafdeeling** yaitu Badung, Tabanan, Klungkung dan Gianyar terdapat 10 agen, di cabang Mataram dengan 3 **afdeeling** terdapat 9 agen, dan di cabang Karangasem dengan 1 **afdeeling** terdapat 4 agen.³⁸

Kedudukan kota Singaraja sebagai ibu kota keresidenan Bali dan Lombok yaitu sebagai pusat pemerintahan sudah tentu semakin ramai, di samping juga menjadi kota pelabuhan. Sehingga hampir semua kegiatan baik di bidang politik, ekonomi dan kegiatan di bidang pendidikan semuanya terpusat di kota Singaraja. Sebagai kota pelabuhan kota Singaraja dengan pelabuhannya Buleleng sudah sejak lama menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang baik yang datang dari kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi maupun dari Jawa. Di Bali Utara terdapat tiga pelabuhan alam yaitu Tumukus, Buleleng dan Sangsit dan ketiga pelabuhan ini letaknya tidak begitu berjauhan. Sebagai masyarakat pantai, banyak para pendatang yang menetap sehingga membentuk suatu perkampungan dari beberapa suku bangsa antara lain suku Jawa, Madura, Bugis dan perkampungan orang-orang Timur Asing seperti Kampung Arab, Kampung Cina Rupanya sejak pemerintah Belanda menetapkan Singaraja sebagai ibu kota keresidenan Bali dan Lombok pada tahun 1882, mulai saat itu sudah timbul perhatian pemerintah Belanda untuk menertibkan penempatan orang-orang Timur Asing yang berada di Bali Utara, sehingga dengan Staatblad 1883 : 267 ditetapkan Pabean Buleleng, Tumukus dan Sangsit sebagai perkampungan Cina dan Pabean Buleleng sebagai perkampungan orang-orang Timur Asing lainnya.³⁹ Sebagai suatu gambaran umum bagaimana proses urbanisasi yang terjadi di Bali khususnya di Singaraja pada masa transisi itu, dapat dilukiskan bahwa penduduk pulau Bali pada bagian kedua abad yang lalu, diperkirakan jumlah penduduk pada waktu itu kurang lebih 892.500 jiwa, orang Asing (bukan orang Bali) kurang lebih 10.000 jiwa, diantaranya 1.200 orang Tionghoa, sedangkan lainnya terdiri dari orang-orang Bugis, Madura, Kangean, Selayar, Jawa yang kebanyakan menetap di Singaraja dan Jembrana.⁴⁰ Menurut perhitungan tahun 1930 jumlah penduduk di daerah Buleleng tercatat : Bumiputra : 167.703, Eropa : 197; Cina : 2.255, Keturunan Timur Asing lainnya : 483. Jumlah keseluruhan ada 170.638 orang.⁴¹

Sebagai pusat pemerintahan, tentu saja Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan dan Denpasar sebagai tempat pusat pemerintahan yang ke dua di mana di sana ditempatkan seorang Asisten Residen, tentu saja mencerminkan masyarakat kota dengan segala tata kehidupan orang kota. Tampaklah di sini

munculnya golongan kelas baru yaitu sebagai kelas penguasa sering disebut dengan golongan elit birokrasi dan golongan elite modern yang sudah mencerminkan kehidupan moderen.

V

Untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan di atas, perlu ditunjukkan beberapa yang penting. Masyarakat Bali sebagai masyarakat tradisional dengan struktur masyarakatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan yang dikenal dengan sistem kasta, demikian juga dengan sistem-sistem sosial lainnya mempunyai nilai-nilai tersendiri. Tidak mengherankan apabila sistem sosial seperti itu yang juga menyangkut berbagai sub sistem seperti sistem status, sistem perkawinan, sistem waris dan sebagaimana di mana masyarakat sebagian besar masih rendah tingkat pendidikannya akan sulit menerima nilai-nilai baru yang datang dari luar. Seperti apa yang kami ketengahkan dalam uraian di atas, bahwa dalam merubah pandangan, sikap, cara berpikir seseorang sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan mereka atau dengan perkataan lain bahwa faktor pendidikan betul-betul sebagai kunci dalam membuka kemungkinan masuknya nilai-nilai baru dalam proses peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat moderen.

Apa yang kita lihat pada masa-masa memuncaknya ide-ide pembaharuan dalam masyarakat di Bali, sudah tampak peranan golongan pelajar dan golongan terpelajar (**elite modern**) baik sebagai inovator, agen pembaharuan dan pimpinan opini dalam penyerapan nilai-nilai baru berupa ide-ide, gagasan-gagasan, pandangan yang dapat menggantikan nilai-nilai lama seperti sistem kasta, adat-istiadat dan sebagainya yang pada masa itu dipandang tidak lagi sesuai dengan keadaan zaman. Terjadinya konflik sosial di dalam proses modernisasi, sudah merupakan hal yang umum, namun tidak semua konflik menimbulkan **desintergrasi** bahkan bisa juga sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dalam masyarakat di Bali pada masa itu, di mana berakhirnya konflik itu dengan timbulnya kesadaran akan peraturan. Semuanya itu telah menunjukkan fungsi dan peranan pendidikan sebagai faktor dinamisasi masyarakat.

CATATAN

1. Myron Weiner (ed) : **Modernization : The Dynamics of Growth**.
Voice of America Forum Lectures, 1966, hal 3–4.
2. Prof. Dr. J.W. Schoorl, **Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang**.
Jakarta : Gramedia, 1980 hal. 4.
3. David C. Mc. Clelland, "The Impulse to Modernization" dalam Myron Weiner (ed), *op cit*. hal. 40
4. Dr. phil. Astrid S. Susanto, **Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial**.
Bandung: Binacipta, 1977, hal. 213.
5. Untuk lebih mendalam tentang proses difusi inovasi, baca: Zulkarimein Nasution, **Agen Perubahan dan Pimpinan dalam Proses Penyebarserapan (Difusi) Inovasi**.
Dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, *passim*.
6. Untuk mengetahui gambaran singkat tentang pendidikan di Jawa pada masyarakat Kolonial, lihat Sartono Kartodirdjo, **Struktur sosial dari masyarakat Tradisional dan Kolonial**. Lembaran Sejarah, no. 4, Desember 1969, hal. 50–55.
7. C.J.J. Caron, **Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok**. Augustus 1929, hal. 102.
8. Masalah status dan stratifikasi sosial, lihat Gerth and Mills, **From Max Weber: Essys in Sociology**. New York: Oxford University Press, 1958, hal. 159.
9. Dr. E. Utrech: **Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok**.
Sumur Bandung, 1962, hal. 226.
10. Lihat lampiran.
11. **Surya Kanta**, No. 3–4, Maret–April 1927, hal. 34.
12. **Ibid.**
13. **Ibid.**
14. Lihat lebih lanjut : Anak Agung Gde Putra Agung, "Lahirnya Idee-idee Pembaharuan dalam Organisasi Sosial di Bali". **Basis**, Maret 1972, hal. 183–189.
15. **Djatajoe**. No. 6, Th. III, 25 Januari 1939, hal. 176.
16. Lihat : **Statuten Surya Kanta**.
17. Uraian yang sangat menarik tentang hubungan **patron-client** antara pegawai pusat dan daerah, antara orang Belanda dengan orang Pribumi, baca : Heather Sutherland, **The Making of a Bureaucratic Elite**. Singapore : Heinemann Educational Books (Asia) LTD. 1979, hal. 45–55.
18. Baca : **Surya Kanta**. No. 1, th. I hal. 1–2 : **Surya Kanca**. no. 1, th II, hal. 9–10. **Surya Kanta**. no. 1, Th, II, hal. 49–50.

19. Periksa "Bali, zending en missie" dalam **Koloniaal Tijdschrift**, 22 Jaargang, no. 1, Januari 1933 dan lihat pula C. Lekkerkerker, "Drieerlei visie Zendingsvraagstuk" dalam **Koloniaal Tijdschrift**, 22 Jaargang, no. 4, Juli 1933, hal. 343–358.
20. Tentang perkumpulan Eka Laksana dapat dilihat dalam majalah **Djatajoe**. No. 1, Februari 1936, hal. 6–7.
21. Lihat Statuten Perkumpulan Putri Bali Sadar dalam majalah **Djatajoe**. no. 9, 25 April 1937, hal. 264–265.
22. Tentang perkembangan Elite Indonesia Moderen, baca : Robert Van Niel, **The Emergence of the Modern Indonesian Elite**. 's-Gravenhage, W. van Hoeve, 1960, *passim*.
23. I Gusti Tjakratanaya, "Bahasa" **Bali Adnyana**, no. 16, Th. III, 1 Juni 1926, hal. 1–2.
24. Lihat **Verslag Openbare Algemeene Vergadering Surya Kanta**, tanggal 29 Desember 1926.
25. Lihat **Verslag Openbare Algemeene Vergadering Surya Kanta**, tanggal 21 Maret 1926 dalam **Surya Kanta**, no. 4, Th. II, April 1926, hal. 60–63.
26. *Ibid.*
27. **Bali Adnyana**, no. 28, Th. IV, 1 Oktober 1927, hal. 3–5.
28. Lihat **Surya Kanta**, No. 1, Th. I, hal. 5; no. 2 Th. I, hal. 7–8; No. 3 Th. I, hal. 1–3; No. 9–10, Th. II, hal. 141–143; No. 3–4, Th. III, hal. 27–28; No. 8–9, Th. III, hal. 101–102 dan hal. 104–105.
29. Baca "Alangkahi karangulu" oleh : I Djaba, dalam **Surya Kanta**, no. 4, Th. II, hal. 52–53.
30. Baca O.N. "Kaoem Djabakah yang mereboet haknya Tri Wangsa?" dalam **Surya Kanca**. no. 5, Th. II, hal. 52–52.
Tentang konsep **Ascription dan Achievement** Lihat : Talcott Parsons, **The Social System**. New York: The Free Press, 1964, hal. 180–200.
31. **Bali Adnyana**. no. 9, Th. III, 1 Juli 1926, hal. 1.
32. **Bali Adnyana**. no. 20, Th. III, 10 Juli 1926, hal. 4.
33. **Bali Adnyana**. no. 27. Th. III, 20 September 1926, hal. 2.
34. **Bali Adnyana**. no. 19, 1 Juli 1927, hal. 2.
35. **Bali Adnyana**, no. 25, Th. IV, 20 Mei 1927, hal. 6.
36. H. Graan Dijk, "Bali en Imperialisme". **De Indische Gids**. 20 Jaargang, I, 1926, hal. 495–513.
37. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, **Peringatan 1 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali**. Denpasar : 25 September 1951, hal. 1.
38. L.J.J. Caron, **Memorie van overgave van den Resident van Bali en Lombok**. Singaradja: Augustus 1929, hal. 68–69.

39. Lihat C.J. Grader, **Nota van toelichtingen betreffende het in te stellen Zelfbesturend Landschap Buleleng**, (tanpa tahun), hal. 51.
40. R. van Eck, "Schetsen van het eiland Bali" T.N.I. 1878, II, hal. 212.
41. L.J.J. Caron, **op cit.** hal 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Gde Putra. "Lahirnya Idee-Idee Pembaharuan dalam Organisasi Sosial di Bali." *Basis*, Maret 1972, hal. 183–189.
- Bali Adnyana. *Majalah Bulanan*. Terbit di Singaraja tahun 1924–1929
- Caron, L.J.J. *Memorie Van Overgave van den Resident van Bali en Lombok*. Singaradja: Augustus 1929.
- Clelland, David C.M.c. "The Impulse to Modernization" dalam Myron Weiner (ed): *Modernization : The Dynamics of Growth*. Voice of America From Lectures, 1966, hl. 29–40.
- Djatajoe, *Majalah bulan*, no. 1, 1936; no. 9, 1937; no. 6, 1939.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, *Peringatan 1 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali*. Denpasar, 1951
- Eck, R. van, "Schetsen van het eiland Bali". *T.N.I.*, II, 1978.
- Gerth and Mills, *From Max Weber: Essy in Sociology*. New York, Oxford University Press, 1958.
- Grader, C.J. *Nota Van toelichtingen betreffende het in te stellen Zelfbesturend Landschap Buleleng*. (tampa tahun).
- Kartodidjo, Sartono. *Sturktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial*. Yogyakarta : Lembaran Sedjarah. no. 4, 1969.
- Lekkerkerker, C. "Drie rlei vis ie op het Balische Zendingsvraagstuk." *"Koloniaal Tijdschrift*, 22 Jaargang, no. 4, 1933.
- Nusutio, Zulkarimein. *Agen Perubahan dan pimpinan dalam Proses Penyebarserapan (difusi) Inovasi*. Dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. (tampa tahun).
- Niel, Robert van. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. 's-Gravenhage, W. van Hoeve, 1960.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York The Free Press, 1964
- Schoorl, Prof. Dr. J.W. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta : Gramedia, 1980.
- Surya Kanta. *Majalah Bulanan, Singaradja, 1925–1927*.
- Susanto, Dr. Phil Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung, Binacipta, 1977
- Sutherland, Heather. *The Making of a Bureaucratic Elite*. Singapore Heinemann Educational Books (Asia) LTD 1979

Utrecht, Dr. E. **Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok**
Sumur Bandung, 1962.

Verslag Openbare Algemeene Vergadering Surya Kanta.
Tanggal 21 Maret 1926 dan tanggal 29 Desember 1926.

Weiner, Myron (ed : **Modernization : The Dynamics of Growth.**
Voice of America From Lectures, 1966.

Lampiran I. A¹Tabel Sekolah-sekolah yang ada
di Bali s/d 1919.

Jenis Ssekolah	s/d 1914	s/d 1919	Jumlah
2e. Klasse school	15 buah : Sukasada Kubu Tambahan Boeboenan Bondalem Singaradja (2 buah) - Penebel Tabanan Kerambitan - Tegalcangkring Negara - Denpasar Sukawati Kloengkoeng Manggis.	Jumlah ini tidak berubah	15 buah
H.I.S.	1 buah di Singaradja	1 bh di Denpasar (dibuka th. 1918)	2 buah
Europeesche Lagere school	13 buah di Bali Utara 13 buah di Bali Selatan 1 Buah di Djembrana -	tetap 1 bh di Singaradja dibuka th 1916.	27 buah
H.C.S	1 buah di Singaradja	tetap	1 buah

¹Dikutip dari memorie van overgave vanhet Gewest Bali en Lombok (1 April 1919), pp. 101 - 106.

Tabel Sekolah-sekolah yang ada
di Bali s/d 1929

	Aantal der scholen op		Aantal der op						Toelich-tingen
	1 Oct. 1926	1 Juni 1929	1 October 1926 . 1 Juni 1929						
			aanwezige						
	onder-wijzers	leerlingen		onder-wijzers	leerlingen				
j		m	j		m				
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10
			Europeesche lagere school.						
Boeileng	1	1	2	23	16	2	31	14	
			Hool. Inlandsche school						
Boeileng	1	1	7	127	15	7	174	25	
Badoeng	1	1	7	201	24	9	158	36	
Kloengkoeng	-	1	-	-	-	3	100	9	Goepend op 1 Juli 1928.
			2a klasse scholen.						
Boeileng	8	8	28	758	28	31	1265	109	
Djembrana	2	2	9	243	15	9	337	37	
Badoeng	3	5	12	355	29	17	727	122	1 vervolg school to Blahkioeh op gericht op 14 Mei 1928. 1 2a kl. school to Denpasar opgericht op 13 April 1927.
Tabanan	5	6	20	577	40	21	839	106	1 2a kl. school to Tegallinggah opgericht op 22 April 1927.

²Dikutip dari L.J.J. Caron, *Memorie van overgave van den Resident van Bali en Lombok*, Agustus, 1929.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tabanan									
Gianyar	2	3	9	326	16	16	402	442	1 vervolg- school to Oeboed op gericht op 4 April 1928.
Kloeng-koeng	3	3	13	419	20	14	526	92	
Karang- asem	2	2	7	213	11	7	299	27	
Voelkscholen									
Boeileng	15	16	24	1029	41	33	1479	67	1 volks-school to Pandji op gericht op 18 Januari 1928
									Een nieuwe volks-school werd 11 Juli 1929 geopondte Sidatapa (Banjdjar) met 37 jongoes leerlingen.
Djembrana	-	3	-	-	-	6	278	9	1 volks-school to Jeh Embang opgeric op 15 Maart 1927. 1 Idem to Peoleok an opgericht op 1 Augustus 1928.
Badoeng	20	22	36	1365	74	42	1854	252	2 volks-schoolen opgericht resp. to Plaga en Serangan op 1 en 18 October 1928.
Tabanan	20	22	38	1732	70	47	1995	235	2 id. te Pedjaten en Batoeriti id. resp. op 31 Januari 1928 en 1 Juni 1928.
Gianyar	9	12	14	718	26	24	941	132	3 volksscholen te Tampaksiring, Keramas en Mas opgericht resp. op 26 Juli 1928 en 1 Augustus 1928.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kloeng- koeng	6	23	11	522	24	39	1743	195	<p>1 volksscholen te Djongoetbatoe opgericht op 1 November 1926.</p> <p>1 id. te Kintamani id. op. 1 Mei 1927.</p> <p>1 id. te Aan id. op 1 Juli 1927.</p> <p>4 volksscholen te sowana, Pasinggahan, Gengel richt op 5 Maart 1928.</p> <p>1 id. te Batoemadeg id. op. 7 Maart 1928.</p> <p>1 id. te tangland id. op 22 Maart 1928.</p> <p>1 id. te Penindjoan id. op. 23 April 1928.</p> <p>1 id. te Kamasan id. op. 18 Februari 1929.</p> <p>1 volksscholen te Njalian opgericht op 1 April 1929.</p> <p>3 id. te Bangli, Koeboe an Kajoebihi id. op 4 April 1929.</p> <p>1 ib. te Apoean id. op. 5 April 1929.</p> <p>1 id. te. Selat id. op. 7 Mei 1929.</p>
Karang- asem	10	11	15	743	76	17	1019	64	1 id. te Karang asem id. op 1 Mei 1929.

Tabel: Sekolah-sekolah yang ada di Bali s/d 1932

Onderafdeeling	Aantal der scholen op.		Anntal op						Toelichtingen.	
			10 October 1929			1 October 1932				
	1 Oct. 1929	1 Oct. 1932	Onderwijzers	Leernben		Onderwijzers	Leeralingan			
1	2	3	4	j	m	7	j	m	10	
				Europee sche Lagere Scholen						
Bueleleng	1	1	2	36	18	2	19	10		
				Hollandsch Inlandsche Scholen.						
Boeileleng	1	1	7	174	36	8	172	44		
Boeileleng	1	1	8	162	32	7	173	46		
Idem	—	1	—	—	—	1	16	12	Europeesc afdeeling H.I.S.	
Kloengkoeng	1	1	4	147	15	6	202	26		
				Tweede Klasse Scholen.						
Boeileleng	8	8	29	928	95	27	1134	84		
Jembrana	2	2	9	322	37	9	406	39		
Badoeng	5	6	16	573	100	18	735	187	w.d.l.	
Tabanan	6	6	21	839	106	22	914	127	meisjes school.	
Gianyar	3	3	11	402	44	10	392	65		
Kloengkoeng	3	3	13	504	80	13	494	70		
Karangasem	2	2	7	282	23	6	307	29		
				Volksscholen.						
Boeileleng	17	33	32	1422	62	61	2305	654	w.0.4. meisjes volksscolen.	
Jembrana	3	4	5	272	9	7	308	4	w.0.2 meisjes volksschole	
Badoeng	25	28	45	1854	252	49	1852	524	w.0.1 meisjes volschool	
Tabanan	22	23	47	1995	235	48	2193	510	w.0.1 meisjes volschool	
Gianyar	12	20	24	941	132	32	2010	299	w.0.1. meisjes volksschool to Bangli.	
Kloengkoeng	23	26	40	1619	188	49	2027	341		
Karangasem	11	15	17	145	51	29	1205	210		

³Dikutip dari Brawkar, memorie van overgave van den Resident van Bali Lombok, Oktober 1932.

**Tabel Sekolah-sekolah yang ada
di Bali s/d 1941**

Jenis sekolah	s/d 1941	Keterangan
Volksonderwijs. Vervolgonderwijs	195 buah 39 buah. Dengan jumlah murid 3672 orang. 33 buah Vervolgschool. 3 buah landbowklasse. 3 buah Meissjesklasse. 1 buah di Tabanan. Dengan Klas Belanda.	Tesebar diseluruh Bali
H.I.S.	4 buah 1 bh di Singaradja 2 bh di Denpasar 1 bh di Kloeng- koeng berasal dari HIS Sila Darma.	
Vakonderwijes	53 buah	
Ambachtschool	1 buah di Denpasar	
Onderwijs aan meisjes	2 buah Huishoudscholen, di Singaraja dan Denpasar.	
Particulier onder- wijs.	1 buah Setia Hati School di Djembrana 1 buah Balische Holland sche School Sisiapara di Singaradja. 1 buah Hollandsche Bali ache Scool di Bajera/ Tabanan. Taman Siswa di Denpasar.	Sederajat dengan HIS. Idem Idem Idem

⁴ Dikutip dari HJE Moll, memorie van Overgave van den aftrende van Resident Bali en Lombok, (Mei 1941), pp. 71 – 76.

Tabel Jumlah para pelajar Bali yang melanjutkan sekolah di luar Bali

No.	Jenis Sekolah	Tahun	T e m p a t						
			Purbo- linggo	Ma- lang	Bli- tar	Sura- baya	Yogya- karta	Bo- gor	Maka- sar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pereode sampai de- ngan thn. 1927. 5							
1.	MULO		25	—	—	—	—	—	—
2.	AMS		1	—	—	—	—	—	—
3.	Kweek School		9	—	—	—	—	—	—
4.	Ambact- school		8	—	—	—	—	—	—
5.	NIAS		1	—	—	—	—	—	—
6.	OSVIA		4	—	—	—	—	—	10
7.	HKS		1	—	—	—	—	—	—
Jumlah :			59	—	—	—	—	—	10
		Pereode 1937/1938	6						
1.	MULO		3	2	—	9	38	—	11
2.	HIS		—	2	—	—	—	—	—
3.	NIAS		—	—	—	3	—	—	—
4.	HBS		—	1	—	—	—	—	—
5.	MHS		—	—	—	1	—	—	—
6.	GHS		—	—	—	2	—	—	—
7.	HVS		—	—	—	3	—	—	—
8.	KES		—	—	—	—	—	—	—
9.	Ambact- school		—	—	—	2	1	—	—
10.	Griss MULO		—	—	—	1	—	—	—
11.	Huis- school		—	—	—	1	3	—	—
12.	AMS		—	—	—	—	2	—	—
13.	Ambac- school		—	—	—	—	1	—	—
14.	Lagere- school		—	—	—	—	—	4	—
15.	Normal Meijes		—	—	10	—	—	—	—
16.	Industrie school		—	—	—	2	—	—	—
Jumlah :			3	5	10	26	45	4	11

⁵Dikutip dari artikel Bintang Timur "Pemoeda-Pemoeda Bali yang akan mendjadi bibit di tanah itoe dengan OSVIA" dalam **Surya Kanta**, No. 3 4, tahun III (Singaradja: tanpa penerbit, Maret April 1937), pp. 33 34.

⁶Data-data dikumpulkan dari madjalah **Djatajoe** No. 6, thn. II (Singaradja, tanpa penerbit, 25 Januari 1937) s/d **Djatajoe** No. 6, thn. III. (Singaradja, tanpa penerbit, 25 Januari 1939).

STRATIFIKASI DAN POLA KEPEMIMPINAN LOKAL DI DAERAH SUMATERA SELATAN

Oleh Ma'moen Abdullah

I. Pendahuluan

Seorang ahli filsuf yang berasal dari Yunani (Aristoteles) pernah mengatakan, bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga golongan yaitu : golongan yang kaya, golongan yang melarat dan golongan yang berada di tengah-tengah. Ucapan yang demikian itu sedikit banyaknya mengandung kebenaran, dan diduga pada zaman-zaman sebelumnya, orang telah mengakui adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang bertingkat-tingkat dari bawah keatas. Lapisan-lapisan dalam masyarakat yang dimaksudkan itu dikenal dalam ilmu kemasyarakatan dengan istilah social stratification.¹⁾ Sistem berlapis-lapisan itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dan dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap oleh masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas, sedangkan mereka yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga itu, dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Biasanya golongan yang berada pada lapisan atas rendah. Biasanya golongan yang berada pada lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi justru kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif, yaitu di samping memiliki uang yang banyak, juga memiliki kehormatan dan ilmu pengetahuan.

Lapisan-lapisan masyarakat yang dimaksudkan, secara historis mulai ada semenjak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam organisasi sosial. Mengenai bentuk-bentuk lapisan dalam masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Bagaimanapun juga lapisan tersebut ada di mana-mana; apakah lapisan itu terdapat dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunis dan lain sebagainya. Pada masyarakat-masyarakat yang sederhana kebudayaannya, lapisan-lapisan masyarakat mula-mula didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara yang memimpin dengan yang dipimpin, golongan budak belian dengan bukan budak belian, golongan berdasarkan pembagian kerja dan perbedaan berdasarkan kekayaan. Semakin kompleks dan semakin majunya perkembangan teknologi sesuatu masyarakat di dunia ini, semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat.²⁾ Oleh karena itu dalam masyarakat yang sudah kompleks.

perbedaan kedudukan dan peranannya bersifat kompleks karena banyaknya orang dan berbagai-bagai ukuran yang dapat diterapkan terhadapnya. Dalam makalah ini kami hanya menyoroti lapisan-lapisan masyarakat di daerah Sumatera Selatan sejak timbulnya Kesultanan Palembang sampai zaman permulaan Revolusi Fisik.

Masalah kepemimpinan dalam masyarakat tradisional berbeda dengan kepemimpinan dalam masyarakat modern, karena dalam masyarakat modern sifatnya lebih kompleks. Kepemimpinan itu sendiri berarti kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin (*leader*).³⁾ Kepemimpinan muncul dalam masyarakat adalah hasil dari organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika dari interaksi sosial. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Oleh karena itu ada yang membedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial.⁴⁾

Kepemimpinan sebagai kedudukan berasal dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan dalam masyarakat.

Adapun stratifikasi sosial dan kepemimpinan lokal yang akan dibahas dalam makalah ini, terbatas pada ruang lingkup daerah tertentu dan waktu, mengingat langkanya bahan-bahan untuk penelitian. Tetapi jika ingat tradisi yang turun temurun di daerah ini pada waktu sekarang, kemungkinan kita dapat membayangkan bahwa suasana masyarakat pada masa Kesultanan Palembang sebagian masih tetap tercermin pada masa sekarang. Dengan berpegang pada kerangka acuan yang telah digariskan oleh Panitia Sejarah Lokal, maka dalam membahas masalah tersebut lebih dititikberatkan pada episode-episode atau peristiwa-peristiwa tertentu yang memperlihatkan bagaimana stratifikasi sosial berfungsi atau tidak, dan bagaimana corak kepemimpinan tertentu memperlihatkan dirinya. Sudah barang tentu dalam mengambil suatu kesimpulan mengenai hal itu mengingat waktu penulisan makalah ini sangat terbatas, penulis hanya menggambarkan secara umum saja. Jika gambaran umum ini diajukan dalam forum ini dan memang harus dibuat demikian, maka tidaklah semestinya lagi berdasarkan praduga yang *meta-historis*, tetapi dari pengujian data yang *evident*.⁵⁾

II. Stratifikasi sosial :

Secara teoritis semua manusia dapat dianggap sederajat,

tetapi dalam kenyataan kehidupan di daerah ini kelompok sosial tidaklah demikian. Apa sebab?? Selama dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hasrat menghargai sesuatu dan setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi embrio yang akan menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat mungkin berupa uang, kekuasaan, tanah, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau kemungkinan juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Seperti lazimnya masyarakat tradisional di negeri kita ini, masyarakat di daerah ini terdiri dari kelompok-kelompok menurut kepercayaan, kelompok menurut pekerjaan dan kelompok menurut struktur sosial (kelahiran). Secara historis sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri, tetapi ada juga yang dengan sengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dalam memberikan uraian mengenai Stratifikasi sosial di daerah ini, penulis lebih menitikberatkan pada **sistem pemerintahan Kesultanan** di Palembang dan **sistem Marga** ⁶⁾ di daerah uluan. Daerah Sumatera Selatan yang mungkin sebagai bekas kerajaan maritim, pada dasarnya tidak begitu tajam dan menjolok perbedaan antara golongan Penguasa dengan rakyat biasa. Tetapi setelah daerah ini mendapat pengaruh dari luar (Jawa) terutama di pusat kerajaan, mulai nampak adanya perubahan-perubahan dalam struktur sosial. Masyarakat terdiri dari: Raja beserta keluarganya; Golongan bangsawan yang terdiri dari golongan Pangeran, golongan Raden dan golongan Mas Agung; Golongan Rakyat yang terdiri Kiayi Mas, Kiayi Agus dan Rakyat jelata (termasuk orang-orang Senan) dan terakhir adalah golongan Budak (budak karena tak dapat membayar hutang atau budak-belian). Kelas sosial yang kita kenal pada zaman itu dapat di - samakan dengan kelas sosial yang secara tradisional dikenal di Surakarta seperti: Santana Dalem, Abdi Dalem, dan Kawula Dalem yaitu rakyat ⁷⁾

Raja adalah sebagai kepala pemerintahan yang mengatur pemerintahan (politik) di segala bidang dan mengatur masyarakat, yang dibantu oleh keluarganya sebagai Pegawai Tinggi (Sentana Manteri) dan juga oleh golongan bangsawan rendah sebagai pegawai tingkat dua yang disebut Manteri Biasa. Golongan bangsawan yang terdiri dari Pangeran, Raden dan Mas - Agus di samping sebagai pegawai-pegawai raja (manteri biasa), ada juga di antara mereka itu yang dianugerahi Marga/ Dusun sebagai pinjaman yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.⁸⁾ Mereka berkewajiban membantu raja dalam

perang bersama anak buahnya (**mata-gawe**) serta perahu-perahu yang dipersenjatai. Di waktu damai mereka membantu balok-balok kayu atau barang-barang yang diperlukan oleh raja. Sentana manteri dan menteri biasa dapat digolongkan sebagai kelas penguasa di daerah ini.

Mereka yang memperoleh pinjaman atau hadiah marga /dusun, biasanya golongan bangsawan yang masih erat hubungannya dengan raja yang diberi gelar **Pangeran** (kata "pangeran" itu sendiri berarti yang memerintah). Pada umumnya bangsawan-bangsawan tersebut adalah paman dari ayah-ibu raja atau paman raja sendiri, tetapi ada juga orang-orang yang disayangi oleh raja karena kesetiannya, dapat juga diberi gelar **Pangeran** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Golongan bangsawan yang tidak memperoleh pinjaman atau hadiah marga/dusun, hidup dari hasil kerajinan mas-perak, kerajinan barang-barang halus (kain songket) lainnya, berdagang dan lain-lain.

Adapun golongan rakyat (**non elite**) yang jumlahnya jauh lebih besar dari golongan bangsawan (**elite**), diharuskan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan ringan dan tertentu saja, **Orang-orang Miji** yang dapat disamakan dengan mata-gawe di daerah uluan, tidak dipungut pajak tetapi diharuskan bekerja pada raja atau pangeran dan raden seperti : ikut berperang bersama alingannya (keluarga), melakukan pekerjaan tangan atau membuat karya-karya seni, dimana hubungan mereka itu tidak terikat dalam arti mereka bebas memilih tuannya yang baru apabila tidak sesuai lagi dengan tuannya yang lama. **Orang-orang Senan** yang statusnya lebih rendah dari golongan Miji, mereka hanyalah mengabdikan kepada raja. Mengenai orang-orang yang menggadaikan dirinya karena hutang-piutang atau melanggar adat kebiasaan dan golongan budak-belian, dilarang berhubungan dengan raja tetapi diperbolehkan berhubungan langsung dengan orang-orang yang meminjamkan uang atau barang atau pada orang yang membelinya.

Mengenai masyarakat tradisional di daerah uluan susunannya sangat sederhana dan hanya terdiri dari golongan penguasa tradisional dan rakyat biasa (**mata-gawe**). Penguasa-penguasa tradisional yang mula-mula terdiri dari suku-suku dikepalai oleh **Poyang-poyang**, diangkat oleh Sultan dengan gelar **Pangeran (Depati/Adipati)**⁹⁾ yang dapat disamakan dengan golongan **Elite-desa di Jawa**.¹⁰⁾ Golongan penguasa di daerah uluan berdasarkan permufakatan antara poyang-poyang setempat, ditunjuklah seorang kepala marga yang dikenal dengan nama **Pesirah** (pada zaman kesultanan disebut **Pangeran** atau **Depati**). Berdasarkan tradisi yang turun temurun, golongan Penguasa

tersebut dipilih oleh mata-gawe (rakyat) yang sudah berhak memilih, walaupun dalam praktiknya pemilihan itu masih berkisar pada status sosial dan kharismatis. Secara historis, lembaga politik tradisional di daerah uluan pada zaman dulu ditandai oleh pembuatan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Oleh karena perkembangan penduduk dari tahun ke tahun bertambah, maka penduduk dari suatu marga menyebar ke tempat lain menjadi **talang** (talang berarti tempat yang agak tinggi) dan kemudian menjadi **dusun** yang dikepalai oleh kerio. Sebelum tempat tinggal itu berkedudukan sebagai dusun, mula-mula ia berstatus umbul-umbul sebagai masa percobaan untuk dijadikan status dusun.¹¹⁾ Setelah timbul sistem Kesultanan Palembang dalam rangka mempermudah pengurusan soal adat di daerah uluan, maka daerah-daerah uluan secara keseluruhan diatur menurut hukum adat berdasarkan **Undang-Undang Simboertjahaja** yang pernah dikodifikasikan oleh Ratu Sinuhun (Sunan Candiwalang). Kepala-kepala marga dan kepala-kepala dusun yang dibantu oleh jurai-jurai tua (tua-tua kampung) merupakan kelas penguasa tradisional, yang kemudian diangkat dan disahkan oleh sultan sebagai wakil Sultan di daerah Uluan. Oleh Sultan mereka dianugerahi semacam alat regalia dan tanda kebesaran sebagai simbol kekuasaan seperti : sebuah payung perada emas, sebilah keris yang dianggap sakti, dua buah pedang, dua buah tombak yang disepuh perak, sebuah lampit ulung yang terbikin dari katun, sebuah gong dan sebuah kajang seremang dalam bentuk kain hitam yang bersulamkan emas perada. ¹²⁾

Palembang yang terletak di kedua tepi sungai Musi, di mana Sungai Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, tentulah dulu dibangun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang saksama dan strategis, di mana lalu-lintas anak Sungai Batanghari Sembilan dikuasai dengan melalui sungai-sungai hasil bumi dari daerah **hinterland** dibawa milir ke pusat kerajaan, justru Palembang selain sebagai pusat kerajaan juga sebagai kota pelabuhan yang cukup ramai dan berfungsi sebagai bandar transito.

Memang Palembang sejak semula didiami oleh golongan masyarakat yang berlapis-lapisan berdasarkan status sosial, tumbuh dan berkembang sebagai pusat-kuasa maritim, justru karena ia terletak dekat Selat Malaka yang merupakan urat nadi lalu-lintas pelayaran dan perdagangan Internasional dari abad ke abad. Sebaliknya masyarakat di daerah uluan yang cukup tenang dan hidup bercocok tanam, susunan masyarakatnya tidak banyak seluk beluk, yaitu terdiri dari penguasa dan rakyat biasa. Segala kebijaksanaan dan tindakan penguasa selalu di-rembukan lebih dulu dengan jurai-jurai tua, yang dapat diang-

gap sebagai benih-benih demokrasi. Sampai sejauh mana hubungan antara penguasa dengan rakyat pada waktu itu dapat disimpulkan dengan ungkapan tradisional : "Raja adil raja disembah, Raja lalim raja disanggah" !!¹³⁾

Setelah runtuh Kesultanan Palembang pada permulaan abad ke-19, maka mulailah kekuasaan Hindia Belanda di daerah ini tanpa mengubah susunan pemerintahan yang sudah ada. Daerah Keresidenan Palembang dibagi atas tiga afdeling yang masing-masing dikepalai oleh seorang asisten residen; tiap-tiap afdeling dibagi pula atas beberapa **onderafdeling** yang membawahi suatu distrik dikepalai oleh seorang **controleur** dan kemudian distrik membawahi onderdistrik dikepalai oleh seorang demang&asisten demang. Daerah-daerah tersebut sampai tahun 1903 secara langsung dikuasai dengan susunan kepegawaian yang bersifat sentralistis.¹⁴⁾ Dengan kata lain di daerah ini mulai diciptakan apa yang disebut penguasa formal dan penguasa formal tradisional.¹⁵⁾ Tidak hanya dalam struktur pemerintahan saja tetapi juga dalam susunan masyarakat di pusat kesultanan dan daerah-daerah uluan, pun tidak banyak mengalami perubahan, bahkan stratifikasi sosial yang sudah ada dipupuk sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda dalam rangka mengukuhkan kekuasaan di daerah ini, yang akan bertindak sebagai agen-penguasa kolonial dengan memiliki legitimitas berdasarkan dominasi legal penjajah. Akibatnya penguasa-penguasa tradisional semakin lama semakin jauh dari rakyat (rakyat dibebani bermacam-macam pajak dan kerja rodi / gawe - raja), sehingga pada masa kebangkitan nasional di daerah ini timbul bermacam-macam kasus yang melahirkan berbagai bentuk perlawanan untuk menentang/memprotes segala macam penindasan. Seperti pembunuhan terhadap seorang controleur di Jambi dalam tahun 1904 dan kasus Tulung Selapan (daerah OKI) yang membangkang tidak mau bayar pajak menyebabkan asisten demangnya mati terbunuh,¹⁶⁾ merupakan peristiwa tragis yang tidak dapat dilupakan oleh penguasa-penguasa daerah tersebut sampai kini.

Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda, nampaknya telah memperkuat lapisan masyarakat di daerah ini. yaitu golongan penguasa tradisional dengan keluarganya mendapatkan fasilitas pendidikan dan pengajaran secara longgar, tetapi sebaliknya golongan rakyat hanya disediakan Sekolah Angka Tiga secara minim. Rupa-rupanya kondisi seperti ini mulai mengalami perubahan setelah bangsa Jepang menguasai daerah ini sejak tahun 1942 (14 Pebruari 1942), karena sistem persekolahan dirombak sedemikian rupa sehingga sistem penggolongan baik menurut golongan etnis maupun status sosial dihapuskan sama

sekali.¹⁷⁾ Dengan demikian terjadilah pengintegrasian terhadap macam-macam sekolah yang dapat diikuti oleh setiap orang tanpa memandang status sosial. Dalam hal ini tampak adanya demokratisering dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang membawa akibat mulai goyahnya nilai-nilai tertentu dan terjadilah **social mobility** dalam struktur sosial (**Social structure**).¹⁸⁾ Seperti telah kita ketahui mengenai bentuk **social structure** itu ada dua macam: gerak sosial yang horizontal dan gerak sosial yang vertikal. Yang dimaksud dengan gerak sosial horizontal adalah suatu peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat. Sedangkan gerak sosial vertikal adalah perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan sosial kedudukan lainnya yang tidak sederajat.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan-perubahan yang bersifat mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan dengan dasar cita-cita dari suatu bangsa dan negara yang merdeka. Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar 1945 Bab. XIII pasal 31 ayat 1, bahwa tiap-tiap warganegara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Demikian pula dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950 Bab. XI pasal 17 mengatakan, bahwa tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu. Berdasarkan isi kedua undang-undang di atas, maka pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak, baik untuk pendidikan rendah, menengah maupun pendidikan tinggi. Nampak betul peranan lembaga pendidikan di daerah ini yang dapat diikuti oleh setiap orang tanpa memandang status sosial telah menimbulkan mobilitas sosial yang bersifat vertikal. Hal ini tidak berarti lembaga pendidikan merupakan satu-satunya saluran dalam proses gerak sosial yang vertikal, karena masih banyak lagi saluran-saluran lain yang ikut menentukan gerak sosial itu seperti: angkatan bersenjata, organisasi-organisasi politik, ekonomi, keahlian dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Meskipun banyak saluran yang dapat menimbulkan gerak sosial vertikal, namun menurut pengamatan kami akhir-akhir ini, faktor pendidikan seseorang sangatlah menentukan. Oleh karena itu stratifikasi sosial yang dulu berdasarkan kelahiran, nampaknya semakin lama semakin menciut artinya dalam proses perkembangan masyarakat yang sedang membangun sekarang ini, namun dilain pihak stratifikasi sosial yang baru dan condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pendidikan sekolah,

atau atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian belum lagi mendapat wujud yang mantap.

III. Pola Kepemimpinan Lokal :

Dalam mempelajari kepemimpinan lokal di daerah ini, kami akan memusatkan perhatian pada suatu konsepsi kepemimpinan yang berhubungan dengan struktur sosial pada umumnya dan struktur penguasaan pada khususnya. Sebagai suatu daerah yang banyak memiliki rawa-rawa dan anak Sungai Batanghari Sembilan,¹⁹⁾ telah mendorong cara hidup mereka untuk menyesuaikan diri kepada alam sekitarnya seperti : berburu, menangkap ikan, bercocok tanam, berlayar/berdagang dan merampok. Sifat maritim yang telah menjadi ciri khas mereka dari zaman-zaman telah berkembang sedemikian rupa, bahkan Agama Budha dan Islam yang datang dan berkembang di sini telah melatarbelakangi pandangan hidup masyarakat, khusus yang menyangkut hubungan mereka dengan penguasa. Berbeda halnya dengan masyarakat agraris yang memusatkan perhatian kepada raja-dewa-kultus dan dewa-raja-kultus adalah suatu gejala umum yang terdapat dalam sejarah Indonesia sepanjang masa, terutama sekali di daerah agraris dan agraris maritim.²⁰⁾

Masalah kepemimpinan dalam masyarakat tradisional, nampaknya lebih banyak seluk beluknya dari pada kepemimpinan dalam masyarakat modern. kepemimpinan dalam masyarakat tradisional berakar pada struktur sosial yang terwujud berdasarkan kelahiran, kekayaan dan status.²¹⁾ Suatu nilai yang banyak memberikan pengaruh pada sikap hidup masyarakat tradisional di daerah ini, adalah harta-benda atau hak-milik pada umumnya. Oleh karena itu pandangan hidup perorangan atau kelompok masyarakat terhadap penguasa setempat dalam hal ini raja atau golongan bangsawan, ditentukan oleh latar belakang sosial-ekonomi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat baik pada zaman sebelum dan sesudah Islam. Hal ini masih dapat kita lihat di dusun-dusun terpencil, di mana harta-benda yang banyak dimiliki oleh seseorang telah mempermudah dalam menjalankan kehendak dan keinginannya di antara kawan-kawan atau antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa harta-benda itu dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang, justru karena ia dapat memberikan jaminan hidup yang lebih dari orang-orang lain, sehingga ia mempunyai peluang untuk mengarahkan perhatian yang lebih banyak kepada soal-soal yang menyangkut kehidupan bersama. Atas dasar hak-milik (kekayaan) sebagai kriteria yang dikaitkan dengan keturunan (genealogis), maka kedudukan nisbi seseorang atau golongan terhadap yang lain itu disebut status. Kriteria untuk menetapkan status seseorang penguasa atau bukan penguasa di daerah ini, bukanlah semata-mata terle-

tak pada harta-benda dan kelahiran saja. Ini hanyalah beberapa kemungkinan kriteria yang lain. Jadi kedudukan seseorang penguasa itu tidak hanya didasarkan pada satu atau dua kriteria saja, tetapi banyak lagi aspek-aspek lain yang menyangkut manusia itu sendiri yang memiliki wewenang.

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada dalam satu tangan. Yang dimaksudkan dengan **wewenang** adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.²²⁾ Seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai pemimpin atau orang yang memimpin orang banyak. Wewenang yang kita kenal dalam sejarah Indonesia adalah wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal). Di daerah Sumatera Selatan sendiri telah banyak mengenal kepemimpinan yang berdasarkan kharisma, yaitu semenjak adanya Poyang-poyang, kepala-kepala Marga dan Sultan di Palembang. Ketika agama Islam menjadi agama resmi dalam sistem Kesultanan Palembang (Sultan Abdurrachman), maka unsur Agama Islam dikaitkan dengan wewenang penguasa atau sekurang-kurangnya tokoh agama menjadi tangan kanan penguasa setempat atau sultan. Tradisi yang seperti itu banyak contoh-contoh dari kaum ulama di daerah ini yang mempunyai kekuasaan kharismatis, dan salah seorang tokoh yang telah banyak menanamkan wewenang berdasarkan ajaran Islam pada zaman Kesultanan Palembang adalah Syeh Abd. Al Samad Al Palimbani.²³⁾

Hampir setiap daerah di uluan mengenal orang keramat dan dianggap sebagai penyebar Agama Islam, seperti yang pernah dilakukan oleh para wali di pulau Jawa. Poyang-poyang yang dianggap cakal-bakal masing-masing tempat di daerah uluan, merupakan tokoh sakral yang serba tahu mengenai Agama. Sampai sejauh mana kaum ulama atau kiyai yang memiliki wewenang dalam struktur pemerintahan tradisional, justru golongan ini sangat terpendang dalam masyarakat pedesaan yang memiliki pengetahuan agama dan moralitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu peranannya tidak dapat diragukan, bahkan ada kemungkinan golongan tersebut menjadi tangan kanan sultan dalam mengambil setiap kebijaksanaan. Betapa terhormat kedudukannya disisi sultan, bahkan kuburannya selalu ditempatkan pada tempat kiri-kanan di mana sultan dan permaisuri dikebumikan seperti pesarean raja-raja Palembang di Lemahbang dan pesarean di Sabahkingking 2 Ilir Palembang.

Mengenai wewenang tradisional, pada dasarnya dapat dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan kelahiran atau yang diwariskan oleh penguasa yang menduduki

jabatan tertentu. Wewenang seperti itu oleh Prof Dr. Sartono Kartodirdjo disebut "charisma routine".²⁴⁾ Sebagai contoh **charisma routine** adalah keturunan Ki Gdeng Sura yang telah menurunkan keturunan kesultanan di daerah ini atau poyang-poyang di daerah uluan yang menurunkan kepala-kepala marga atau kepala-kepala dusun. Ketika pemerintah Belanda berkuasa di daerah ini, golongan tersebut diperalat sedemikian rupa untuk menguasai daerah-daerah uluan. Tetapi setelah timbul masa kebangkitan di daerah ini pada awal abad ke-20, penguasa-penguasa formal tradisional mulai dicurigai oleh rakyat. Bahkan pada permulaan zaman Proklamasi, suatu masa perebutan senjata dari tangan Jepang dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, golongan tersebut banyak meninggalkan tempat asalnya untuk mendapatkan keselamatan. Nampak dengan jelas wewenang tradisional telah berkurang, karena pemegang wewenang itu sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Sementara wewenang tradisional mulai berkurang pengaruhnya, maka muncullah wewenang rasional atau legal dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan difrensiasi dalam sistem pendidikan baru. Proses modernisasi dengan akulturasi dan sekularisasinya dari tahun ke tahun apakah faham-faham baru itu melalui jalur sekolah-sekolah swasta yang dilakukan oleh golongan nasionalis atau agama atau organisasi-organisasi sosial lainnya, nampaknya telah menimbulkan konflik-konflik yang menggoncangkan stabilitas penguasa formal tradisional di daerah uluan.

Sementara muncul golongan intelektual yang memperoleh pengetahuan baru dan mengenal faham-faham baru yang barasal dari Barat, golongan ulama/kiyai yang selama ini tidak termasuk dalam struktur pemerintahan formal tradisional mulai muncul. Mereka terdiri dari kaum ulama/kiyai atau guru mengaji yang memiliki identitas yang sama dengan petani di daerah Uluan. Kedudukannya sangat terpandang dalam masyarakat pedesaan, karena memiliki pengetahuan agama dan moralitas yang cukup tinggi, dan sekaligus sebagai sumber fatwah. Otoritas seorang kiyai/ulama sangat menentukan, karena mereka lebih banyak memiliki alat komunikasi dengan rakyat seperti : melalui khotbah-khotbah, pengajian-pengajian, lembaga pesantren/madrasah, tarikat dan lain-lain. Tidak mengherankan apabila pada zaman Revolusi Fisik muncul kepala-kepala lasyakar yang ikut memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah ini misalnya : Lasyakar Mujahidin , Lasyakar Hazbullah, Lasyakar Sabilillah, Lasyakar Muslimat Sabil dan sebagainya.²⁵⁾ Secara historis peranannya dalam masyarakat tak dapat diragukan, dan oleh sebab itu pada zaman kesultanan dan kolonial Belanda adanya penggabungan kekuasaan politik

dan agama dalam struktur pemerintahan. Karena statusnya sebagai golongan agama yang telah berakar selama berabad-abad dalam masyarakat tradisional di daerah ini masyarakat yang sebagian besar memeluk Agama Islam apakah mereka termasuk kaum tua dan kaum muda²⁶), maka kepemimpinan yang berdasarkan agama di daerah ini sampai saat ini masih perlu diperhitungkan. Itulah sebabnya golongan tersebut yang lazim disebut pemimpin informal (**informal leader**)²⁷) masih besar pengaruhnya pada daerah-daerah tertentu, dan jangan diharapkan golongan lain untuk menang dalam pesta demokrasi.

IV. Kesimpulan.

Apa yang telah disinggung di atas, baik mengenai stratifikasi sosial maupun kepemimpinan lokal di daerah ini, nampaknya peranan pendidikan sangat menolong dalam proses pendemokrasian masyarakat, dalam arti percampurbauran anak-anak yang mendapatkan pendidikan menengah sampai ke perguruan tinggi/akademi, yang berasal dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Hampir sebagian besar posisi penting dalam birokrasi pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang berasal dari daerah hulu/dusun. Apakah ia berasal dari anak petani, anak pedagang, anak pensiunan, anak guru sekolah, anak guru ngaji dan sebagainya, secara keseluruhan menjurus pada suatu kelompok cendekiawan baru yang pernah melalui proses sistem pendidikan formal yang relatif sama. Munculnya kelompok ini sebagai pemimpin yang mencakup elite birokrasi dan kaum inteligensia di samping masih adanya pemuka masyarakat yang bersumber pada agama (**informal leader**), merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan, dalam hal ini sebagai hasil konkrit dari perkembangan pendidikan pada khususnya. Dengan kata lain golongan bangsawan semakin hilang identitasnya dan kaum elite agama semakin terdesak oleh pengaruh birokrasi dan pendidikan modern. Dari sudut pandangan ini nampaknya masyarakat di daerah hulu sekarang ini sedang mengalami transisi, di mana unsur tradisional belum dilepaskan dan unsur baru yang relatif lebih rasional mulai dianut. Yang menjadi masalah sekarang ini, sampai sejauh mana hubungan antara golongan cendekiawan baru dengan pemuka-pemuka masyarakat setempat (**informal leader**) yang berusaha mempertahankan diri dan berorientasi ke masa lampau, dalam menyampaikan pesan-pesan pembaharuan kepada masyarakat pedesaan.

CATATAN

- 1) Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility*, The Free Press, Collier-Mac Millan Limited, London, 1959, halaman 11
- 2) Surjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1978, halaman 134.
- 3) Ibid, halaman 178-179.
- 4) Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbit Dian Rakyat, 1967, halaman 181
- 5) Taufik Abdullah, *Beberapa Aspek Sejarah Lokal*, Seminar Sejarah Nasional III Proyek IDSN Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981, halaman 9 (Makalah)
- 6) Kumpulan Kertas-kerja dalam rangka diskusi tentang sistem Pemerintahan Marga yang diselenggarakan oleh UNSRI, 1979, Bandingkan dengan Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan Kem P.P. dan K, *Undang-undang SIMBUR TJAHAJA*, Djawatan Kebudayaan Kem P. P. dan K, Djakarta, halaman 1-5. Mengenai sistem Marga oleh pemerintah Belanda diatur oleh IGOB Stadblaaf 1919 Nomor. 814 dan kemudian disempurnakan dalam tahun 1922.
- 7) Gaetano Mosca, *The Ruling Class*, New York - Mc. Graw-Hill, 1939, halaman 50
- 8) P.DeRoo:De La Fille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Bhratara, Jakarta, 1971, halaman 22
- 9) SOELOEH MARGA untuk Keresidenan Palembang No. 9 bulan Maret 1932. tahun ke-II, *Monoghrapi Marga Kayu Agung*, Magakassen Palembang, halaman 128-135.
- 10) Soeyatno, *Feodalisme dan Revolusi di SURakarta 1945-1950*, dalam PRISMA no. 7 Agustus 1978, th. ke-VII, LP3ES, Jakarta, halaman 50, Bandingkan dengan R. Soepomo, *De Reorganisatie van het Agrarische Stelsel in het Gewest Surakarta*, The Hague: L. Gerretsen, 1927, halaman 20
- 11) SOELOEH MARGA untuk Keresidenan Palembang, No. 11 Bulan Mei 1952, halaman 159-170.
- 12) SOELOEH MARGA untuk Keresidenan Palembang, no. 9, op cit hal. 130.
- 13) Proy. Pen. dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Dep. Pends. dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977/1978, halaman 64
- 14) Drs. G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Republik Indonesia*, Timun Mas NV. Makassar, 1955, halaman 52-53.
- 15) Istilah penguasa Formal dan Formal Tradisional kami pinjam dari Alfian dalam bukunya *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, LP3ES Jakarta, 1977, halaman 78-86. Yang kami maksudkan penguasa Formal adalah penguasa-penguasa yang berasal dari orang Belanda seperti Residen, Asisten Residen, Controleur dan Kepala Kepolisian setempat Sedang

kan penguasa Formal Tradisional terdiri dari penguasa yang berasal dari bumi-putera seperti: Demang/Asisten Demang dengan Manteri Polisi/Pajak Kepala Marga (Depati/Pangeran), Pembarap serta Kepala Dusun (kerio) dengan seperangkatnya (Penggawa dan lembaga-lembaga tradisional lainnya (Dewan Marga dan Anggota-anggota Dewan).

16) Soeloeh Marga untuk Keresidenan Palembang, No. 18 th. ke-II, 15 Desember 1932, halaman 269-270.

17) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan & Kebudayaan, **Pendidikan di Indonesia 1900-1974**, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, halaman 41

18) Surjono Soekanto, **Op cit**, halaman 149

19) Yang dimaksud Batanghari Sembilan adalah anak sungai Musi: s. Komering, s. Ogan, s. Lematang, s. Batanghari Leka, s. Rawas, s. Rupit, s. Keling, s. Beliti dan s. Lakitan.

20) Sartono Kartodirdjo et al, **Sejarah Nasional Indonesia II**, Balai Pustaka, Jakarta, 1917, halaman 275-276; Bandingkan dengan R. Von Heine Geldern, **Conception of State and Kingship in Southeast Asia**, The Far Eastern Quarterly II, 1942, halaman 15-30.

21) Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, **Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia**, Dalam Bulletin Yaperna No. I. th. I Juni 1974, Jakarta, hal. 8-16.

22) Surjono Soekanto, **Op cit**, halaman 172-173.

23) G.W.J. Drewes, **Further Data Concerning Abd. Al Samad Al Palimbani**, dalam BKI (bijdragen) jilid 123, no. 283, 1976, halaman 267-228, Bandingkan dengan Muhammad Uthman El-Muhammady, **The Islamic Concept of Education According to Shaykh Abdul's Samad of Palembang and Its Significance in Relation to the Issue of Personality integration**, dalam AKADEMIKA, 1972.

24) Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, **op cit**, halaman 9

25) Proyek IDKD, **Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Sumatera Selatan**, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980, halaman 60-61.

26) Deliar Noer, **Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942**, LP3ES, Jakarta.

27) Alfian, **op cit**, halaman 98-99

DAFTAR BACAAN

- Alfian, **Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh**, LP3ES, Jakarta, 1977
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, **Pendidikan di Indonesia 1900–1974**, Balai Pustaka, Jakarta, 1975
- Deliar Noer, **Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942**, LP3ES, PT. Djaya Pirusa, Jakarta, 1980.
- Drewes, G.W.J. **Further Data Concerning Abd. Al Samad Al Palimbani**, BKI (Bijdragen) Jilid 123, no. 283, 1976.
- Gaetano Mosca, **The Ruling Class**, New York—Mc. Graw—Hill, 1939.
- Heine Geldern, R. Von., **Conception of State and Kingship in Southeast Asia**, The Far Eastern Quarterly II, 1942.
- Koentjaraningrat, Prof Dr., **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1967.
- Muhammad Uthman El—Muhammady, **The Islamic Concept of Education According to Shaykh Abdul's Samad of Palembang and its Significance in Relation to The Issue of Personality Integration**, dalam **AKADEMIKA**, 1972.
- P.De Roo De La Fille, **Dari zaman Kesultanan Palembang**, Bhratara, Jakarta, 1971.
- Pitrim A. Sorokin, **Social and Cultural Mobility**, The Free Press, Collier Mac Millan Limited, London, 1959.
- Proyek Penulisan dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, **Sejarah Daerah Sumatera Selatan**, Dep. P & K Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977/1978.
- **Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945–1949 Daerah Sumatera Selatan**, Dep. P & K Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1979/1980.
- Sartono Kartodirdjo, Prof Dr., **Sejarah Nasional II**, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- **Soeloeh Marga untuk Keresidenan Palembang**, No. 9, No. 11, No. 18, Margakassen, Palembang, 1932.
- Supomo, R., **De Reorganisatie van het Agrarische Stelsel in het Gewest Surakarta**, The Hague : L. Gerretsen, 1927.
- Surjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Yayasan Pen. Universitas Indonesia, Jakarta, 1978.
- Sujatno, **Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945–1950**, dalam **PRIS—MA No. 7**, LP3ES, Jakarta, 1978.
- Taufik Abdullah, **Beberapa Aspek Sejarah Lokal**, Seminar Sejarah Nasional III, Proy IDSN Direktorat Sej. dan Nilai Tradisional, Dep. P & K Jakarta, 1981 (Makalah).

UNDANG-UNDANG SIMBOER TJAHAJA, Djawatan Kebudayaan Kem.
P.P. dan K, Jakarta

Wolhoff, Drs. G.J., **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia**, Timun Mas, Makassar, 1955.

Sartono Kartodirdjo, **Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia**, dalam
yaperna No. 1, th. I, Jakarta, 1974.

----- **Elite Dalam Perspektif Sejarah**, LP3ES, Jakarta, 1981.

PENDIDIKAN BARAT DAN MODERNISASI PENDIDIKAN AGAMA DI ACEH

Oleh :
Rusdi Sufi

I

Pada tanggal 17 Desember 1916 di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) sekelompok pemuda telah mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama **Vereeniging Atjeh** (Serikat Aceh). Adapun personalia pengurusnya adalah sebagai berikut : Teuku Cik Mohammad Thayeb selaku Ketua; Teuku Teungoh, Wakil Ketua, Nyak Cut, Sekretaris I; Abu Bakar, Sekretaris II; Teuku Usen dan Teuku Cik Muhammad sebagai Bendahara; Teuku Johan Alamsyah dan Teuku Asan I sebagai Komisaris. Sedangkan anggotanya adalah terbuka bagi setiap rakyat Aceh baik laki-laki maupun perempuan yang sudah cukup umur (akil-balig) dan mau masuk menjadi anggota dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan organisasi.

Maksud didirikannya organisasi tersebut seperti dicantumkan dalam statutenya adalah : a. untuk memajukan dan memperbaiki sistem pengajaran/pendidikan di Aceh; b. untuk merubah adat-adat yang menghalangi dan mengekang kemajuan serta memperbaiki sopan-santun yang sedang berlaku dalam masyarakat Aceh pada waktu itu¹. Dijelaskan lebih lanjut dalam statuta itu bahwa cara organisasi ini memajukan pendidikan adalah dengan memberi bantuan kepada anak-anak anggota dan anak-anak saudara kandung yang menjadi anggota perserikatan, serta kepada anak-anak Aceh yang bukan anggota perserikatan tetapi telah menamatkan dan mendapat keterangan sebagai anak cerdas dari **Europeesche School** dan **Hollandsch Inlandsche School** yang bermaksud meneruskan pelajarannya ke negeri lain atau ke luar Aceh.² Selain itu juga bila murid-murid dari kedua sekolah itu kematian orang tuanya yang laki-laki, maka perserikatan juga akan mengusahakan bantuan supaya murid-murid itu dapat melanjutkan sekolahnya. Terhadap murid-murid yang telah menamatkan pelajarannya dari **Gouvernements Inl. School** dan **Volkschool**, bila dianggap perlu oleh organisasi ini juga akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Dan bila dirasa perlu pengurus organisasi juga akan membantu murid-murid dari **Normaalcursus**, **Ambachtschool** dan **Landbouwschool** dengan biaya sekedarnya.³

Sehubungan dengan maksud merubah adat-adat yang dianggap sebagai penghalang dan pengekan kemajuan, disebutkan bahwa adat yang menandatangani keberatan hendaklah diusahakan mencari jalan ke perubahan yang baik Misalnya dijaga atau

diusahakan supaya anak laki-laki atau perempuan jangan kawin atau dikawinkan di bawah umur 16 tahun (sebelum akil-balig). Juga pesta-pesta yang memboroskan yang berhubungan dengan pesta perkawinan supaya dihindari/ditinggalkan. Dalam hal upacara kematian diusahakan jangan lagi diadakan kenduri-kenduri sebelum yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Sedang hal **poemoe ba'e** (upacara penangisan jenazah sebelum dikuburkan) harus dihapuskan sama sekali.⁴ Yang berkaitan dengan perbaikan sopan-santun, organisasi ini mengusulkan agar didirikan suatu perkumpulan wanita yang tujuannya untuk mengubah segala hal ikhwal dalam rumah tangga terutama yang menyangkut dengan kebersihan, kesopanan dan kesehatan. Untuk ini kalau dirasa perlu perkumpulan wanita yang dibentuk itu boleh menggunakan tenaga seorang wanita Eropa untuk memimpinya.⁵ Berkait dengan hal ini, rupa-rupanya organisasi ini telah terpengaruh dengan bantuan-bantuan yang diberikan sebelumnya (sebelum **Vereeniging Atjeh** terbentuk) oleh beberapa orang isteri pejabat tinggi Belanda di Aceh. Yaitu keikutsertaan Nyonya Swart (isteri Gubernur Swart yang menjadi gubernur di Aceh sejak 1908 – 1918), Nyonya Nijs (isteri Asisten Residen Nijs) dan Nyonya Doornik (isteri Asisten Residen Doornik) memberikan jasa-jasa mereka terutama dalam mendidik ketrampilan beberapa wanita Aceh, seperti jahit-menjahit, merenda, sulam-menyulam, adat-istiadat/sopan-santun dan lain-lain hal yang berhubungan dengan kewanitaannya.⁶

Berdirinya **Vereeniging Atjeh** berkait erat dengan telah diperkenalkannya sistem pendidikan Barat oleh Belanda di Aceh sejak awal abad XX. Dan organisasi ini merupakan organisasi pertama yang lahir di Aceh akibat diperkenalkannya sistem pendidikan itu kepada masyarakat Aceh. Karena semua pemuda yang memprakarsai dan yang menjadi pengurus organisasi itu adalah mereka yang telah pernah mengenyam pendidikan Barat. Kecuali Teuku Cik Mohammad Thayeb (yang menjadi ketua organisasi) adalah lulusan OSVIA Bandung yang lainnya adalah alumnus Sekolah Guru di Bukit Tinggi⁸. Mereka merupakan pelopor pembaharuan dan sebagai suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh pada waktu itu. Dari merekalah di antaranya timbul nilai-nilai baru seperti yang menyangkut pandangan mereka tentang pendidikan, pikiran untuk mengubah adat-istiadat atau nilai-nilai lama yang mereka anggap tidak sesuai lagi dengan situasi pada zamannya dan keinginan mereka untuk menghimpun diri dalam suatu organisasi sosial/politik dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakatnya seperti yang telah mereka tuangkan dalam statuta organisasi yang mereka dirikan itu.

Sebagai reaksi terhadap nilai lama dapat pula kita ikuti dari apa yang telah diucapkan oleh Teuku Teungoh (yang menjadi Wakil Ketua **Vereeniging Atjeh**) ketika dia mengunjungi Sekolah Guru di Bukit Tinggi, sebagai berikut :

Saya menyesal sekali sebab ayah saya tidak mengirimi-
kan saya ke mari agak lebih awal, tetapi yang terlebih salah
yaitu perempuan bangsa Aceh. Ibu-ibu itu tiada suka ber-
cerai dengan anaknya buat pergi ke lain negeri oleh sebab
itu kami orang tinggal bodoh.⁹.

Dengan melihat tujuan dari **Vereeniging Atjeh** seperti ter-
sebut di atas, maka dapat disebutkan bahwa organisasi itu
merupakan alat dari kelompok pemuda yang mendukung pen-
didikan Barat dalam mencapai tujuan mereka yaitu mengingin-
kan adanya kemajuan-kemajuan dan perubahan-perubahan
dalam masyarakat Aceh menurut versi mereka. Selain itu lahir-
nya **Vereeniging Atjeh** juga dapat dilihat dalam hubungan
dengan adanya visi di antara mereka (kelompok) yang men-
dukung sistem pendidikan Barat di Aceh. Untuk itu mereka harus
memajukan dan mendukung pula visi dari kelompoknya. Dan
dalam rangka memajukan visi itu serta untuk memperkuat
tempat bergabung dan sebagai sarana untuk memajukan visi-
visi mereka.

II

Jika menelusuri latar belakang mengapa Belanda memper-
kenalkan sistem pendidikan Barat kepada rakyat Aceh, maka
akan terlihat bahwa ada dua faktor utama yang telah mendo-
rong mereka untuk memasukkan sistem pendidikan itu ke
daerah Aceh. Pertama, dapat dilihat dalam hubungan dengan
perubahan sistem politik kolonial Belanda pada pertukaran abad
XX, yaitu sejalan dengan visi politik etis yang mereka jalankan,
yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan
pegawai-pegawai administratif yang trampil menurut ukuran
mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan penduduk
pribumi itu diusahakan agar dapat dijadikan sebagai aparat-
aparat yang efektif dalam melancarkan sistem birokrasi dan sis-
tem ekonomi mereka. Maka sehubungan dengan kepentingan ini
pemerintah kolonial Belanda menginginkan adanya pengem-
bangan sistem pendidikan mereka kepada kalangan penduduk
bumiputera. Kedua munculnya suatu kelompok baru dalam ka-
langan pemerintah kolonial Belanda yang dipelopori baru oleh se-
orang orientalis terkemuka yaitu C. Snouck Hurgronje yang ter-
kenal dengan konsepsinya politik asosiasi. Kelompok ini ber-
anggapan bahwa perlawanan-perlawanan bersenjata dari bangsa
Indonesia (salah satu di antaranya adalah perlawanan yang di-

berikan oleh rakyat Aceh) dalam menentang pemerintah kolonial Belanda, terutama adalah digerakkan oleh sistem nilai dalam agama Islam. Dan perlawanan-perlawanan ini hanya mungkin dapat diselesaikan atau dikurangi, kalau golongan bangsawan atau pemuka-pemuka adat dari daerah setempat (dalam hal ini di Aceh adalah golongan Uleebalang) dapat ditarik ke dalam lingkungan kebudayaan dan sistem nilai mereka (sistem nilai Barat)¹⁰. Untuk ini kelompok tersebut menyerahkan kepada pemerintah Belanda agar menciptakan suatu golongan elite baru yang dibina dan dididik dengan kebudayaan dan sistem nilai Barat. Dengan sistem ini diharapkan mereka yang telah dibina dan dididik itu tidak lagi mengikuti seruan para pemimpin Agama Islam (para ulama) untuk tetap menentang Belanda, sehingga dengan sendirinya pengaruh dari sistem nilai dalam Islam sebagaimana dikumandangkan lewat para ulama seperti yang terjadi di Aceh dapat dikurangi.¹¹

Seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan golongan bangsawan setempat sebagai perantara antara mereka dengan rakyat, yang dalam hal ini di Aceh melalui golongan Uleebalang. Maka oleh karenanya golongan yang pertama kali diperkenalkan sistem pendidikan Barat di Aceh adalah golongan Uleebalang yang merupakan golongan bangsawan Aceh. Dan mereka inilah yang dikehendaki oleh kelompok C. Snouck Hurgronje supaya dipisahkan atau dijauhkan dari para pemimpin agama.

Sehubungan dengan maksud di atas, maka sejak tahun 1900 mulailah diperkenalkan sistem pendidikan Barat kepada mereka. Pada tahun itu beberapa putera Uleebalang Aceh telah diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja.¹² Selanjutnya sejak tahun 1901 dan tahun-tahun berikutnya hingga tahun dua puluhan, terdapat sejumlah putera-putera Uleebalang yang disekolahkan pada sekolah-sekolah Belanda, baik yang ada di Aceh maupun yang di luar Aceh.¹³

Tetapi berbeda dengan maksud dan harapan pemerintah kolonial Belanda, karena tidak semua dari mereka yang telah dididik dengan sistem pendidikan Barat ini, berhasil dirangkul oleh mereka. Karena ada di antara putera-putera Uleebalang yang telah memperoleh pendidikan ini, mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat dan malah ada yang menjadi tokoh-tokoh yang mempelopori munculnya kesadaran nasional di daerah Aceh, dan bahkan juga terdapat di antara mereka yang tetap bekerja sama dengan para pemimpin agama. Dapat disebutkan misalnya kelompok yang menentang dirubahnya bahasa

pengantar pada sekolah-sekolah rakyat (**Volkschool**) dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh pada tahun 1931,¹⁴ dua tokoh Uleebalang ternama yang pernah menjadi anggota **Volksraad** yang mewakili daerah Aceh.¹⁵

Hampir bersamaan waktunya dengan diperkenalkan sistem pendidikan kepada anak-anak Uleebalang, pemerintah Belanda juga memikirkan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya yang berasal bukan dari kelompok Uleebalang atau dari kalangan rakyat biasa. Hal ini dimaksudkan selain untuk mendapat pegawai rendahan (sesuai dengan salah satu tujuan politik etis) juga untuk mengurangi pengaruh dari pemimpin-pemimpin agama atau para ulama dalam mengurangi kefanatikan rakyat Aceh terhadap permusuhannya dengan Belanda (sesuai dengan maksud dari konsepsi C. Snouck Hurgronje). Maka untuk maksud ini pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah, baik jenis sekolah rendah atau sekolah rakyat seperti halnya dengan sekolah desa di Pulau Jawa, maupun sekolah menengah dan beberapa jenis sekolah kejuruan.

Di antara lembaga pendidikan dasar yang terdapat di Aceh hingga masa akhir pendudukan Belanda yaitu **Volkschool**, **Vervolgschool**, **Meisjeschool**, **De 2de klasseschool**, **Inlandsche School**, **Europeesche Lagere School (ELS)**, **Hollandsch Inlandsche School (HIS)**, **Hollandsch Chinesche School** (terutama diperuntukkan buat anak-anak orang Cina) dan **Hollandsch Ambonsche School** (terutama buat anak-anak orang Ambon yang berdinastikan pada militer Belanda di Aceh). Sedangkan pendidikan menengah satu-satunya yang terdapat di Aceh adalah yang disebut **Meer Uitgebreid Lager Onderwijs** disingkat **MULO**. Dan di antara sekolah-sekolah kejuruan yaitu **Ambachtschool**, **Weefschool** dan **Landbouwschool**.

Dengan meluasnya sistem pendidikan Barat di Aceh, maka dalam perkembangan (pada tahun-tahun tiga puluhan) terdapat banyak pemuda Aceh yang telah lulus dari sekolah-sekolah itu. Dan di antara mereka ada yang menjadi pegawai pemerintah, mendapat pekerjaan pada kantor-kantor kenegerian (**landschap**), dan lain-lain. Mereka yang lulus sekolah yang berbahasa Belanda, yang sebagian besar berasal dari keluarga Uleebalang, mendapat kedudukan yang lebih baik dari pada lulusan sekolah-sekolah yang berbahasa Melayu. Pekerjaan-pekerjaan pada lembaga-lembaga negara seperti di perguruan, di kepolisian, di perusahaan kereta api negara, dan lain-lain; mulai terbuka buat pemuda-pemuda Aceh. Maka akibatnya timbullah diferensiasi sosial, mobilitas sosial, dan stratifikasi sosial baru dalam masyarakat Aceh.

III

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa golongan yang pertama kali diperkenalkan sistem pendidikan Barat di Aceh adalah golongan Uleebalang yang merupakan golongan bangsawan Aceh. Umumnya anak-anak merekalah yang diberi prioritas atau kesempatan pertama dalam jenis pendidikan itu, terutama untuk memasuki sekolah-sekolah yang lebih tinggi.¹⁶ Bagi anak-anak rakyat biasa yang meskipun orang tua mereka mampu untuk membiayai menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah dimaksud, tetapi tidak diperkenankan oleh pemerintah Belanda. Jadi ada diskriminasi dalam penerimaan murid-murid untuk sekolah-sekolah tersebut.

Oleh karena adanya ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Belanda ini telah mendorong kelompok lain dalam masyarakat Aceh untuk membuka sekolah-sekolah sendiri ataupun berusaha memodernisir sistem pendidikan yang telah ada yang mereka miliki.

Sehubungan dengan hal di atas, juga dapat dilihat bahwa dengan dimasukkannya sistem pendidikan Barat ke Aceh, telah melahirkan pula pendukung-pendukung utama dari sistem tersebut. Dan pendukung-pendukung ini dalam perkembangannya telah menjadi suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Kehadiran kelompok ini dengan sendirinya telah mengundang kecemasan dan kecurigaan kelompok-kelompok lain yang sudah ada (yang sudah *established* lebih-lebih jika kelompok baru atau si pendatang itu menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu yang diperkirakan akan dapat mendesak posisi yang dipunyai oleh kelompok-kelompok lain. Maka oleh karenanya kehadiran kelompok baru tersebut dianggap sebagai suatu ancaman dan merupakan tantangan bagi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat Aceh, khususnya kelompok yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional. Dan untuk mengimbangi kelompok baru itu, kelompok yang tersebut terakhir berusaha untuk meningkatkan diri, terutama dengan memodernisir lembaga-lembaga pendidikan yang mereka miliki.¹⁷

Faktor lain yang erat kaitannya dengan munculnya jenis pendidikan ini di Aceh, dapat pula dilihat dalam hubungan akibat modernisme Islam di Indonesia pada sekitar perempatan pertama abad XX. Muncul dan berkembangnya organisasi-organisasi modernis Islam pada tingkat nasional di antaranya Serikat Islam, Muhammadiyah dan Al Irsyad yang cabang-cabangnya juga berdiri di Aceh telah membawa angin baru pula terhadap sistem pendidikan keagamaan di daerah Aceh.

Sebelum perkenalan dengan sistem pendidikan Barat, masyarakat Aceh telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan tradisional pengaruh Agama Islam yang pada umumnya dikelola oleh para pemimpin agama (ulama). Di antara lembaga-lembaga tersebut yaitu **Dayah/pesantren**, **Rangkang** dan **Meunasah**. Pecahnya peperangan dengan pihak Belanda yang berlangsung lama serta melelahkan, sangat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat Aceh, terutama oleh para ulama. Oleh karenanya, selama kesibukan menghadapi peperangan tersebut, para ulama sedikit sekali berkesempatan untuk memimpin dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan mereka dengan baik. Dan hal ini berkaitan melemahnya sistem pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional tersebut.¹⁸

Selanjutnya bersamaan dengan meredanya perang melawan Belanda, pada sekitar perempatan pertama abad XX, berbagai macam pengaruh modernisme Islam, baik yang melalui Minangkabau di mana banyak terdapat putera-putera Aceh pernah belajar di sana,¹⁹ maupun melalui Timur Tengah,²⁰ dan ada pula yang melalui Pulau Pinang²¹ serta tempat-tempat lain mulai masuk ke Aceh. Maka dengan masuknya berbagai pengaruh itu mulai kelihatan adanya inisiatif dan usaha baru kaum ulama Aceh untuk membina kembali sistem pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan mereka, yaitu dengan mengadakan pembaharuan dari sistem **Dayah**, **Rangkang** dan **Meunasah** yang tradisional ke sistem **Madrasah** yang modern. Pada lembaga madrasah ini mulai diperkenalkan cara belajar baru yang berbeda dengan sistem pada lembaga-lembaga tradisional sebelumnya. Materi pelajaran diperluas, antara lain dengan memasukkan beberapa pelajaran baru dengan ide-ide realitis yang berhubungan dengan kepentingan dan hubungan sosial dalam masyarakat.

Pendirian madrasah pertama di Aceh dimulai pada tahun 1916, diberi nama Madrasah **Al Khairiyah** yang berlokasi di Kutaraja. Selanjutnya pada tahun dua puluhan muncul berbagai Madrasah di seluruh Aceh. Di antaranya yang terkenal yaitu, Madrasah Perguruan Islam yang didirikan pada tahun 1926; Madrasah **Nahdatul Islam** yang disingkat **MADNI** (1972); Madrasah **Saadah Adabiyah** (1929) yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh; dan Madrasah **Al-Muslim** (1930). Kedua yang tersebut terakhir merupakan madrasah-madrasah paling terkenal di Aceh pada masanya dan mempunyai banyak cabang di seluruh Aceh. Pada tahun tiga puluhan perkembangan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat; sehingga pada periode itu dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah-sekolah agama di Aceh. Menurut buku **Veraslag Pertemoen – Oelama–Oelama**, pada tahun 1936, di seluruh Aceh terdaftar

91 buah Madrasah. Dan yang tidak terdaftar diperkirakan setengah dari padanya.²²

Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan baru itu, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok ulama yang modernis. Dan ini telah membuka kesempatan kembali bagi para ulama ini untuk berperan aktif dalam masyarakatnya, khususnya dalam bidang pendidikan dan politik.

Sama halnya dengan pendidikan Barat yang mempunyai kelompok pendukungnya, maka pendidikan keagamaan yang modernis ini pun juga mempunyai kelompok pendukungnya, yaitu oleh para ulama modernis yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang modernis pula. Seperti kelompok pertama (pendukung pendidikan Barat), kelompok kedua juga dalam rangka memajukan visi-visi mereka dan untuk memperkuat integritas serta solidaritas antar mereka, maka mereka mendirikan suatu organisasi yang diberi nama **Persatuan Ulama Seluruh Aceh (P U S A)**. Didirikan pada tanggal 5 Mei 1939, dengan susunan pengurusnya sebagai berikut :

- K e t u a I : Tgk. Muhammad Daud Beureueh
K e t u a II : Tgk. Abdur Rahman Matang Glumpang Dua.
Sekretaris I : Tgk. M. Nur El Ibrahimy.
Sekretaris II : Tgk. Ismail Yakob
Bendahara : T. M. Amin, kemudian diganti oleh Tgk. H. Mustafa Ali
Komisaris : Tgk. A. Wahab Seulimun, Tgk. H. Syeh Abdul Hamid, Tgk. M. Daud, Tgk. Usman Lampoh Awe, Tgk. Usman Aziz dan Tgk. Ahmad Daman Huni Takengon.²³

Selain bergerak dalam bidang sosial dan politik organisasi P U S A juga berusaha memajukan sistem pendidikan agama di Aceh. Salah satu usaha dalam bidang ini, yaitu mendirikan suatu lembaga pendidikan yang dinamakan **Normaal Islam Instituut atau Ma'had Al-Mu'alimin** di Bireun pada tanggal 27 Desember 1939, dengan maksud untuk menyediakan guru-guru bagi madrasah-madrasah di Aceh; dan juga dalam rangka untuk menyeragamkan sistem pengajaran agama pada lembaga-lembaga tersebut di seluruh Aceh.²⁴

IV

Munculnya berbagai organisasi sosial-ekonomis dan politis di Aceh pada masa pergerakan nasional, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat nasional, berkait erat dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan yang ada di daerah

Aceh pada periode itu. Di antara organisasi itu dapat disebutkan di sini misalnya : Syarikat Islam (1916); Syarikat Oesaha (1916); Syarikat Atjeh = Vereniging Atjeh (Denpasar 1916). Wargo Dhono Moeljo (Februari 1917). Syarikat Matoer (Mei 1917); Boedi Oetomo (Januari 1918); Selator rahim (Oktober 1918); Volksonderwijzersbond Atjeh (Desember 1918); Islam menjadi Satoe (1919); Insulinde (Februari 1919); Tjinta Bangsa (Mei 1919); Vereeniging Inl. Personeel B.O.W. (September 1919); Syarikat Cooperatie Toeloeng Manoeloeng (Desember 1919); Bajoer Oesaha (Maret 1920). Kongsi Atjeh Sumatra (Juli 1920)²⁵; Muhammadiyah (1927); Taman Siswa)1932) dan POEGA (1939).²⁶

Semua organisasi tersebut di atas umumnya dikoordinir dan dipimpin oleh para cendekiawan, baik dari hasil pendidikan pemerintah Belanda (pendidikan Barat) maupun dari hasil pendidikan pendidikan agama yang modernis. Hal ini membuktikan adanya kesadaran nasional di antara mereka yang umumnya bertujuan untuk memperjuangkan nasib bangsanya melalui organisasi-organisasi tersebut. Dan dari apa yang telah dikemukakan di atas juga menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor dinamisasi sosial.

CATATAN

1. Vb. 1-2' 21-87. *Mailr.* 3225/20.
2. *Ibid.*
3. *Ibid*
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*
6. C.L. "School en Huwelijk op Atjeh", *TBB* (1915), hal. 306-39. Lihat juga C.L., "Meisjesscholen op Atjeh", *Ibid* hal. 140.
7. *Mailr.* 1178/09.
8. *Mailr.* 234/10.
9. Johanna, "Pengadjaran Kepala-kepala di Tanah Atjeh", *Surat Kabar Sinar Atjeh*, (Kutaradja 5 Maret 1908, I : 2).
10. Uraian ini didasarkan atas karya Alfian, (ed), **Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh**, (Jakarta : LP3ES, 1977), hal. 207-09
11. Berdasarkan Stukken van adviseur voor Oosterse Talen en Mohammedaan Recht. C. Snouck Hurgronje, 1891-1908, betreffende de Religieuspolitieke Toestanden in Atjeh. **Kernpapier** No. 410, KITLV Leiden, hal. 167-169.
12. Sekolah ini mungkin pada mulanya khusus diperuntukkan bagi anak-anak militer Belanda yang bertugas di Aceh, Lihat **Kolonial Verslag** (1900), hal. 3.
13. Mengenai pengiriman putera-putera Uleebalang yang dikirim keluar Aceh dapat dilihat misalnya dalam, *Mailr.* 668/1900. *Mailr.* 353/09. *Mailr.* 234/10. dan *Mailr.* 953/10.
14. Lihat misalnya dalam *Memorie van overgave* A. Ph. van Aken, bekas Gubernur Aceh dan Daerah-daerah Takluknya, Pebruari 1936. *Mailr.* 504/36, hal. 137.
15. Nama kedua Uleebalang ini adalah, Teuku Cik Mohammad Tyaheb dan Teuku Nyak Arief.
16. A.J. Piekaar, **Atjeh en De Oorlog met Japan**. (The Hague: Van Hoeve, 1949), hal .30.
17. Lihat Alfian, *loc cit.*
18. *Ibid.*
19. Pada tahun tiga puluhan, jumlah pelajar Aceh di Minangkabau diperkirakan mencapai ratusan orang dan kebanyakan bersekolah di Thawalib. Lihat H.A. Ghazali, **Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasimy**. (Jakarta : Socialia, 1978). hal. 9.
20. Di antara putera-putera Aceh yang pernah belajar di sana, yaitu Tgk. M. Nur El-Ibrahimi, tamatan Al-Azhar Cairo; beliau ikut aktif memodernisir sistem pendidikan agama di Aceh; dan Tgk. Syekh Abdul Hamid, seorang tokoh Serikat Islam cabang Aceh, yang pernah belajar di Mekkah. Yang tersebut terakhir selama di Mekkah pernah mengirim

beberapa berita rahasia melalui celah-celah harian berbahasa Arab **Ummul Qura** yang terbit di sana, kepada rekan-rekannya di Aceh; yang isinya antara lain berupa anjuran agar mereka berusaha memperbaharui sistem pendidikan agama di Aceh; yang menurutnya dengan jalan memperbaharui sistem pendidikan itu, Aceh baru mungkin bangun kembali untuk membebaskan diri dari penjajahan. **Wawancara** dengan Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba (salah seorang yang pernah menerima kiriman berita itu), 24 September 1980.

21. Lihat William R. Roff, **Nasionalisma Melayu**. (Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 1975), hal. xi. Terjemahan oleh Ahmad Boestaman.
22. **Verslag Pertemoean Oelama-oelama**. (sungai Limpah: Jamiyah Al-Islahiyah. Oktober 1936), hal. 12.
23. Lihat Ismuha, "Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh 30 Tahun Yang Lalu", **Sinar Darussalam** No. 14 dan 15 Djuni dan Djuli 1969, hal. 43-47 dan 33-40.
24. Mahmud Junus. **Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia**. (Jakarta : Mu-tiara 1979), hal. 179.
25. **Vb.** 1- 2 : 21 - 87. **Mailr.** 3225/20.
26. POEGA adalah singkatan dari Persatuan Oeleebalang Groot Atjeh.

PERANAN MADRASAH PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA DI KALIMANTAN SELATAN

Oleh :

H. Ramli Nawawi

PENGANTAR

Makalah yang berjudul Peranan Madrasah Pada Masa Penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan ini dibuat dalam rangka kegiatan Seminar Sejarah Lokal yang diselenggarakan pada tanggal 1 s/d 4 September 1982 di Denpasar Bali.

Penyusunan makalah ini berdasarkan metode perpustakaan dan wawancara. Kepustakaan diambil dari berbagai sumber berupa buku, catatan, dan tulisan-tulisan pada mass media. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap tokoh yang banyak mengetahui masalah daerah Kalimantan Selatan.

Makalah disiapkan dalam waktu yang relatif singkat ini tentu saja jauh dari sempurna. Mudah-mudahan makalah yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha yang bermaksud menghimpun pengetahuan tentang sejarah Tanah Air Indonesia ini.

PENGAJIAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

Pengajian yang diselenggarakan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1710–1802) seorang ulama Islam dari daerah Kalimantan Selatan yang telah memiliki kealiman setelah belajar selama 30 tahun di Mekkah dan Madinah, merupakan kegiatan pendidikan yang pertama diselenggarakan dalam rangka pembaharuan dan penyebaran lebih jauh agama Islam yang masuk ke daerah ini pada pertengahan abad ke-16.

Sistem yang dipakai dalam pengajian ini adalah sistem balagan (bandengan), namun di samping itu dilakukan juga sistem sorogan. Pada sistem balagan seorang guru membacakan dan menjelaskan isi sebuah kitab dikelilingi oleh sejumlah muridnya yang masing-masing memperhatikan kitabnya. Sedangkan sistem sorogan seorang guru hanya memberikan pelajaran (tuntunan) pada seorang murid (santri) sehingga dapat memahami isi sebuah kitab.¹⁾

Pengajian yang diselenggarakan oleh Syekh Muhammad Arsyad bermula dari sebuah perkampungan yang terdiri dari tanah persawahan hadiah dari Sultan Tahmidillah yang terletak di pinggiran kota Martapura.

Pada masa permulaan dari pengajian ini beliau secara khusus membimbing kedua cucunya yang bernama Muhammad As'ad dan Fatimah, sehingga keduanya tampil pertama kali sebagai ulama dan alamah yang kemudian menjadi guru bagi sekalian murid laki-laki dan sekalian murid perempuan.

Melalui pengajian ini Muhammad Arsyad mencontohkan kehidupan kepada anak-cucu dan murid-muridnya sesuatu pandangan hidup yang menyeimbangkan "hakekat dan syari'at." Di mana dalam segala tindakan kehidupan terdapat keseimbangan antara kegiatan dunia dan akhirat. Pandangan inilah yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan pengajian yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad. 2)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam pengajian ini selain diberikan pelajaran agama juga muridnya dilatih bekerja sama menyelenggarakan tanah pertanian.

Bahkan kemudian untuk memungkinkan dapat dilakukannya penggarapan sebidang tanah yang sebelumnya tidak dapat dikerjakan di daerah tersebut, beliau memelopori penggalian sebuah saluran air guna mengalirkan air yang selalu menggenangi tanah kosong tersebut. Saluran inilah yang kemudian dikenal dengan nama "Sungai Tuan", yakni sebuah sungai yang bermuara ke Sungai Martapura yang pembuatannya dahulu dipelopori oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad.

Sistem belajar sambil bekerja inilah yang seterusnya diwariskan untuk dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Di mana setiap anak-cucu dan muridnya yang sudah memperoleh kealimanan diwajibkan hidup berkeluarga di daerah-daerah pedalaman di mana mereka kemudian menyelenggarakan pengajian pula. 3)

Demikianlah pengajian yang sudah diselenggarakan sejak sekitar tahun 1790 Masehi tersebut kemudian secara berangsur-angsur melahirkan satu kelompok baru yang selanjutnya dikenal sebagai "kelompok ulama" di daerah ini. Kelompok ini selanjutnya mempunyai peranan besar dalam perkembangan masyarakat Kalimantan Selatan.

Fatwa-fatwa golongan ulama sangat besar pengaruhnya terhadap segala tindak usaha setiap anggota masyarakat. Ketetarikan kepada pribadi-pribadi para ulama tersebut menyebabkan timbulnya "charisma" kelompok ini.

Selanjutnya ketika Sultan Adam berkuasa (1825-1857) golongan ulama mendapat tempat terhormat di masyarakat. Pada masa itu sultan memandang perlu dalam tata pemerintahan Kerajaan Banjar ada jabatan Qadhi dan Mufti. Dalam jabatan-jabatan tersebut hanya dapat diisi dengan orang-orang dari kelompok ulama.

Qadhi atau penghulu adalah seorang yang diangkat oleh sultan untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Sedangkan mufti adalah hakim tertinggi yang bertugas mengawasi pengadilan. Adanya jabatan-jabatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah ditrapkan di masyarakat Banjar pada waktu itu. Ini merupakan gambaran suatu perkembangan di mana ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebelumnya telah disebarkan melalui pengajian telah dijadikan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Sultan Adam itu antara lain ditegaskan bahwa rakyat diharuskan untuk :

1. Beri'tikad ahlu sunnah wal jama'ah
2. Tetuha-tetuha kampung mendirikan langgar untuk bersembahyang berjamaah pada waktunya dan supaya mengajak anak buahnya bersembahyang berjamaah pada setiap hari Jum'at
3. Kepada mufti dan qadhi agar menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum Islam menurut Mazhab Imam Syafi'i.⁴⁾

Demikianlah pengajian yang diselenggarakan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai suatu sistem pendidikan/pengajaran yang pertama dilakukan di daerah ini dan yang kemudian dikembangkan lebih luas oleh anak cucu dan murid-muridnya di mana ditanamkan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pandangan hidup yang berdasarkan keseimbangan antara kegiatan duniawi dan ukhrawi ternyata kemudian banyak mempengaruhi perkembangan masyarakat yang berlangsung sesudahnya di daerah ini.

MASUKNYA PENDIDIKAN BARAT DAN REAKSI MASYARAKAT

Apabila sistem pendidikan/pengajaran yang berlangsung sebelumnya dikenal dengan istilah pengajian maka pendidikan Barat yang masuk ke daerah Kalimantan pada awal abad ke-20 lebih ditekankan pada sistem klassikal di mana diberikan pelajaran-pelajaran pengetahuan umum. Pemerintah Kolonial Belanda merasa perlu menyelenggarakan pendidikan Barat di samping untuk memenuhi permintaan tenaga-tenaga administrasi yang mereka perlukan di daerah jajahan ini ternyata juga untuk membentengi Belanda dari volkano Islam yang mereka anggap sebagai suatu ancaman terhadap pemerintahan kolonial di Indonesia ini.⁵⁾ Jadi sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, yang mereka sebut Inlander. Sehingga seorang Inlan-

der baru dapat menikmati pendidikan ini setelah melewati seleksi ketat, yang pada kenyataannya bukan seleksi kecerdasan yang dilakukan tetapi seleksi ras dan status. 6)

Kalau dalam masyarakat Kolonial yang dijadikan patokan untuk menentukan tinggi-rendahnya status tersebut adalah besar-kecilnya penghasilan atau dalam kepegawaian berdasarkan tinggi-rendahnya pangkat/jabatan, maka dalam masyarakat Inlander telah diatur atas 3 kategori sebagai berikut . (1) kategori A adalah para kaum bangsawan, pejabat tinggi pemerintah serta pengusaha kayu yang berpenghasilan bersih 75 gulden/bulan, (2) kategori B adalah orang tua yang memperoleh pendidikan MULO dan Kweekschool ke atas, sedangkan (3) kategori C adalah para pegawai kecil, militer atau orang tua yang telah memperoleh pendidikan HIS.7)

Bahwa sebelum Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di daerah ini (1860) struktur masyarakat Banjar terdiri atas (1) golongan raja dan keluarganya, (2) kaum bangsawan, (3) kaum ulama, (4) pegawai tinggi kerajaan, (5) orang-orang kaya/pedagang, (6) penduduk biasa, dan (7) orang-orang yang terlibat hutang. Dan setelah Kerajaan Banjar dihapuskan sejak 11 Juni 1860 maka dalam masyarakat kolonial ini lahir struktur baru, di mana raja, kaum bangsawan dan pegawai tinggi kerajaan tidak mempunyai peranan lagi. Inti sosial pada waktu itu terdiri dari kelompok kecil yang disebut "elite Hindia Belanda" Kelompok kecil yang baru muncul tersebut terdiri atas

- (1) Kepala-kepala distrik;
- (2) Pegawai yang telah dilatih untuk suatu pekerjaan tertentu;
- (3) Beberapa orang ulama yang diangkat untuk keperluan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama, hukum perdata/adat, yang juga berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan keinginan-keinginan pemerintah kepada penduduk.8)

Pendidikan Barat yang diselenggarakan Pemerintah Hindia Belanda tumbuh bersama munculnya elite Hindia Belanda seperti tersebut di atas tidak banyak memberi arti langsung bagi kemajuan rakyat jajahan di daerah ini.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai seleksi yang ketat bagi anak-anak orang Indonesia yang dapat memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah Belanda tersebut serta munculnya elite Hindia Belanda yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan kebencian kepada Belanda

merupakan hal-hal yang menyebabkan pendidikan Barat yang diselenggarakan Belanda tersebut sekedar untuk memenuhi keperluan mendesak untuk kepentingan Hindia Belanda di Indonesia.

Berkembangnya peranan kaum ulama yang dahulu lahir dan menjadi kuat sejak adanya pengajian-pengajian Syekh Arsyad memungkinkan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang berusaha menyaingi sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan swasta yang lahir menyaingi sekolah-sekolah Belanda ini juga telah menggunakan sistem klasikal.

Jadi timbulnya pendidikan Hindia Belanda ini menggugah bangkitnya golongan ulama yang merupakan kelompok **elite religius** untuk bergerak menandingi kegiatan Belanda. Kelompok ulama dengan kharismanya di samping menyelenggarakan sekolah-sekolah agama/madrasah secara klasikal juga tetap melakukan pengajian-pengajian seperti yang digariskan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Sehingga pada waktu Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan Barat di daerah ini, masyarakat bersama golongan ulama melakukan kegiatan pula membangun sekolah-sekolah swasta sebagai tandingan di mana khusus diberikan pengetahuan keagamaan.

Pada waktu itu kegiatan pendidikan dan pengajaran antara yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak terdapat hubungan kerjasama. Apabila pendidikan swasta (keagamaan) yang merupakan bentuk baru dari pengajian mendapat dukungan dari masyarakat, maka sekolah-sekolah pemerintah tidak mendapat simpati dari masyarakat. Untuk ini ada pernyataan pihak pemerintah Belanda tentang sikap masyarakat yang lebih condong memilih sekolah swasta yang mereka sebut sebagai sekolah "liar".

Berikut ini dugaan pihak pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan besarnya perhatian masyarakat terhadap sekolah-sekolah swasta.

"Ada beberapa sebab yang mendorong orang bumiputra memilih "sekolah liar", antara lain sebagai berikut. Menurut dugaan pertama usaha para guru sekolah liar yang dengan rajin dan gigih mempengaruhi orang tua bakal murid untuk memasukkan anak ke sekolah mereka. Yang kedua, mungkin pembahasan mengenai "Ordonansi Sekolah Liar" dalam Dewan Rakyat berakibat timbulnya pendapat dalam masyarakat penduduk bumiputra, bahwa sekolah liar adalah milik rakyat dan ada di luar urusan pemerintah. Sentimen nasionalisme ikut memberi kesan kehormatan kepada kebanggaan atau kemuliaan "sekolah liar". 9)

Tetapi bagaimanapun kenyataan sejarah membuktikan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil membatasi sekolah tipe HIS itu hanya untuk anak elite bumiputra saja. Di samping ada dorongan kuat bagi sementara orang untuk menyekolahkan anaknya di HIS atau tipe sekolah seperti itu walaupun harus berkorban mengeluarkan biaya cukup tinggi, maka di antara masyarakat mulai timbul juga kesadaran bahwa untuk rakyat bumiputra perlu juga mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini tidak diartikan untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi, tetapi agar nantinya dapat menggantikan orang-orang Barat dalam banyak jabatan.

Pemikiran ini pun tumbuh di masyarakat Kalimantan Selatan sehingga ada lulusan HIS dan MULO yang kemudian tampil sebagai tokoh pergerakan dalam masa perjuangan kemerdekaan. Ini merupakan sesuatu yang muncul di antara sikap keras masyarakat yang menentang pendidikan Barat di daerah ini.

Demikianlah sampai pada momen ini pendidikan Barat yang diselenggarakan Pemerintah Hindia Belanda hanyalah memberikan tempat bagi sementara anak-anak Indonesia pada mada sekolah-sekolah tingkat dasar seperti *Volkschool* dan *Vervolgschool* yang pada tahun 1840-an telah tersebar di beberapa kota di Kalimantan Selatan. Sementara HIS sebagai sekolah yang ditentukan berdasarkan status bagi orang tua muridnya, hanya ada di tiga tempat yakni di kota Banjarmasin 1 buah, di kota Kandangan satu buah, dan Kota Baru 1 buah. Sedangkan untuk tingkat MULO baru ada pada tahun 1927 sebanyak satu buah di Banjarmasin.

Yang lainnya hanyalah sekolah-sekolah kejuruan yang mempersiapkan tenaga-tenaga khusus, seperti *Schakelschool*, *Ambachtschool*, *Klein Handel School*, *Meisjevervolgschool* dan

Kweekschool. Di samping itu ada juga sekolah-sekolah khusus untuk orang Belanda dan Cina, seperti *ELS* dan *HCS*.

BERDIRINYA SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA

Ada dua motif yang mendorong masyarakat untuk membangun sekolah swasta di daerah ini. Yang pertama adalah motifasi keagamaan dan yang kedua motifasi nasional. Motifasi keagamaan didasari perasaan tanggung jawab keagamaan di mana menurut ajaran Islam masalah pendidikan anak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di kemudian hari. Sehingga begitu kerasnya pandangan masyarakat terhadap setiap pendidikan yang tidak dilandasi keislaman, maka ia dicap sebagai ingin mengkristenkan anak-anak mereka. 11)

Sementara motifasi nasional yang tumbuh berdampingan dengan motifasi keagamaan, di mana terdapat semangat kebebasan dan tanggung jawab agar anak-anak Indonesia terhindar dari pengaruh jiwa kolonial dan tetap menjadi putera tanah Air yang memiliki semangat patriotisme dan pengabdian terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Sehubungan dengan motifasi-motifasi tersebut di atas di Kalimantan Selatan lahir lembaga-lembaga pendidikan swasta yang berdasarkan Islam dan kemudian diikuti lembaga-lembaga pendidikan swasta yang didasari jiwa kebangsaan.

Pelopop-pelopop yang mendirikan lembaga pendidikan agama adalah kelompok ulama yang selama ini menyelenggarakan pengajian-pengajian tradisional dengan sistem pengajian. Dan menghadapi perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan tersebut, para ulama yang pernah melanjutkan' pendidikan di luar negeri (Qairo dan Mekkah) dalam rangka memperdalam pengetahuan Islam, kemudian terpanggil untuk menyelenggarakan pendidikan di Mesir di mana sistem klasikal. Gagasan ini timbul terutama dari kelompok ulama yang pernah mengikuti pendidikan di Mesir di mana sistem klasikal sudah diterapkan sudah lama.

Dengan tenaga-tenaga pengajar dari hasil pengajian yang berlangsung sebelumnya, mula-mula sekali dibangun 2 madrasah di Pantai Hambawang dan Jatuh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekarang. Dan dalam waktu singkat di beberapa kota di Kalimantan Selatan berdiri madrasah-madrasah yang serupa.

Menyadari bahwa dasar pembangunan madrasah ini mempunyai latar belakang yang sama, maka oleh beberapa tokoh ulama dibentuk organisasi antara madrasah-madrasah tersebut. Organisasi ini disebut Persatuan Perguruan Islam (PPI), yang terbentuk secara resmi pada tahun 1935 dengan jumlah madrasah :

- Madrasah Ibtidaiyah ada 23 buah dengan jumlah murid 2.305 orang.
- Madrasah Tsanawiyah ada 6 buah dengan jumlah murid 502 orang.¹²⁾

Madrasah-madrasah PPI dapat maju dan bertahan lama yakni sampai masuknya Jepang di daerah ini, karena pandangan bahwa anak-anak mereka harus memasuki sekolah agama dari pada bersekolah di Volkschool atau Vervolgschool kepunyaan Belanda yang dianggap masyarakat- masyarakat sebagai sekolah kapir.

Berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1914 di Banjarmasin segera diikuti oleh berdirinya cabang-cabang SI di beberapa kota

di Kalimantan Selatan. Di tiap cabang SI didirikan madrasah Syariat Islam. Madrasah-madrasah itu adalah : (1) Sekolah Darussalam di Martapura (1914), Arabische School yang kemudian menjadi Ma'adah Rasyidiah di Amuntai (1928), Madrasah Tsanawiyah Islam Pandai di Kandangan (1930) dan Diniyah Islamiah di Barabai (1932).¹³ Madrasah-madrasah SI ini diperkuat dengan timbulnya organisasi Musyawaratutthalibin (1930) yang mempunyai madrasah tersebar di kota-kota di Kalimantan Selatan. Demikian pula berdirinya Muhammadiyah tahun 1932 di Alabio, yang dalam kegiatannya di bidang pendidikan telah menyelenggarakan sekolah-sekolah agama pula merupakan dukungan pula bagi kemajuan pendidikan swasta di daerah ini.

Sekolah-sekolah agama yang diselenggarakan dengan sistem klasikal tersebut setelah berselang beberapa tahun telah menghasilkan pemimpin-pemimpin muda Islam, baik yang bergiat dalam bidang politik, menjadi guru madrasah di kampung-kampung, melakukan pengajian di surau-surau atau menjadi muballig yang giat melakukan teblig-tablig agama Islam.¹⁴)

Lembaga-lembaga pendidikan swasta yang bermotif nasional yang timbul di Kalimantan Selatan adalah Sekolah Taman Siswa di Marabahan pada tahun 1931. Ajaran kebangsaan yang diterapkan di sekolah ini diwujudkan dengan terbentuknya organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI).

Kemudian pada tahun 1937 di Kandangan lahir organisasi pergerakan PARINDRA (Partai Indonesia Raya) yang telah menyelenggarakan persekolahan bernama Perguruan Rakyat Parindra. Di sekolah ini ditanamkan dengan perasaan cinta terhadap bangsa dan Tanah Air Indonesia.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa kurangnya minat masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya untuk memasukkan anak mereka di sekolah-sekolah pemerintah Belanda, di samping pesatnya perkembangan sekolah-sekolah swasta yang bermotivasi agama, maka seperti telah disebutkan di atas keadaan ini mempunyai kaitan erat dengan peranan dan jiwa orang-orang yang sebelumnya telah mengenal sistem pengajian yang sudah banyak dipakai sejak sekitar pertengahan abad ke 18.

Demikian pula halnya adanya sekolah-sekolah yang bermotivasi nasional merupakan perwujudan dari jiwa pergerakan yang di samping memiliki dasar keagamaan yang mereka terima dalam bentuk pengajian, dan sejak mengenal pendidikan Barat dapat menyadari jarak dan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada apa yang mereka namakan bangsa Inlander ini

PENDIDIKAN ZAMAN KEMERDEKAAN DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Keadaan terganggunya pendidikan pada zaman Jepang berlangsung terus hingga pada masa revolusi kemerdekaan. Ini terjadi karena situasi perang. Apalagi pada zaman revolusi di mana para pemuda dan para siswa banyak ikut bergerilya untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Dalam masa kemerdekaan bidang pendidikan di daerah ini mengalami perkembangan dengan tumbuhnya lembaga-lembaga baru. Di Banjarmasin tahun 1954 dibangun perkampungan pelajar Mulawarman di mana untuk tahap pertama di kompleks ini terdapat 17 buah sekolah mulai dari TK sampai dengan SMTA dengan jumlah murid sebanyak 5.500 orang pelajar. Diantara sejumlah lembaga-lembaga pendidikan kejuruan maka waktu ini dibangun sekolah pendidikan agama 6 tahun. Ini suatu yang belum pernah diselenggarakan sebelumnya. Bahkan sejak tahun 1956 lembaga perguruan tinggi mulai muncul di sini. Pertama kali yang lahir adalah Akademi Perniagaan Kalimantan. Dan mulai tahun 1958 dibangun lembaga perguruan tinggi Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) di Banjarmasin. Lembaga ini tahun 1960 diresmikan sebagai universitas negeri dengan 5 fakultas (Hukum, Ekonomi, Sospol, Pertanian dan FKIP).

Sementara itu bidang pendidikan swasta yang umumnya terdiri dari madrasah-madrasah dan pesantren. Di antaranya ada yang merupakan lanjutan kegiatan dari sekolah-sekolah yang ada sebelum Jepang, dan ada pula yang baru dibentuk, seperti SNIP Mesjid Jami Banjarmasin, Madrasah Muallimin di Barabai, Pesantren Ibnu Amin Pemangkeh di Barabai. Sehingga menurut data tahun 1961 di Kalimantan terdapat 146 madrasah Ibtidaiyah, 40 buah sekolah dengan jumlah muridnya 4.903 orang. Tingkat Aliyah ada 8 buah madrasah dengan murid berjumlah 1.618 orang. Pada tahun 1961 ini kalau dibandingkan jumlah murid Aliyah 1.618 orang, maka SMA berjumlah 265 orang. Dari perbandingan ini jelas sampai pada saat itu pandangan masyarakat terhadap pendidikan dalam bidang agama lebih banyak mendapatkan perhatian masyarakat. 15)

Dari kenyataan inilah sehingga lahirnya Fakultas Islamologi pada tahun 1958 sebagai bagian dari UNLAM mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dan karena kemudian lahir lagi fakultas-fakultas tersebut akhirnya pada tanggal 22 September 1961 digabungkan dalam suatu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari.

Apabila sampai tahun 1960-an data kemajuan sekolah-sekolah agama masih di atas jumlah siswa sekolah negeri, ini merupakan bukti bahwa pandangan/jiwa keagamaan yang sudah tertanam sejak zaman pengajian Syekh Muhammad Arsyad tetap mendasari pandangan kehidupan orang Banjar.

Sesuai pandangan keagamaan yang tertanam di masyarakat maka pada masa awal kemerdekaan para orang tua murid umumnya menyekolahkan anaknya sekaligus untuk 2 jenis pendidikan. Yakni pagi masuk sekolah rakyat/pemerintah, dan sore masuk sekolah madrasah. Ini merupakan tindakan agar anak mereka tidak hanya mempunyai pengetahuan "umum" saja tetapi juga memiliki pengetahuan agama. Pandangan masyarakat yang berlandaskan ajaran agama ini kemudian selaras dengan kurikulum pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah RI dalam kebijaksanaan pendidikan di Indonesia di mana pada setiap jenjang sekolah yang diselenggarakan pemerintah, pendidikan agama diberikan sesuai kurikulum. Demikian pula halnya di mana semua madrasah baik negeri maupun swasta telah diisi pula dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Kalau pada masa penjajahan Belanda dahulu masyarakat membangun madrasah-madrasah untuk menyaingi sekolah-sekolah Belanda, maka pada zaman kemerdekaan sekolah-sekolah swasta tersebut justru menunjang sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah.

KESIMPULAN

Pengajian yang dirintis oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam rangka pembangunan dan penyebaran agama Islam di daerah ini telah menghasilkan dasar-dasar pandangan hidup yang berakar kuat dalam masyarakat Kalimantan Selatan.

Timbulnya golongan ulama sebagai hasil yang diperoleh melalui pengajian ini merupakan modal yang berperanan besar dalam perkembangan masyarakat di daerah ini. Melalui kelompok ulama inilah pengajian terus berkembang dan meluas. Dan dari kelompok inilah timbul gagasan pelaksanaan sistem irigasi persawahan, pentrapan hukum agama melalui pemerintahan sehingga ditetapkannya jabatan mufti dan qadhi untuk menyelenggarakan pengadilan kerajaan serta ditekankannya penyelenggaraan ibadah agama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kerajaan.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan kolonialnya, golongan ulama menyadari adanya tantangan yang dapat berakibat negatif. Maka untuk menjaga agar tidak terdapat jurang dalam masyarakat sehubungan dengan

struktur masyarakat Banjar dan munculnya kelompok Hindia Belanda yang dapat bertambah kuat dengan ditrapkannya pendidikan kolonial di daerah ini, maka golongan ulama berusaha mengangkat rakyat dengan membangun madrasah-madrasah sebagai lanjutan dari pengajian yang sebelumnya telah berkembang di daerah ini.

Pengaruh **charisme** golongan ulama di daerah ini ternyata dapat merebut hati masyarakat untuk memihak lembaga-lembaga pendidikan swasta yang berupa madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh daerah Kalimantan Selatan ini. Sementara ada di antara segelintir masyarakat yang berkesempatan memasuki sekolah-sekolah kolonial, tetap sebagai anggota masyarakat yang menyadari kedudukan sebagai orang bumiputra.

Dari perkembangan tersebut di atas lahir bentuk-bentuk kegiatan yang bermotivasi agama dan nasional. Dari setiap organisasi yang dibentuk lahir kegiatan pendidikan swasta yang merupakan saingan terhadap pendidikan kolonial yang diselenggarakan Belanda. Secara berturut-turut terbentuklah Persatuan Perguruan Islam (PPI), Syarikat Islam (SI), Musyawaratutthalin, PARINDRA dan Taman Siswa yang masing-masing menyelenggarakan kegiatan pengajaran di masyarakat.

Demikianlah memasuki masa kemerdekaan pengaruh dari ajaran para ulama melalui pengajian dan madrasah-madrasah ini masih terasa dan menjadi pegangan masyarakat dalam menghadapi perkembangan yang terjadi. Dan perasaan keagamaan yang tertanam kuat ini tetap harus selalu diperhatikan, khususnya untuk setiap kegiatan yang menyangkut masyarakat di Kalimantan Selatan.

CATATAN

- 1) Sudjoko Prasodjo cs, **Profil Pesanteren laporan hasil penelitian pesantren Al Falah & delapan pesantren di Bogor**, LP3ES, Jakarta, 1974 hal 58.
- 2) H.R. Nawawi, **Syekh M. Arsyad Al Banjari penyebar ajaran Islam ahlussunah wal Jama'ah abad ke 18 di Kalimantan Selatan**. UNLAM, Banjarmasin 1977 hal 126.
- 3) Zafry Zamzam, **Riwayat Syekh M. Arsyad Al Banjari** Harian Utama, 26–28 September 1972. (diambil dari Syajaratul Arsyadiyah oleh H. Abdurrachman Siddiq, Singapura, tanpa tahun.
- 4) Amir Hasan Bondan, **Suluh Sejarah Kalimantan**, Fajar, Banjarmasin, 1953, hal 151.
- 5) Drs. A Gazali Usman, **Benteng Tambanio**, Banjarmasin Post, 17-12-1980.
- 6) Proyek IDKD Kalsel, **Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan**, Banjarmasin, 1981 hal 31.
- 7) **Hasil wawancara** dengan Bp. Syahran, Pengawas Sekolah jaman Hindia Belanda.
- 8) Johansyah, **sebuah tinjauan singkat mengenai peranan Darussalam dalam pendidikan di Kalsel**. UNLAM, Banjarmasin, 1974 hal 41.
- 9) **BP3K, _Pendidikan di Indonesia 1900–1940 II**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1977, hal 208.
- 10) Proyek IDKD Kalsel, **Op. Cit** Hal 32.
- 11) Johansyah, **Op. Cit**, hal 18.
- 12) Proyek IDKD Kalsel **Op. Cit**, hal 54.
- 13) H.R. Nawawi, **Op. Cit**, hal 109.
- 14) **Loc Cit**
- 15) Proyek IDKD Kalsel, **Op Cit**, hal. 120.

PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR DINAMISASI SOSIAL DI DAERAH RIAU PADA AWAL ABAD XX

Oleh :
Marleily Asmuni

Masuknya Pengaruh Modernisasi Islam

Menurut Drs. H. Sidi Ibrahim Boechari SH *renaissance* Islam di Sumatera pertama kali dibawa oleh orang-orang Minangkabau yang kembali dari Mekkah. Mereka membawa faham Wahhabi yang bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran Islam dari bid'ah, khurafat dan tahyul. 1) Gerakan baru itu ternyata mendapat tantangan dari kaum adat yang berakhir dengan terjadinya perang saudara. Dalam peperangan itu Belanda berdiri di belakang kaum adat tetapi kemudian kaum adat bersatu dengan kaum agama melawan Belanda. Peperangan tersebut lebih dikenal dengan nama Perang Padri (1821 – 1837). Meskipun perang itu sudah berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda, namun semangat Islam tetap hidup di kalangan rakyat.

Pada akhir abad XIX di Timur Tengah berkembang gerakan modernisasi Islam yang mula-mula disebarkan oleh seorang Afghanistan bernama Sayid Jamaluddin Al-Afghani (1839–1897). Sebagai penganjur modernisasi Islam ia adalah orang yang pertama mencoba menggabungkan faham Islam dengan "Barat" 2) Untuk menyebarkan buah pikirannya itu ia mengadakan dakwah dari satu negara Islam ke negara Islam yang lain. Kemana ia pergi hanya satu suara yang dibawakannya : "Bangunlah hai kaum muslimin dari tidur nyenyakmu, bersatulah menentang penjajahan yang telah menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang ada padamu, tegak dan lawanlah raja-rajamu sendiri yang menjadi penghalang dari kebangkitanmu." Bebaskanlah jiwamu dari pada khurafat, syirik dan bid'ah yang telah menyebabkanmu hancur". 3)

Salah seorang muridnya bernama Sekh Muhammad Abduh (1849–1905) sangat terpengaruh dengan gerakan pembaharuan yang dilancarkan Sayid Jamaluddin. Kemudian ia pun ikut ambil bagian dalam perjuangan itu bersama-sama dengan gurunya. Perjuangan itu ditujukannya dalam bidang politik, sosial dan agama. Akibat kegiatan-kegiatan Muhammad Abduh diusir oleh pemerintah Inggris ke luar Mesir. Di Paris bersama-sama dengan Sayid Jamaluddin ia mengadakan perkumpulan rahasia serta menerbitkan sebuah majalah Islam bernama Al Urwatul Wusqa. Melalui majalah tersebut mereka dapat menyebarkan faham modernisasi Islam itu kemana-mana, terutama ke negara-negara Islam, bahkan sampai ke Indonesia. 4)

Sesudah Sayid Jamaluddin meninggal dan Muhammad Abduh sudah diperbolehkan kembali ke Mesir, maka salah seorang muridnya mengajaknya untuk menerbitkan pula sebuah majalah Islam bernama Almanar (1898). Dengan media baru itu mereka dapat lagi menyebarkan alam pikiran yang lebih modern ke seluruh dunia Islam. Tentu saja gerakan modernisasi yang dikembangkan itu banyak mendapat tantangan oleh pihak Islam sendiri. Tapi dengan gigih ia berusaha menyebarkan faham baru itu dengan maksud untuk memajukan masyarakat Islam. Usahanya yang paling berhasil ialah dengan mengadakan pembaharuan di lapangan pendidikan yang ditanamkannya melalui Universitas Al Azhar di Cairo. Sebagai guru besar ia berhasil menanamkan alam pikiran baru itu kepada anak-anak didiknya di Al Azhar.

Di universitas itu banyak juga orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu. Mereka ini setelah kembali ke Indonesia, kemudian menyebarkan lagi faham baru itu di daerah masing-masing. Di Sumatera Barat ulama-ulama muda, pelajar-pelajar Sumatera Thawalib mencoba mempelajari faham modern itu melalui majalah Almanar dan juga Tafsir Muhammad Abduh yang terkenal itu. Di Sumatera Barat pada masa itu banyak terdapat pondok-pondok pengajian yang terkenal, karena itu orang-orang datang dari mana-mana belajar ke sana dan di antaranya ada yang datang dari daerah Riau. Tiga orang ulama yang kembali dari Timur Tengah bernama Sayid Al Hadi dari Malaka, Muhammad Tahir bin Jalauddin dari Minangkabau dan Haji Abbas bin Muhammad Taha dari Singapura merasa sangat terharu melihat nasib orang Melayu yang terbelakang. Lalu timbul gagasan untuk menerbitkan sebuah majalah yang senafas dengan Almanar bernama Al Iman di Singapura. Terbitan pertama ialah bulan Juli 1906, di bawah pimpinan Sekh Muhammad bin Salim Alkalali. Penerbitan majalah tersebut ternyata mendapat sambutan hangat bagi orang Melayu, terlihat dari nama-nama perwakilan Al Iman yang terdapat di beberapa tempat di Sumatera dan di Jakarta.

Oleh William R. Roff, Ph. D berhasil dikumpulkan sebanyak 31 buah majalah Al Iman yang terbit dari 1906—penghujung tahun 1906. Dari Al Iman terbitan bulan September 1906 terdapat sebuah artikel berbunyi : "Menuntut Ketinggian Anak-anak Negeri". Tulisan itu ditulis oleh Sayid Sekh Al Hadi yang pada garis besarnya mengeritik tentang kelalaian orang Melayu yang terlalu cepat menyerah kepada nasib (takdir). Ia juga mengeritik pemimpin-pemimpin yang lengah akan tanggung jawabnya kepada rakyat, sehingga Negeri Melayu dikuasai oleh orang Eropah, bahkan mereka sudah menyerahkan martabatnya kepada orang kulit putih itu. Ia tumpahkan juga kesalahan kepada pemuka-pemuka agama yang suka memberikan petuah-petuah yang kolot dan palsu. Katanya keunggulan orang Eropah

ialah karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Lihatlah katanya, orang Jepang yang memakai ilmu pengetahuannya dapat mengangkat bangsanya. Begitu juga dengan orang-orang Cina yang datang dengan segulung tikar dan pakaian sepaasang, tapi karena mereka kuat berusaha akhirnya dapat menjadi toke-toke dan milioner.⁵⁾

Sayid Sekh Al Hadi telah beberapa kali melawat ke Timur Tengah bersama-sama dengan putra-putra Sultan Riau.⁶⁾ Atas anjuran Sekh Al Hadi berdiri pula sebuah perkumpulan kaum cerdik cendekiawan di Pulau Penyengat bernama Rusydiah Club pada akhir abad XIX. Sebagian besar dari anggota Rusydiah Club ialah para bangsawan Kerajaan Melayu Riau, tapi melihat kepada hasil-hasil karya tulis yang diterbitkan oleh R.C. dapat diketahui bahwa anggotanya tidak saja terbatas pada suku Melayu saja. Karya tulis ini dicetak pada percetakan yang didirikan sendiri oleh R.C bernama percetakan Mathba'atul Riauwyah. Pada salah satu naskah tertulis bahwa naskah itu dicetak pada tahun 1895 di Mathba'atul Riauwyah di Pulau Penyengat Indera Sakti. Ada sejumlah 23 naskah yang dapat dikumpulkan sebagai hasil karya dari R.C, tapi besar kemungkinan jumlah yang sudah dihasilkan melebihi dari jumlah tersebut. Naskah itu terdiri dari berbagai bidang, ada agama, sastra, bahasa Melayu, dan sejarah.

Dari kegiatan-kegiatan R.C tidak dapat diragukan lagi bahwa R.C didirikan adalah sebagai wadah untuk mengembangkan faham modernisasi agama Islam yang dibawa oleh putra-putra Sultan dari Mesir. Dengan media tulis yang berupa naskah dari berbagai ilmu itu Rusydiah Club mencoba mendidik masyarakat Riau khususnya dan Melayu umumnya untuk belajar lebih terbuka lagi dengan pengetahuan-pengetahuan baru demi kemajuan masyarakat dan umat Islam umumnya. Dengan usahanya itu kaum bangsawan Riau telah mencoba melepaskan diri mereka dari ciri-ciri Islam tradisional. Dengan pengetahuan baru itu mereka berusaha mencari hakekat Islam serta berkeyakinan bahwa Islam sesuai dengan segala zaman dan tempat di mana pun. Dengan demikian Islam daapat dilihat tidak saja sebagai tujuan tapi juga sebagai kepercayaan yang tidak menghambat kemajuan dan ilmu pengetahuan.⁷⁾

Peranan kelas atas dalam memajukan masyarakat Melayu sebelumnya sudah dirintis oleh sultan, terbukti dengan dibangunnya sebuah perpustakaan yang lebih dikenal dengan "Kutub Khanah Marhum Ahmadi" oleh Yang Dipertuan Muda Riau X Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi (1858-1899). Perpustakaan itu banyak berisi buku-buku pengetahuan tentang Islam berupa sumbangan dari berbagai negara Islam. Rusydiah Club selain merupakan perkumpulan kaum cerdik-pandai

juga berfungsi sebagai badan tempat sultan bertukar pikiran sehubungan dengan kepentingan kerajaan. Mungkin karena pemerintah Belanda akhirnya mencium juga usaha-usaha Kerajaan Riau ini, akhirnya dihapuskanlah Kerajaan Melayu Riau ini pada tahun 1911. Sejak itu sultan dengan sebagian pengikutnya pindah ke Singapura dan di kota ini mereka melanjutkan kegiatannya dengan mendirikan sebuah percetakan bernama Ahmadiyah Press beralamat di Jalan Sultan No. 82 Singapura.⁸⁾

Faham modernisasi Islam yang dibawa orang-orang yang kembali dari Mesir ke Minangkabau juga mendapat tantangan hebat dari sebagian pemeluk Islam. Golongan yang menerima faham kemajuan ini disebut "Kaum Muda" sedangkan golongan yang menentang disebut "Kaum Tua". Istilah Kaum Muda ini pertama kali digunakan ialah oleh seorang wartawan ulung pemimpin surat kabar "Utusan Melayu" yang menulis dengan huruf-huruf besar pada tulisannya di harian itu dengan judul Kaum Muda dengan mengambil contoh kepada gerakan kaum muda di Turki di bawah pimpinan Anwar Pasya.⁹⁾ Tulisan itu diterbitkan oleh pimpinan Utusan Melayu Datuk Sutan Marajo pada tahun 1907.

Kaum muslim semakin menyadari bahwa perjuangan mereka untuk memajukan Islam dan masyarakat Islam dapat dipercepat melalui komunikasi massa. Melalui komunikasi penyebaran kemajuan dapat semakin dipercepat dan diperluas jangkauannya. Interaksi antara pemimpin atau ulama-ulama besar semakin ditingkatkan dengan masyarakat melalui dakwah dan pendidikan. Tidak salah apa yang dikatakan oleh Ithiel de Sola Pool bahwa "bukanlah hal yang kebetulan pertumbuhan politik di seluruh dunia berdampingan dengan pertumbuhan pers secara historis."¹⁰⁾ Komunikasi dapat menimbulkan kesatuan-kesatuan politik yang lebih luas, karena dapat mengkordinasi kelompok-kelompok yang terdiri dari orang seorang membentuk jaringan kontak langsung dalam suatu masyarakat.¹⁰⁾

Pengaruh Modernisasi Islam dalam pendidikan

Kekuasaan kolonial Belanda di daerah Riau terutama daerah Riau Daratan secara intensif baru dilaksanakan pada abad XX. Karena itu pengaruh kebudayaan Barat belum begitu menyebar pada awal abad XX. Sekolah yang pertama di daerah Riau terdapat di Riau Kepulauan yaitu di Tanjung Pinang didirikan pada tahun 1883. Menurut laporan Kolonial Verslag tahun 1880 di Keresidenan Riau baru ada 3 buah sekolah bumi putera yaitu di Bengkalis, Tanjung Pinang dan Lingga. Kolonial verslag tahun 1905 melaporkan bahwa di daerah ini terdapat 4 sekolah gubernemen.¹¹⁾

Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang melek huruf Latin sangat sedikit sekali, apalagi sekolah yang didirikan sejak tahun 1833 itu tidak pula berlangsung terus-menerus. Namun demikian tidak pula berarti bahwa sebagian besar penduduknya waktu itu buta huruf, karena banyak di antaranya yang bisa membaca huruf Arab (Melayu). Huruf Melayu itu berasal dari huruf Melayu juga, hanya di sana-sini sudah diadakan perubahan terutama mengenai tanda-tanda bacaan. Karena itu orang-orang yang pandai membaca Al Qur'an dengan mudah dapat membaca huruf Melayu. Sudah menjadi lazim bahwa bila anak-anak sudah berumur 7 tahun ia akan dimasukkan ke sekolah mengaji di surau-surau, selain diajar bersembahyang mereka juga diajar membaca Al Qur'an. Pada masa dahulu kepandaian membaca huruf Melayu itu tidak diajarkan secara formil, tetapi disampaikan secara unik melalui kebiasaan membaca kitab-kitab cerita, baik cerita dongeng maupun cerita-cerita tentang kisah raja-raja. Biasanya cerita-cerita itu panjang atau bersambung-sambung dan menarik sehingga orang ketagihan membacanya. Cerita itu antara lain ialah Kisah 1001 Malam, Bayan Budiman, Cendera Hasan, dan sebagainya.

Begitu sukanya orang membaca naskah-naskah itu hingga tak jarang cerita yang sama dibaca berulang-ulang. Biasanya orang yang membacanya dikelilingi oleh orang-orang lain yang juga ingin mendengarkan, sambil membaca ia menunjuk juga kepada yang dibacanya itu. Dengan demikian teman-teman yang duduk didekatnya lama-lama pandai pula membacanya. Tidak jarang pula kitab-kitab itu disalin dengan tulisan tangan kemudian diberi berkulit dengan kertas tebal dan dibungkus dengan kain yang berwarna elok. Karena jumlah buku-buku sangat terbatas sering buku itu beredar dari satu tangan ke tangan yang lain.¹²⁾ Begitulah kepandaian membaca huruf Melayu itu dapat berkembang dan salah satu hal yang memungkinkan ialah karena mereka dari kecil sudah pandai membaca Al Qur'an.

Politik etis yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1905 tidaklah dilaksanakan dengan ikhlas. Sekolah-sekolah didirikan terutama adalah demi kepentingan kaum penjajah juga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kaum modal di Indonesia terhadap tenaga buruh rendahan seperti juru-juru tulis, penjaga gudang, dan sebagainya. Di samping itu Pemerintah Belanda juga khawatir bila rakyat Indonesia cerdas akan membahayakan kelangsungan kekuasaannya.

Pada permulaan abad XX Sekolah-sekolah Desa mulai didirikan terutama di tempat-tempat kedudukan **Contreleur**. Di daerah **Landschap** sekolah-sekolah dibiayai oleh pemerintah setempat sehingga pemerintah Belanda dapat menghemat perbe-

lanjaannya. Sampai Belanda kalah di seluruh daerah Propinsi Riau sekarang ini hanya terdapat dua H.I.S. yaitu di Siak Sri Indrapura dan di Tanjung Pinang. H I S di Siak didirikan oleh Sultan Siak dalam tahun 1915 untuk anak-anak bangsawan atau orang berpangkat. Kemudian juga dibolehkan bagi anak-anak hartawan. E.L.S. hanya ada di Tanjung Pinang khusus untuk anak-anak Eropah dan baru kemudian pula di bolehkan anak-anak Melayu atau Cina dari keluarga berpangkat.

Dua tahun kemudian (1917) Sultan Syarif Qasim mengadakan pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam modern bernama Madrasah Taufikiah Al Hasyimiah (1917-1942) di Siak. Di sekolah ini mengajar guru-guru yang berpengetahuan cukup baik antara lain seorang tamatan Universitas Al Azhar dari Minangkabau bernama A. Rivai Yunus, Ilyas M. Ali (Prof. pada IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru sekarang), dan beberapa lagi yang lainnya.

Madrasah itu khusus untuk anak lelaki. Pada tahun 1926 oleh permaisurinya, Tengku Agung Syarifah Latifah didirikan pula sebuah sekolah untuk anak perempuan yang selain diberi pelajaran agama juga pengetahuan lainnya dan ketrampilan wanita. Sekolah ini dapat berdiri sampai tahun 1942. Atas bantuan Sultan Siak juga pada tahun 1930 oleh Rahmah El Yunusiah dari Padang Panjang didirikan pula Madrasatun Nisak yang berlangsung sampai Jepang masuk. Pelajar-pelajar yang tamat dari madrasah ini dapat melanjutkan ke Padang Panjang dengan bantuan biaya dari sultan. Sumbangannya terhadap kemajuan agama Islam dan kemajuan rakyat cukup besar. Melalui lembaga pendidikan Islam Sultan Siak mencoba untuk memelopori lembaga pendidikan Islam modern yang juga memberikan pelajaran tentang pengetahuan umum. Sejak tahun 1930 sekolah ini mulai pula menanamkan kesadaran nasionalisme melalui pelajaran ilmu politik. Dengan adanya seorang guru lepasan Al Azhar tidak diragukan lagi bahwa selain memasukkan faham modernisasi ke dalam pendidikan, tentu tidak lupa pula menanamkan faham kebangsaan kepada pelajar-pelajarnya. Sebagai bukti akan sifat patriot dari sultan, maka sewaktu bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan R.I., Sultan Siak mengirimkan telegram kepada Soekarno pada tanggal 28 November 1945 menyatakan kesetiannya kepada R.I. ¹³⁾

Perluasan pendidikan sebagai pelaksanaan politik etis menyebabkan timbulnya generasi baru dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang lebih modern dari pada generasi tua. Di samping itu sekolah juga mendatangkan segi negatifnya, karena pendidikan yang diberikan dari sekolah rendah sampai ke yang lebih tinggi lebih banyak menekankan kepada sifat intelektualitas. Sebagai akibatnya sekolah-sekolah banyak

menghasilkan orang-orang yang merasa asing dengan masyarakat lingkungannya. Selain itu ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan menyebabkan orang merasa bangga bila dapat mempergunakan bahasa Belanda dari pada bahasa aslinya; walaupun dalam lingkungan sendiri. Dan dalam kenyataan mereka yang dapat menggunakan bahasa Belanda dipandang mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat.

Sementara itu semangat pembaharuan yang sudah lama ditupkan oleh Islam dengan pelopornya Muhammad Abduh mendapat sambutan di daerah Riau. Maka dengan dilaksanakannya politik etis dapat diibaratkan sebagai minyak pelumas bagi kemajuan dalam bidang pendidikan. Ibarat pepatah Melayu "Berkayuh biduk hilir". Apalagi dengan masuknya pengaruh Sumatera Thawalib dan Muhammadiyah dari Minangkabau, maka perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam modern semakin subur tumbuhnya.

Di daerah Kuantan oleh Haji Oemar Abdullah setelah menamatkan pelajarannya di Sumatera Thawalib didirikannya pula sebuah "Perguruan Agama Islam" di Taluk. Di sekolah ini mengajar beberapa guru tamatan sekolah di Thawalib Parabek (Bukittinggi), Sungaiyang Batusangkar, Nur Falah Johor dan dari Mekkah (Sekolah Indonesia). Di antara murid-murid lempasan sekolah ini ada yang memegang peranan dalam masa revolusi fisik (tokoh-tokoh militer). Sekolah yang didirikan dari tahun 1928 ini terpaksa ditutup karena bangunannya dibumihanguskan pada masa Revolusi (1948).¹⁴⁾

Dalam tahun 1932 di Sentajo didirikan pula Nurul Islam oleh Yahikam dan Mudahi seorang lulusan sekolah Muslimin Bukittinggi, sekarang menjadi SM.P. Muhammadiyah. Pada tahun yang sama di Teluk Kuantan oleh Umar Usman didirikan Perguruan Al Hidayah. Ia adalah lulusan Sumatera Thawalib Padang Panjang dan Al-Irsyad Batavia. Berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang lain, di sekolah ini jumlah mata pelajaran agama berimbang dengan mata pelajaran umum. Oleh Umar Usman dibentuk pula Kepanduan Islam. Karena ajaran Islam yang diberikannya kepada murid-murid adalah ajaran Islam yang membangkitkan sifat nasionalisme, baik di sekolah maupun dalam dakwah-dakwah, akibatnya ia ditangkap oleh pemerintah Belanda sehingga sekolahnya terpaksa ditutup.

Di Basrah oleh orang-orang Muhammadiyah yang dahulunya belajar di Sumatera Thawalib Padang Panjang, Perguruan Muslimin Bukittinggi didirikan Hayatul Islam dalam tahun 1938. Pada tahun 1940 namanya diubah menjadi Perguruan Islam dan dalam tahun 1970 menjadi P.G.A Muhammadiyah sampai sekarang.

Pada tahun 1937 di Teluk Kuantan didirikan Madrasah Muallimin Muhammadiyah oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Umar Amin Husin, Haji Abdul Rauf, Ibad Amin dan Jamalako Sutan. Dua orang tokoh pertama kemudian menjabat profesor, sedangkan Jamalako Sutan kemudian dibuang pemerintah Belanda ke Digul. Dengan cepat sekolah-sekolah Muhammadiyah ini berkembang di tiap-tiap negeri seperti Lubuk Jambi, Baserah, dan Cerenti.¹⁵⁾

Daerah lain di Inderagiri ialah Babul Khairat dalam tahun 1930, Nurul Falah pada tahun yang sama dan Perguruan Agama Islam 1942—sekarang di Rengat. Di Tembilahan Madrasatul Islamiah (1937—1960) dan Perguruan Saadah (1930—sekarang). Di Bengkalis berdiri H.I.S. Muhammadiyah (1937—sekarang) Kuliatul Muhadharrishin (1938—1950). Di Selat Panjang Tarbiyah Islamiyah (1937—1942), di Tanjung Pinang yaitu di pulau Penyengat Madrasah Muallimin (1936), oleh Raja Haji M. Yunus. Dari sebuah majalah terbitan Ahmadiyah Press 1939 di Singapura diberitakan bahwa ke Penyengat sudah beberapa kali dikirimkan orang untuk meninjau kemungkinan akan didirikannya sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam. Dari brosur-brosur yang masih ditemukan di Penyengat dapat diketahui bahwa daerah ini mempunyai sebuah perkumpulan *studie fonds* yang bernama "**Riouw Studie Fonds**" (Persekoetoean Poetra Boemi Riouw).

Di daerah Bangkinang sebagai pelopor pendidikan Islam modern ialah Abdul Malik yang mendirikan Daarul Muallimin (1919—1942). Oleh bekas-bekas muridnya kemudian didirikan lagi beberapa sekolah di bawah naungan Muhammadiyah seperti di Air Tiris (1931) oleh H.A. Hamid, di Pulau Payung Rumbio oleh Rusli Thaimi (1937), di Penyasauan Rumbio oleh Abd. Jalil Manaf (1937, di Pulau Sialang Rumbio oleh Abdul Rakhman 1938 dan di Pulau Baru Rumbio oleh H. Husin 1938 serta di Kouk oleh Ayub Syarafi (1938), dan di Pekanbaru Lajnah Khairiah (1936).

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa daerah yang banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Agama Islam di daerah Riau adalah Kabupaten Kampar dan Inderagiri.

Pengaruh Modernisasi Islam Dalam Politik

Menurut Anderson pendidikan mempunyai banyak fungsi. Hasil pendidikan tidak saja bermanfaat bagi bidang ekonomi atau pemerintah saja, tetapi juga keuntungan-keuntungan lainnya yang tak diharapkan sebelumnya.¹⁶⁾

Pendidikan dapat menyatukan sejumlah suku bangsa.

Manusia tidak dapat saling mengerti sesama warganya dan meluaskan ikatan kesetiannya melalui lingkungan desa bila mereka tidak dapat saling mengerti. Dan saling mengerti itu hanya dapat dilakukan bila mereka berpendidikan. Oleh karena itu sekolah mempunyai fungsi politik. Seperti kita ketahui berdirinya sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah di daerah Riau selain untuk memajukan agama dan masyarakat Islam juga bermotifkan politik. Bukankah pembaharuan yang datang dari Mesir itu bertujuan untuk mengajak kaum Muslimin agar membuka mata hatinya kepada kemajuan? Bukankah faham itu menganjurkan agar kaum Muslimin bangun melawan penjajahan?

Karena itulah sering di dalam dakwah para ulama-ulama membangkit-bangkitkan semangat kebangsaan kaum Muslim serta mengutip ayat-ayat suci Al Qur'an yang dapat menambah keyakinan mereka akan anjuran tersebut. Di situlah keistimewaan dari modernisasi Islam itu, selain ia berusaha menyatukan faham Islam dengan faham Barat tetapi di dalamnya terdapat pula pertentangan-pertentangan.

Seorang Belanda Snouek Hurgronje ahli dalam Islam dan lama tinggal di Mekkah pernah memperingatkan pemerintah Belanda bahwa selama kaum muslimin menganut Islam sebagai agama, maka selama itu gerakannya tidak membahayakan. Akan tetapi bila Islam sebagai ajaran agama digunakan sebagai kekuatan politik, maka pemerintah tidak dapat memandang enteng.¹⁷⁾

Untuk menghalang-halangi kegiatan politik para ulama Islam, pemerintah lalu mengeluarkan sebuah peraturan melarang guru-guru agama Islam mengajarkan agamanya, apabila tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah. Di Jawa Ordonansi Guru ini sudah dilaksanakan sejak 1905, tetapi karena perjuangan pemimpin-pemimpin agama di sana peraturan itu jatuh kepada "memberi tahu" pada tahun 1925. Pada tahun 1928 dicoba pula untuk dilaksanakan di Sumatera oleh Dr. de Vries, tetapi berkat perjuangan ulama-ulama di Sumatera Barat di bawah pimpinan Dr. HAMKA ordonansi itu tidak jadi dijalankan.¹⁸⁾

Kemudian pada tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan lagi sebuah peraturan baru bernama Ordonansi Sekolah Liar. Tujuan pemerintah Belanda tidak lain untuk menghalang-halangi Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Pada umumnya sekolah-sekolah swasta karena tidak terikat dengan pemerintah dengan bebas dapat menanamkan rasa kesadaran nasional kepada murid-muridnya. Ada juga sekolah swasta yang ditawarkan

subsidi oleh pemerintah Belanda tetapi karena takut terikat atau karena rasa harga diri tidak mau menerimanya.

Akibat adanya peraturan-peraturan itu maka sekolah-sekolah atau guru-guru yang dicurigai oleh pemerintah Belanda terpaksa tutup. Daerah-daerah yang banyak kena peraturan tersebut adalah daerah Kampar dan Kuantan. Di daerah ini banyak guru-guru yang dahulunya bekas murid Sumatera Thawalib di Sumatera Barat. Seperti kita ketahui Sumatera Thawalib yang pada mulanya merupakan perkumpulan murid-murid Islam pada tahun 1930 berubah menjadi partai politik yang progresif bernama PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Karena sepak terjang dari partai ini, banyak di antara anggota-anggotanya yang kemudian ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. "Tegasnya Permi dan Pergerakan Nasional di Minangkabau tidak akan ada bila modernisasi pendidikan Islam itu tidak terjadi di Minangkabau", karena itu Drs. H. Sidi Ibrahim Boechari SH mengatakan bahwa terdapat "Pengaruh timbal balik antara pendidikan Islam dan Pergerakan nasional di Minangkabau".¹⁹⁾

Pengaruh modernisasi Islam dalam bidang pendidikan berpengaruh pula kepada bidang politik baik di Sumatera Barat sebagai daerah tetangganya maupun di daerah Riau. Hal ini dibuktikan lagi bahwa dari lembaga-lembaga pendidikan Islam ini kemudian banyak muncul tokoh daerah Riau yang mengambil peranan baik dalam bidang kemiliteran maupun bidang politik atau pemerintahan. Karena itu di daerah Riau partai-partai atau organisasi-organisasi yang mendapat tempat dikalangan rakyat adalah organisasi-organisasi yang berdasarkan Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Perti, sedangkan P.K.I dan P.N.I. meskipun ada tapi tidak begitu banyak pendukungnya.

Pengaruh Modernisasi Islam Terhadap Mobilitas Sosial

Pada mulanya kedatangan modernisasi Islam menimbulkan pertentangan antara Kaum Tua dengan Kaum Muda. Akan tetapi setelah faham baru ini semakin banyak disebarkan dan ditanamkan, baik melalui dakwah dan pendidikan, pembaharuan itu semakin luas diterima masyarakat. Selain itu juga peranan komunikasi serta interaksi antara pemimpin-pemimpin agama semakin ditingkatkan dengan melalui musyawarah dan media pers.

Dengan berdirinya organisasi-organisasi yang bersifat agama seperti Sumatera Thawalib, Muhammadiyah, Syarekat Islam dan sebagainya hubungan antara kaum Muslimin semakin diperdekat. Di daerah Teluk Kuantan misalnya setelah adanya pengaruh baru tersebut rasa persatuan antara kaum Muslimin semakin kuat. Sebelumnya bila terjadi kemalangan atau kema-

tian, hanya sukunya masing-masing yang mengurus kematian itu, karena masing-masing mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam melakukan upacara penguburan. Suku-suku lainnya tidak ambil peduli meskipun mereka tinggal dalam satu kampung. Tetapi sesudah masuknya pengaruh Muhammadiyah yang membawa pembaharuan, sikap masyarakat mulai berubah, karena orang-orang Muhammadiyah berusaha mengadakan perkumpulan-perkumpulan kematian yang bertujuan untuk membantu keluarga yang mendapat musibah dengan tidak membedakan suku atau kelas dalam masyarakat. Kalau dahulu zakat fitrah hanya diberikan kepada guru-guru agama maka oleh Muhammadiyah sebagian diberikan kepada orang-orang miskin dan fisabillah serta anak yatim piatu.²⁰⁾

Di samping itu dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan agama yang modern mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial baik secara geografis maupun sosiologis. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern selain akibat pengaruh pembaharuan dari Mesir juga dipercepat dengan dilaksanakannya politik etis. Kenyataan akan adanya pengaruh pendidikan kepada status seseorang dalam masyarakat, menyebabkan timbulnya inisiatif dari masyarakat sendiri untuk mendirikan sekolah-sekolah dengan cara mengubah pendidikan agama yang tradisional (halaqah) menjadi sekolah-sekolah berkelas. Di samping mempelajari agama Islam juga mendapat pelajaran tentang ilmu pengetahuan umum. Malah ada di antaranya yang mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda.

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah pada mulanya tidak mendapat sambutan dari masyarakat karena dicurigai sebagai sekolah orang kafir. Tapi sekolah-sekolah agama mendapat sambutan dari masyarakat. Selain itu sarana yang disediakan oleh pemerintah pun sangat terbatas baik dalam jumlah maupun syarat-syarat lainnya. Mereka yang diterima pada sekolah yang lebih baik (H.I.S) haruslah dari anak-anak bangsawan atau orang berpangkat.

Sementara itu semangat masyarakat akan kemajuan semakin meningkat. Untuk memenuhi tuntutan kemajuan itu banyak orang yang berpindah dari desa ke kota. Selain itu mereka yang sudah berpendidikan juga lebih senang tinggal di kota dari pada di desa. Akibatnya kota-kota menjadi pusat perubahan sosial.

Seperti sudah diterangkan terdahulu modernisasi Islam masuk ke daerah Riau pertama kali dipelopori oleh golongan atas (sultan dan bangsawan) dengan mendirikan Rusyidiah Club yaitu perkumpulan kaum cerdik cendekiawan. Untuk menyebarkan faham modern tersebut perkumpulan ini banyak meng-

hasilkan tulisan-tulisan dari berbagai bidang. Selain dari bidang agama juga bidang sastra, bahasa Melayu, sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Untuk itu mereka telah mendirikan sebuah percetakan bernama Matha'atul Riauwyah (1892).

Berbeda halnya dengan di daerah Riau Daratan terutama Inderagiri dan Kampar, pembaharuan agama Islam inisiatif tumbuh dari masyarakat sendiri yaitu dari lapisan bawah.

Akibat dari latar belakang sejarah pertumbuhan lembaga pendidikan di kedua daerah tersebut berbeda, maka perkembangan kemudian yang terjadi pada kedua daerah itu berbeda juga. Setelah kekuasaan Sultan Riau berakhir dengan dihapuskannya kekuasaan Riau pada tahun 1911, maka perkembangan R.C. menjadi terhalang. Meskipun sultan meneruskan kegiatannya dengan mendirikan Ahmadiyah Press di Singapura, tetapi karena sultan sendiri sudah pindah ke sana, maka usaha ke arah pengembangan modernisasi Islam itu jadi tersendat-sendat, sekalipun tidak dapat dikatakan terhenti. Baru dalam tahun 1938 oleh Raja Haji M. Yunus mulai didirikan Madrasah Muallimin di Penyengat. Meskipun ada juga madrasah-madrasah yang lain, tetapi bila dibandingkan dengan pertumbuhan-pertumbuhan madrasah di daerah Kuantan dan Kampar, boleh dikatakan daerah Kepulauan Riau tidak begitu memegang peranan lagi dalam mengembangkan modernisasi Islam.

Keadaan demikian membawa kaitan atas dinamika sosial dari kedua daerah ini kemudian. Akibatnya antara lain tampak kepada kemajuan daerah Riau Daratan terutama Kuantan dan Kampar di bidang pendidikan lebih menonjol dibandingkan dengan daerah-daerah lain di propinsi ini.

Latar belakang lain yang dapat dilihat sebagai penyebab dari variasi ini ialah perbedaan adat istiadat. Daerah Riau Daratan sesuai dengan adat yang berlaku dalam pemerintahan desa sejak zaman dahulu sampai ke zaman Belanda bahkan sampai sesudah merdeka berbentuk nagari. Dalam setiap nagari terdapat Kerapatan Penghulu yang merupakan badan musyawarah untuk membicarakan masalah nagari. Para penghulu mempunyai kedudukan yang sama, karena itu nagari tidak ubahnya seperti republik-republik kecil, sehingga pemerintahannya dilaksanakan secara demokrasi. Hal tersebut membawa pengaruh kepada jiwa penduduk daerahnya, yaitu menjadi lebih demokrasi serta mudah menerima pembaharuan.

Sistim demokrasi menyebabkan masyarakat mempunyai sifat terbuka, berinisiatif. Berbeda dengan Riau Kepulauan pemerintahan Sultan-Sultan sedikit lebih feodal meskipun bukan otokrasi bila dibandingkan dengan di Jawa misalnya, dimana Raja dianggap keturunan dewa.

Ini dapat dipandang sebagai salah satu keistimewaan bila dipandang dari segi letaknya. Biasanya daerah pedalaman lebih statis pandangannya dibandingkan dengan daerah pantai. Apalagi daerah Kepulauan Riau ini terletak dijalur silang lalu lintas perhubungan laut, seharusnya lebih mudah menerima hal-hal baru, dibandingkan dengan daerah pedalaman.

CATATAN

- 1). Lihat Drs. H. Sidi Ibrahim Boecharj SH, "Pengaruh timbal balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau", Pen. Gunung Tiga, Jakarta, 1981, halaman 45.
- 2). Ibid, halaman 56, dikutip dari W.C. Smith, Islam Dalam Sejarah Modern I, Bharatara, Jakarta, 1962, halaman 59.
- 3). Hamka, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera, Pen. Djajamurni, Djakarta, MCML XVII, halaman 90.
- 4). Ibid.
- 5). Baca; William R. Roff. Ph. D, Sejarah Surat-Surat Khobar Melayu, Pen. Saudara Sinaran Berhad, Pulau Pinang, 1967, halaman 17.
- 6). Ibid, halaman 15.
- 7). Lihat: Drs. Muchtar Lutfi, Rusydiah Club, hasil suatu penelitian, Universitas Riau, Pekanbaru, 1976, halaman 22.
- 8). Ibid, halaman 27.
- 9). Drs. H. Sidi Ibrahim Boechari SH, opsit, halaman 61.
- 10). Myron, Weiner, Modernisasi Dinamika Pertumbuha, Gajah Mada universitas Press, 1977, halaman 51.
- 11). Dra. Marleily Asmuni R, et al, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1978/1979, Kanwil Depart.P.P dan K, halaman 18.
- 12). H. Soeman Hs, Pendidikan dan Pengajaran di Pekanbaru, Makalah pada Seminar Sejarah Kota Pekanbaru, Universitas Riau, Pekanbaru, halaman 2.
- 13). Team Penyusun dan Penulisan Sejarah Riau Universitas Riau, Sejarah Riau, Percetakan Riau, Pekanbaru, 1977, hal. 443, 444.
- 14). Dra. Marleily Asmuni dkk, Sejarah Pendidikan Daerah Riau, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Depart. P dan K, 1980/1981, hal 102.
- 15). Drs. Umar Amin dkk, Reformasi Islam dalam masyarakat Kuantan, Universitas Riau, Pekanbaru, 1980, halaman 36.
- 16). C. Arnold Anderson, Modernisasi Pendidikan. Baca dalam karangan Myron Weiner, Modernisasi Dinamika Pertumbuhan, Gajah Mada University Press, 1977, halaman 17.
- 17). Sartono Kartodirdjo et al, Sejarah Nasional Indonesia V, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, halaman 75.
- 18). Hamka, opsit, halaman 149.

- 19). Untuk lebih jelasnya baca Drs. H. Sidi Ibrahim Boechari SH, opsit, Organisasi pelajar-pelajar dari surau Jembatan Besi Padang Panjang yang berdiri tahun 1918 bernama Sumatera Thawalib. Surau ini dipimpin oleh H. Abdul Karim Amrullah. Sejak tahun 1921 nama itu dipakai untuk madrasah yang kemudian dipakai oleh semua surau-surau yang ada di Sumatera Barat, Pada tahun 1930 seluruh pelajar-pelajar dari surau-surau tersebut bergabung jadi satu menjadi PERMI.
- 20). Drs. Umar Amin dkk, opsit, halaman 39, 40.

PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI DI BUKITTINGGI PERIODE 1900–1942

Oleh . Ishaq Thaher

I. Pendahuluan

Pendidikan sebagai faktor penting yang menimbulkan perkembangan dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah suatu kebenaran umum yang mungkin dapat kita terima. Bukankah melalui pendidikan masyarakat mewariskan dan mengembangkan kebudayaannya. Dengan kecerdasannya dan kemauannya yang sadar masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaannya serta masa depan yang lebih baik. Sedangkan usaha membina kecerdasan dan kemauan manusia secara sadar dan sistematis itu, adalah pendidikan. Walaupun demikian perlu dijelaskan bahwa konsep pendidikan yang dipakai dalam makalah ini adalah pendidikan dalam pengertian luas. Yang dimaksud dengan pendidikan dalam arti luas adalah setiap proses dari mana individu memperoleh ilmu pengetahuan atau pemahaman, pengembangan sikap dan ketrampilan. Pendidikan berfungsi baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Fungsi sosialnya adalah untuk menolong setiap individu menjadi anggota masyarakat yang efektif. Kadalannya termasuk pendidikan informal dan pendidikan formal.

Dalam makalah ini akan dikemukakan peranan pendidikan dalam pengembangan dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat kota Bukittinggi pada periode 1900–1942. Untuk membahas topik ini lebih dahulu dijelaskan sebatas lalu tata lingkungan Bukittinggi, latar belakang sejarahnya, keadaan masyarakat dan ekonominya sebelum tahun 1900. Ke semua faktor ini banyak sedikitnya mewarnai respon masyarakat terhadap pendidikan yang dilaksanakan. Kemudian akan diuraikan nilai-nilai dan isi pendidikan informal maupun formal yang dilaksanakan. Sepintas lalu juga disinggung sistem nilai budaya yang mewarnai dan mengisi pendidikan informal. Karena pendidikan informal diperkirakan banyak membentuk sikap mental masyarakat Bukittinggi, sedangkan pendidikan formal yang diberikan oleh Belanda lebih berperan memberi pengetahuan dan ketrampilan dasar, terutama pada pendidikan tingkat rendah, di samping itu juga akan dilihat individu-individu yang bagaimanakah yang dihasilkan pendidikan itu, sehingga mereka dapat mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat Bukittinggi. Terakhir akan disampaikan kesimpulan sementara serta saran agar dilakukan penelitian yang intensif dan terarah sehingga kita dapat merekam dan membuat gambaran yang lebih tepat mengenai masalah yang terkandung dalam topik makalah ini.

II. Tata Lingkungan

Bukittinggi adalah Daerah Tingkat II Kotamadya yang terletak dalam Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Sebelum menjadi kota daerah ini merupakan sebuah nagari yang bernama Kurai. Secara adat nagari Kurai berada di bawah satu payung dengan nagari-nagari sekitarnya seperti : Banuhampu, Sianok dan Kota Gadang. Bukittinggi terletak pada ketinggian 927 meter di atas permukaan laut yang berhawa sejuk dan banyak hujan, temperatur rata-rata 21°C. Kota itu berada 91 km sebelah utara Kodya Padang. Letak astronomis Kodya Bukittinggi antara 100° - 100°.30' BT dan 0° - 30° LS.

Kota ini berbatas :

Sebelah utara dengan Kecamatan Tilatang/Kamang;
Sebelah selatan dengan Kecamatan Banuhampu/Sungai Puar;
Sebelah barat dengan Kecamatan IV Kota; dan
Sebelah timur dengan Kecamatan IV Angkat/Candung.

Bukittinggi termasuk kota yang tidak begitu luas, yang terdiri dari 5 (lima) Jorong.

1. Jorong Mandiangin;
2. Jorong Aur Birugo;
3. Jorong Koto Selayan;
4. Jorong Tigo Baleh; dan
5. Jorong Guguk Panjang.

Daerah Kodya Bukittinggi merupakan dataran tinggi yang berbukit-bukit yang berjumlah sekitar 27 buah. Pasar atas yang didirikan pada tahun 1858, terletak di atas bukit Kandang Kabau. Di antara bukit-bukit itu terdapat sawah yang subur. Pada tahun 1974 tercatat luas daerah pertanian padi 754 ha dan pertanian palawija 46,55 ha. Sedangkan pada tahun 1976 merosot secara menyolok; luas daerah pertanian padi menjadi 65 ha dan daerah pertanian palawija menjadi 20,50 ha. Merosotnya daerah pertanian ini karena banyaknya bangunan baru didirikan.

Dalam bidang industri/kerajinan cukup menonjol. Pada tahun 1976 tercatat 181 jenis industri menengah dan kecil. Di samping itu, juga ada usaha sambilan dalam peternakan hewan dan perikanan.

Luas Kotamadya Bukittinggi 249 km² dengan jumlah penduduk 70.691 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.839 pada tahun 1980. Pada tahun 1931 tercatat 14.704 jiwa penduduk Fort de Kock. Tanpa orang Eropah penduduknya menjadi 14.084 jiwa. Dalam jangka waktu lebih kurang 50 tahun bertambah 5 kali lipat. Di sini kelihatan adanya perkembangan yang saling bertolak belakang antara daerah pertanian dengan

pertambahan penduduk Daerah pertanian bertambah sempit sedangkan jumlah penduduk secara relatif makin tinggi. Apakah masyarakat Bukittinggi sedang bergerak dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi perindustrian, hal ini adalah suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban.

Bukittinggi dengan hawanya yang sejuk dan terdapatnya beberapa obyek pariwisata di sana seperti Nagari Sianok, Ngalau Kamang, Kebun Binatang dan lain-lain yang menarik pariwisata domestik dan asing ke sana. Kota ini juga terletak pada persimpangan jalan ke Pakan Baru, Padang dan Medan.

III. Latar Belakang Sejarah

Di sekitar dekade kedua abad 19 keseimbangan masyarakat Minangkabau terganggu karena timbulnya Gerakan Padri. Gerakan ini menolak praktek kehidupan keagamaan yang berlaku selama ini karena bertentangan dengan ajaran agama Islam (Syarak). Tindakan-tindakan kekerasan dari kaum Padri dalam mewujudkan cita-citanya mendapat perlawanan dari kaum Adat sehingga pecahlah Perang Padri (1803–1937). Perang ini dipercepat prosesnya karena intervensi Belanda tahun 1821, yang memihak kepada kaum Adat. Sampai berakhirnya perang itu tahun 1837, kaum Padri sesungguhnya tidak berhasil mengubah struktur politik dan sosial di Minangkabau. Namun gerakan itu telah memperkuat agama dan memperluas sasarannya dalam masyarakat. Suatu perumusan adat diciptakan yang mana mempertentangkan "Adat Jahiliah" dan "Adat menurut Adat". Hubungan antara adat dan agama dan dirumuskan dalam fatwa "Adat bersendi Syarak dan Syarak bersendi Kitabullah."

Suatu gejala yang perlu dikemukakan di sini selama perang Padri berlangsung terjadi perpindahan penduduk terutama ke Fort de Kock. Ketika benteng Fort de Kock didirikan tahun 1825 di Bukittinggi dalam rangka menumpas kaum Padri di Agam, mulailah terjadi perpindahan penduduk nagari sekitar Bukittinggi ke daerah sekitar benteng itu. Kedatangan mereka adalah untuk berdagang, bertukang dan memberikan jasa lainnya.

Perpindahan penduduk makin meningkat setelah Belanda menjadikan Fort de Kock sebagai pusat pengumpulan kopi di daerah Padang Darat. Perpindahan ini dipercepat dengan tumbuhnya Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pendidikan di Padang Darat. Dapat dikatakan pada penghujung abad ke 19 Bukittinggi betul-betul telah berperan sebagai kota bagi rakyat sekitar Kabupaten Agam (dalam dialek daerah dingkapkan "Bukittinggi koto rang agam" Banyak penduduk sekitarnya yang bermukim di kota itu dengan segala macam

kegiatan. Di bidang politik Belanda makin memperkokoh kekuasaannya. Pada rapat laras (kepala kelarasan) di Bukittinggi 6 April 1865 yang diketuai oleh Mr. de Kenderen, kekuasaan laras dikurangi. Pada tahun 1873 mulai berlaku undang-undang **gouvernement** sepenuhnya. Dalam rangka intensifikasi pemerintahnya pada akhir abad ke-19, Belanda membagi Sumatera Barat atas 2 keresidenan : (1) Keresidenan Padang Darat dengan ibukotanya Bukittinggi; dan (2) Keresidenan Padang Pesisir dengan ibukotanya Padang.

Seiring dengan pemantapan kekuasaan politik itu Belanda juga meningkatkan eksploitasi ekonominya. Karena itu permulaan abad ke 20 dasar alam Minangkabau diserang dari segala sisi. Dari luar ia menghadapi ancaman politik dan ekonomi Belanda yang makin kuat, dari dalam oleh gerakan pembaharuan agama. (Taufik Abdullah: 1967).

Respon masyarakat Minangkabau terhadap tantangan dari luar ini bermacam-macam. Di Nagari Kamang dan Manggopoh pada tahun 1908 terjadi perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Perang ini dikenal dengan nama Perang Blasteng. Lain halnya Bukittinggi. Kota ini memperlihatkan suatu respon yang lebih rasional. Dengan mengambil alih ilmu dan teknologi barat melalui pendidikan mereka bentuk organisasi modern yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan lain-lain. Dalam hal ini Bukittinggi hanya dapat diimbangi oleh kota Padang di Sumatera Barat.

IV. Masyarakat

Sebelum Bukittinggi dijadikan garnizun tentara Belanda pada tahun 1821, maka daerah ini didiami oleh orang Kurai yang dianggap sebagai penduduk aslinya. Dalam tambo adat alam Minangkabau dinyatakan bahwa Nagari Kurai didirikan oleh transmigran gelombang II yang berasal dari Tanah Datar (sekarang Kabupaten Tanah Datar dengan ibukotanya Batu Sangkar.*). Setelah Bukittinggi tumbuh menjadi kota, maka sejalan dengan itu terjadi pula perpindahan penduduk dari daerah sekitarnya seperti : Sianok, Banuhampu, Koto Gadang dan yang lainnya. Sebetulnya gejala perpindahan penduduk di daerah Agam telah terjadi semasa Perang Padri. Untuk kepentingan tugas pemerintah, militer dan perdagangan berdatangan pula orang Eropah, Cina dan Timur Asing lainnya ke Bukittinggi.

Penduduk asli Nagari Kurai yang tersebar pada 5 jorong mengakui mereka seadat dan selembaga dengan batas-batasnya ditentukan dalam ungkapan "Kurai nan salingka aue". Maksudnya perbatasan Nagari Kurai ditumbuhi oleh betung sekelilingnya

Pemerintahan sepanjang adat dipegang oleh Penghulu Puncak nan 26 (duapuluh enam). Sedangkan penduduk yang berasal dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi yang bermukim di kota itu berada di bawah pimpinan penghulu dagang. Biasanya mereka mempunyai surau (langgar) sendiri dengan nama "Surau Dagang" dan perkuburan sendiri dengan nama "kuburan dagang". Baik penduduk asli maupun pendatang dari nagari-nagari sekitarnya menganut sistem kekerabatan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau.

Garis keturunan masyarakat Minangkabau menurut garis matrilineal. Anggota masyarakatnya termasuk keluarga ibunya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan isterinya. Dengan kata lain ayah tetap anggota keluarga dari kaum mana ia berasal dan merupakan keluarga lain dari keluarga isteri dan anaknya. Karena itu, keluarga batih menjadi kabur dalam sistem kekeluargaan Minangkabau. Keluarga batih tidak merupakan yang mutlak sehingga bagaimana ikatan ayah dengan isteri dan anaknya dikiaskan sebagai "abu di atas tunggul, kalau datang angin mudah terbang". Begitu pula wewenang dalam segala aspek kehidupan anak kemenakan bukan terletak pada ayah tetapi pada ninik mamak yang menjadi kepala paruiik (kepala keluarga yang terkecil yang diperhitungkan dua generasi di atas ego laki-laki dan satu generasi di bawahnya. (Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia: 1971). Dalam pepatah sering disebut anak kemenakan seperintah mamak (mamak kependekan dari ninik mamak). Meskipun demikian tidak dapat dibantah bahwa keluarga batih memegang peranan penting juga dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, lebih-lebih dewasa ini peranan ayah makin besar dalam keluarga batih.

Dalam sebagian masyarakat Minangkabau ada kesatuan **kampung** yang memisahkan **paruik** dengan **suku** sebagai kesatuan kekerabatan. Dari ketiga macam kesatuan kekerabatan ini paruik yang betul-betul dapat dikatakan sebagai kesatuan yang benar-benar bersifat genealogis. Suku dan kampung dapat dianggap sebagai kelompok yang formal, suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampung dipimpin oleh penghulu, penghulu dipimpin oleh andiko atau datuk kampuang. Kecuali kelompok kekerabatan seperti, paruik, kampuang, dan suku, masyarakat Minangkabau tidak mengenal organisasi-organisasi masyarakat yang bersifat adat yang lain. Dengan demikian instruksi-instruksi dan aturan pemerintah, soal administratif masyarakat pedesaan, seringkali disalurkan kepada penduduk desa melalui penghulu andiko. Oleh karena itu bagaimana respon masyarakat Minangkabau terhadap ide, gagasan baru sangat ditentukan oleh sikap dan wibawa ninik mamak, penghulu-penghulu tersebut.

Seorang penghulu suku atau penghulu andiko tidak mempunyai kekuasaan yang nyata. Mereka lebih banyak dirasakan sebagai seorang yang dituakan dan bertugas menjalankan sesuatu dari pada mendapat hak. Kepenghuluan ini baru mendapatkan suatu kekuasaan yang nyata; setelah dihubungkan dengan sistem pemerintahan Belanda baik sebagai penghulu kepala maupun sebagai Tuanku Laras. Dalam perkembangan sejarah nagari akan kita lihat betapa peranan yang dimainkan oleh penghulu kepala dan tuanku laras dalam memajukan pendidikan di nagarinya. Perlu ditambahkan di sini bahwa perubahan status dan peranan seorang kemandakan dalam jalur hubungan penghulu-mamak-kemenakan sangat terbatas dan hampir tak mungkin. Lebih-lebih dalam sistem pemerintahan Koto-Piliang, di mana penghulu tetap pada sebuah keluarga tertentu dan tidak dipilih. Tidak demikian halnya pada sistem pemerintahan Bodi-Caniago, di mana musyawarah memegang peranan penting.

Selanjutnya perlu pula kita ketahui Stratifikasi Sosial masyarakat Bukittinggi. Secara kasar, stratifikasi sosial masyarakat Minangkabau hanya berlaku dalam desa tertentu (nagari) saja, membagi masyarakat ke dalam tiga lapisan besar, yakni: bangsawan, orang biasa dan orang yang paling rendah. Perbedaan lapisan sosial dapat dihubungkan dengan kedatangan suatu keluarga (kaum) ke suatu tempat. Keluarga yang mula-mula datang ke suatu tempat dan merekalah yang mencancang dan melatih atau manaruko (membuka daerah baru) daerah itu dianggap sebagai bangsawan. Mereka ini dalam masyarakat Minangkabau disebut orang berasa (Orang Asal). Sebagai orang yang berasa (orang asal) di Bukittinggi disebut orang Kuari (menurut nama nagarinya). Keluarga yang datang kemudian ke Bukittinggi tetapi tidak terikat seluruhnya kepada keluarga asalnya, dapat membeli menjadi orang biasa atau golongan pertengahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan keluarga-keluarga yang datang kemudian dan menumpang (bekerja) pada keluarga-keluarga terdahulu dengan tugas mengerjakan, menggembalakan ternak, pekerjaan rumah tangga lainnya. Dalam perkembangannya sistem pelapisan ini dapat dikatakan makin hilang bahkan bertukar dalam bentuk lain. Kaum bangsawan yang terlihat pada tanah pada umumnya makin miskin, sedangkan lapisan-lapisan lainnya yang tidak begitu terikat pada tanah mencari jalan untuk mendapatkan **income**-nya. Lebih-lebih ketika didirikannya Sekolah Sekular oleh Belanda dan terbukanya lapangan kerja pada pemerintah dalam sektor kepegawaian, menyebabkan lahirnya golongan elite yang baru baik sebagai saudagar dan cendekiawan (**intelektual**).

V. Ekonomi

Masa sebelum penjajahan Belanda, kehidupan ekonomi desa di daerah Agam pada umumnya mengusahakan tanah pertanian yang terletak di sekeliling desanya. Penduduk desa dari dataran tinggi terutama menanam padi dan di samping itu mereka juga berusaha dalam kerajinan tenun, kerajinan mengolah logam dan perdagangan.

Tukang-tukang dan pedagang-pedagang yang melakukan kegiatan ekonomi di Bukittinggi biasanya datang dari nagari sekitarnya. Sampai sekarang masih diakui dan dikenal: Sungai Puar sebagai pengusaha logam, Apek Angkek sebagai pengusaha konpeksi dan Pandai Sikat sebagai pengusaha tenun yang terkenal di Sumatera Barat.

Di samping padi, di daerah persawahan dan pekarangan rumah ditanam palawija. Hasil pertanian ini digunakan untuk kebutuhan keluarga sendiri dan kelebihanannya diperdagangkan pada mingguan yang terdapat di setiap nagari guna membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain.

Lembaga di mana integrasi kehidupan ekonomi terjadi dalam bentuk hubungan dagang antara desa-desa, pegunungan, dan dataran tinggi adalah pasar bergilir yang dalam dialek Minangkabau disebut PAKAN, (artinya pasar yang diadakan sekali seminggu pada hari tertentu). Dalam suatu daerah geografis tertentu, pasar besar bergilir di setiap kota, hari pasarnya berbeda satu sama lainnya. Hari pasar Bukittinggi diadakan pada hari Sabtu (sehingga pasar Bukittinggi disebut juga pakan Sabtu), hari pasar kota Padang Panjang diadakan pada hari Jum'at.

Walaupun sejumlah kecil pedagang keliling dan pedagang biasa, setiap harinya melakukan kegiatan perdagangan, namun kegiatan pasar mingguan bergilir tadi merupakan kegiatan ekonomi yang penting dan peristiwa sosial yang riil. Pedagang-pedagang keliling yang mengikuti kegiatan pasar tersebut datang dari daerah sekitarnya untuk menjual pakaian, alat rumah tangga, perlengkapan pertanian, dan kebutuhan hidup lainnya. Tukang-tukang dan pengrajin-pengrajin datang untuk membuat perhiasan, pakaian, dan memperbaiki alat-alat perlengkapan kehidupan. Tengkulak-tengkulak datang untuk membeli hasil pertanian seperti kopi, beras, dan hasil kerajinan rakyat setempat. Tidak saja pedagang-pedagang, tukang-tukang, dan pengrajin-pengrajin, yang memperoleh **income** dipasar itu, tetapi para petani pun mendapat tambahan pendapatannya dengan jalan menjual hasil buah-buahan, sayur-sayuran, beras, dan kerajinan tangan.

Di antara hasil pertanian tersebut beraslah yang terutama merupakan sumber mendapat uang bagi para petani umumnya. Pasar yang terletak di pusat pemukiman penduduk yang besar jumlahnya seperti Bukittinggi menarik banyak penduduk desa sekitarnya karena pasar itu menyediakan berbagai macam barang dan jasa. Walaupun kegiatan perdagangan itu dalam bentuk kecil, namun penduduk membutuhkan **income** tambahan dengan jalan berjual beli. Pasar itu tidak saja sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga untuk menyebarluaskan informasi. Pedagang keliling dan tukang-tukang membawa informasi dari luar desa, kemudian informasi itu disebarluaskan lagi di desanya. Penduduk akan mendengar informasi itu, dan tak jarang merangsang mereka untuk mengunjungi dunia luar itu.

Nagari memperoleh bahagian yang penting dari hasil pajak yang dipungut dari pedagang yang datang untuk berniaga di pasar tersebut. Pajak yang dikumpulkan nagari dipergunakan untuk membiayai perayaan nagari, memperbaiki gedung kerapatan nagari dan sekedar uang perangsang bagi penghulu karena kegiatannya di dewan nagari. Sedangkan pekerjaan besar bagi kepentingan umum dilaksanakan secara "serayo" dari anak buah penghulu.

Dari penjelasan singkat di atas jelaslah bahwa ekonomi masyarakat Bukittinggi adalah ekonomi agraris. Dalam sistem ekonomi agraris ini tulang punggung ekonomi masyarakat berdasarkan ekonomi desa yang tradisional, di mana pertanian secara intensif non ekonomis. Petani bekerja untuk pertanian sub sistem dengan pola konsumsi yang konsumtif. Diferensiasi pekerjaan tidak banyak ragamnya dan bersifat statis. Pada pokoknya kegiatan ekonomi mereka lebih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk pasar. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para petani di pasar lebih bersifat usaha sampingan untuk melengkapi kebutuhan sendiri. Kegiatan pengrajin dan tukang-tukang berada dalam skala kecil, dan ditujukan untuk sekedar melengkapi kebutuhan hidup yang tidak tinggi pada waktu itu. Dapat diramalkan bahwa keadaan ekonomi yang seperti itu tidak mungkin berkembang menjadi ekonomi yang berskala besar karena sulitnya penumpukan modal. Uang betul-betul merupakan sesuatu yang sukar diperoleh pada waktu itu.

Keadaan ekonomi seperti ini akan mempersulit kehidupan ekonomi kaum laki-laki, karena sebagian besar mereka bekerja pada pertanian, sedangkan tanah pusaka dimiliki dan dikuasai oleh kaum wanita. Memang mereka diberi "abuan" oleh orang tuanya namun jumlahnya tidak seberapa. Abuan ini diberikan kepada anak-anak berupa satu atau dua ekor ternak, beberapa tanaman, uang sekali sepekan untuk disimpan dalam celengan

atau tabungan mereka. Gunanya adalah untuk modal bagi perkawinan dan perniagaan nantinya. Namun hasil yang mereka peroleh dari "abuan" itu relatif tidak banyak. Keadaan dramatis akan dialami oleh seorang laki-laki Minangkabau jika mereka tidak berilmu dan berharta (kaya). Salah satu harus dipunyai kalau ingin dihormati masyarakatnya. Dalam pantun di bawah ini dijelaskan betapa sulitnya posisi seorang yang tidak berharta:

Ndak adoh tangeh di Tanjung
Cumauak ka ampaian kain
Ndak adoh ameh di kandung
Dusanak jadi orang lain.

maksudnya :

Kalau seseorang tidak memiliki harta/uang, maka keluarga dan familinya tidak akan mau tahu dengan dia.

Pandangan masyarakat seperti ini tentu ada kaitannya dengan kebiasaan bekerja keras, hemat, dan menyisihkan sebagian pencariannya kepada sebagian besar masyarakat Bukittinggi terutama pendatang-pendatang dari nagari sekitarnya. Bukankah mereka telah meninggalkan nagarinya karena belum punya harta. Karena itu mereka belum berguna dan terpendang dalam keluarganya. Dapat kita pahami bahwa perkembangan kota Bukittinggi adalah suatu kesempatan bagi mereka untuk mengadu untung di sana agar menjadi orang kaya yang terpendang.

VI. Pendidikan, Kepribadian dan Perkembangan Sosial—Ekonomi

Pendidikan sebagai faktor yang sangat menentukan dalam menghasilkan individu-individu dengan kepribadian yang cocok untuk terjadinya perubahan sosial-ekonomi, adalah kebenaran umum yang dapat diterima. Secara umum dapat digambarkan bahwa tingkah laku anggota masyarakat ditentukan oleh sistem nilai yang dianutnya. Dalam masyarakat Minangkabau sumber nilai itu berasal dari kebudayaan Minangkabau dan agama Islam. Sistem nilai tersebut akan menentukan cara-cara dan norma-norma bagaimana generasi berikutnya harus dididik. Isi pendidikan yang bersumber dari sistem nilai itu akan menentukan motivasi-motivasi dan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam jiwa generasi baru. Semua itu akan menghasilkan generasi dengan cara berfikir, merasa, dan bertindak tertentu.

Timbul suatu bentuk kepribadian pada sebagian anggota masyarakat yaitu kepribadian yang dinamakan "**Innovative personality**" andaikata dalam masyarakat tersedia peran yang cocok dengan kepribadian yang demikian, maka akan terjadi suatu pembangunan yang sebagai motornya adalah individu-

individu dengan kepribadian yang telah didorong perkembangannya oleh pendidikan yang dilakukan dalam masyarakat itu. Secara skematis pokok-pokok fikiran di atas dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Nilai Pembangunan
Pendidikan, Motivasi, Kepribadian Peran,

Dari skema di atas dinyatakan bahwa sistem nilai budaya suatu masyarakat ada kaitannya dengan pembangunan atau perubahan sosial ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan nilai-nilai tersebut diwariskan dan dikembangkan oleh masyarakat. Dengan demikian isi dan cara pendidikan dilaksanakan ditentukan oleh sistem nilai budaya.

Namun sistem budaya suatu masyarakat dapat menghambat atau mendorong terjadinya perubahan sosial ekonomi. Sistem nilai budaya yang dapat menggerakkan usaha-usaha pembangunan dan perubahan adalah :

- dalam dimensi waktu orang harus berpandangan ke masa depan;
- dalam memandang alam orang menyadari bahwa hukum-hukum alam dapat diketahui dan dimanipulasikan;
- dalam kehidupan bermasyarakat orang harus punya individualitas. (Koentjaraningrat: 1971).

Teori lain yang menggunakan nilai sebagai titik tolak untuk menjelaskan mengapa suatu pembangunan atau perubahan berjalan cepat pada suatu masyarakat tertentu dan lambat pada masyarakat yang lain dikemukakan oleh Talcot Parson. Menurut dia, masyarakat penganut nilai-nilai yang mengutamakan keberhasilan (**achievement**), pemilikan syarat-syarat obyektif yang universal, dan keserbakhususan (**specificity**) pembangunan ternyata lebih cepat berlangsung bila dibandingkan dengan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai yang serba terikat pada status kelahiran, ikatan-ikatan pribadi, dan tanggung jawab yang longgar.

Di samping nilai-nilai yang dikandung oleh suatu kebudayaan juga proses pendidikan yang berlangsung dalam masyarakat ikut membentuk kepribadian yang inovatif. MC. Clelland mengemukakan bahwa pendidikan yang menghasilkan individu-individu dengan **need for achievement** (*n. Ach*) yang tinggi adalah pendidikan yang menekankan percaya pada diri sendiri, pendidikan yang banyak memberi kebebasan kepada anak didik, dan pendidikan yang mengembangkan unsur persamaan yang sehat.

Cara pendidikan yang demikian menghasilkan individu-individu yang **achievement oriented** dan akan mendorong timbulnya **entrepreneurial personality** yang akan menggerakkan pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Kepribadian yang **achievement oriented** merupakan kepribadian entrepreneur watak atau kepribadian entrepreneur adalah: Sifat suka bertanggungjawab atas kerjanya sendiri, suka bekerja dengan hasil yang diperhitungkan dalam bentuk sukses atau gagal, bekerja dengan rencana dan berani mengambil risiko. (Myron Weiner: 1970).

Dari pendapat dan teori yang dikemukakan tadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa sikap mental yang positif dan kepribadian yang inovatif diperlukan untuk terjadinya perkembangan dan perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi. Di dalam bukunya yang berjudul "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" Prof. Koentjaraningrat mengatakan bahwa Suku Minangkabau itu kemajuan pendidikannya positif dan mempunyai sikap mental positif.

Kalau pernyataan ini dapat kita terima berarti masyarakat Bukittinggi sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau mempunyai sikap mental yang dapat mendorong terjadinya perubahan perubahan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Berarti pula kebudayaan Minangkabau dapat melahirkan seperangkat sistem nilai dan sikap serta proses pendidikan yang dapat membentuk individu yang inovatif. Namun perlu dipertanyakan sistem nilai yang mana, proses pendidikan yang bagaimana dalam kebudayaan Minangkabau yang memungkinkan terbentuknya "Innovative personality".

Karena belum tentu seluruh sistem nilai budaya Minangkabau cocok untuk membentuk individu yang inovatif dan kreatif. Untuk menjawab pertanyaan itu penulis tidak dapat mengemukakan data yang lengkap dan keterangan yang memuaskan. Dalam hal ini penulis hanya mengemukakan beberapa cuplikan dan catatan yang tidak lengkap.

Untuk menjelaskan penulis mencoba dan mengkaitkannya dan memproyeksikannya kepada kegiatan serta isi pendidikan yang dilaksanakan di Minangkabau pada umumnya dan Bukittinggi khusus mengenai pendidikan tradisional yang informal yang berfungsi mewariskan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau kepada masyarakat. Penulis lebih memfokuskan kepada pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial-ekonomi.

Pada umumnya isi pendidikan tradisional Minangkabau bersumber kepada adat dan agama Islam, agar individu dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Nilai-nilai adat dan agama

menjadi pendorong dan pengaruh dalam tingkah laku masyarakat. Hidup sepanjang adat dan agama dalam suatu kehidupan yang dicita-citakan oleh anggota masyarakat. Namun kehidupan yang demikian bukanlah kehidupan yang statis, karena dalam kehidupan orang Minangkabau juga berpedoman kepada fatwa adat yang menyatakan: "hidup berakal, mati beriman". Ini berarti dalam menghadapi kehidupan sehari-hari anggota masyarakat hendaklah mempergunakan nalarnya, dan dalam menghadapi kematian hendaklah beriman kepada ajaran Agama Islam.

Pendidikan tradisional yang informal ini diperoleh melalui keluarga, masyarakat dan mass media masyarakat tradisional lainnya. Terakhir ini biasanya pesan-pesan disampaikan melalui "bakaba" (berceritera), dendang dan lagu, upacara-upacara adat dan lain-lainnya.

Aneka ragam pekerjaan masyarakat sebelum pra-kolonial Belanda antara lain: bertani, berdagang kecil-kecilan, pengrajin/tukang, seniman, dan guru. Jabatan terakhir ini sudah mendapat penghormatan tersendiri dari sejak dulu. Kecakapan untuk jenis pekerjaan itu diperoleh terutama melalui orang tua dan anggota masyarakat lainnya terutama keluarga orang sekampung atau sesuku.

Khusus mengenai pendidikan mereka peroleh di Surau (langgar) melalui seorang guru. Reputasi pengajaran agama di surau sangat ditentukan kualifikasi guru yang mengajarkannya. Kalau kualifikasi guru itu tinggi maka muridnya berdatangan dari luar desa atau nagari tempat surau berdiri. Surau juga menjadi tempat terjadinya proses enkulturasi dan sosialisasi pemuda-pemuda.

Karena anak laki-laki tidak mempunyai tempat tertentu di rumah orang tuanya, maka setelah mereka belajar mengaji mereka menginap atau tidur di surau itu. Tempat lain yang menjadi tempat tukar-menukar informasi dan membahas masalah serta memulai sesuatu terdapat di "Lapau" (sejenis warung kopi, pasar, gelanggang dan tepian tempat mandi anggota masyarakat). Sikap ekonomis dan jiwa dagang telah ditanam sejak awal. Tanah pusaka serta hasilnya dimiliki dan dikuasai oleh kaum wanita. Walaupun demikian kepada anak laki-laki diberi "abuan", yaitu semacam harta yang diberikan kepada anak laki-laki yang menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Harta atau barang diberikan kepada anak laki-laki itu dipilih sesuai dengan kemampuan ibu bapaknya serta kesukaran, perhatian dan minat anak mereka. Ada yang mendapat anak kerbau, jawi, kuda, kambing, ayam atau itik, berpa tanaman keras dan ada pula yang diberi uang setiap pekan (minggu) pengisi tabungannya. Dengan giat anak itu akan mengusahakan dan

mengembangkan harta "abuan" tersebut yang nanti kalau ia sudah besar (dewasa) harta atau uang simpanan tersebut sudah cukup untuk modal bagi keluarga dan berniaga. *)

harta "abuan" tersebut yang nanti kalau ia sudah besar (dewasa) harta atau uang simpanan tersebut sudah cukup untuk modal bagi keluarga dan berniaga. *) |

Dengan cara demikian orang tua Minangkabau mendidik anaknya bekerja keras atas tanggungjawab sendiri dan berhemat untuk penumpukan modalnya. Di samping itu memberikan kesempatan kepada anaknya dalam batas-batas tertentu berusaha sesuai dengan minat dan bakatnya. Jiwa berdagang sudah dibina dan diarahkan sejak kecil. Kepada anak disampaikan pepatah Minangkabau sebagai berikut:

"Ketek taraja-raja, gadang tabao-bao, lah tuo tarubah tidak".

Maksudnya: Kalau suatu kebiasaan sudah dibiarkan berkembang waktu kecil maka setelah dewasa akan diteruskan dan kalau sudah tua tidak bisa diubah lagi. Oleh karena itu hemat dan rajin harus dibiasakan sejak kecil. Kebiasaan kerja keras, hemat, wiraswasta dan berorientasi ke masa depan sudah dilatih dan dibina dari sejak kecil. Dari pepatah dan pantun yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu dapat kita lihat adanya pesan-pesan dan nilai-nilai tersebut.

Dari ungkapan dan pantun tersebut di bawah ini dapat kita lihat pesan tentang perlunya kerja keras dan harus sanggup menderita menanggung berbagai risiko demi keberhasilan dalam kehidupan.

"Rajin mangakeh dapek sacotok"

"Banyak bamanung utang tatongkok"

Maksudnya: kalau kita rajin berusaha banyak sedikitnya akan memberi hasil. Tetapi kalau tidak memanfaatkan waktu untuk kegiatan ekonomi, hutang akan menumpuk.

Selanjutnya:

Barakik-rakik kito kahulu

Baranang-ranang katapian

Basakik-sakik kito dahulu

Basang-sanang kamudian

Maksud isi pantun ini, ialah:

Biarlah kita bekerja keras dengan susah payah lebih dahulu asal kita berhasil dan dapat hidup senang dan sejahtera kemudian.

Mengenai hidup hemat dapat kita lihat dalam fatwa ungkapan tersebut di bawah ini:

”Katiko adoh jan dimakan

Jiko ndak adoh baru dimakan”

Maksudnya: Ketika penghasilan meningkat jangan dikonsumsi semuanya. Hendaklah sebagian disisihkan dan disimpan. Dalam keadaan tidak ada barulah simpanan itu dipergunakan.

Agaknya nilai dan ajaran yang disampaikan oleh pantun dan pepatah tersebut di atas mirip dengan Etik Protestan yang menghargai kerja keras, hemat dan menghargai keberhasilan.

Mengenai hubungan manusia dengan alam, fatwa adat Minangkabau mengatakan : ”Alam takambang jadi guru”. Berarti alam bukan sesuatu yang ditakuti atau disembah tetapi sesuatu yang perlu dipelajari dan dipergunakan agar hidup dapat lebih baik. Maka di dalam kebudayaan Minangkabau hukum alam dan gejala-gejala alam sering dijadikan pedoman dalam kehidupan. Keharmonisan antara manusia dengan alamnya dijaga sebaiknya. Begitu pula untuk mempelajari lingkungannya mereka bersungguh-sungguh. Sehubungan dengan itu maka keberhasilan dalam perdagangan dan pencarian ilmu, dengan kepercayaan kepada diri sendiri, seorang pemuda tidak ragu-ragu menjelajah Nusantara ini bahkan ada yang melewati batas wilayah Indonesia. Segala risiko dan penderitaan mereka tanggung sendiri dan sangat malu mereka kalau penderitaan itu sampai ke kampung, tetapi kalau berhasil baru mereka itu pulang ke kampungnya. Baik keberhasilan dalam perdagangan maupun dalam menuntut ilmu akan mendapat penghormatan dari masyarakatnya terutama keluarga dekat. Karena orang seperti ini dianggap pohon beringin besar dalam nagari : batangnya tempat bersandar, daunnya untuk berteduh dan akarnya untuk bergantung. Mengenai siapa-siapa yang patut dikasihi dan dihormati dalam masyarakat Minangkabau dapat kita lihat dalam nasehat Datuk Perpatih nan Sabatang di bawah ini.

”Maka tatkala Datuk Perpatih nan Sabatang akan hampir mati, maka dipanggilnya tiap-tiap nagari seorang sekoto nan selaras Budi Caniago. Maka berkata beliau kepada penghulu, ”Pegangan pitaruh hamba, hai segala yang berbicara akan delapan patah kata:

pertama kasih engkau pada negeri,
kedua kasih engkau pada isi negeri,
ketiga kasih engkau pada orang kaya,
keempat kasih engkau pada orang tua,
kelima kasih engkau pada orang berilmu,
keenam kasih engkau pada orang gadang,
ketujuh kasih engkau pada segala penghulu yang benar,
kedelapan kasih engkau pada orang yang mempunyai bicara.

Itulah nan tinggi di dalam negeri. Maka janganlah engkau ubahi sepeinggal aku, supaya selamat pekerjaan engkau selama-lamanya.” (TM, ML. 40, hal. 20). (Drs. Edwar Djamaris: 1980).

Mungkin ada gunanya untuk diungkapkan di sini secara ringkas kisah perantauan Bapak Mansyur Daud Datuk Panglimo Kayo (Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat) ke Timur Tengah dan terus ke Yunani dalam rangka menuntut ilmu sebelum perang dunia ke 2. Mansyur Daud Datuk Panglimo Kayo berasal dari Bukittinggi. Sewaktu mudanya ia merantau ke Malaysia. Dari sana terus ke India. Di India ia dapat mengikuti kegiatan All Indian Congress. Dari sana dengan menempuh jalan darat terus ke Timur Tengah (Mekah). Di sana ia belajar agama, setelah itu Mansyur Daud meneruskan perjalanannya ke Yunani.*) (Dt. Panglimo Kayo: Wawancara).

Dalam rangka meningkatkan hasil perdagangannya maka pedagang kecil Bukittinggi telah dapat membentuk organisasi pedagang sejenis seperti pedagang batik dan hasil kerajinan tangan. Begitu pula dalam menghadapi pedagang Cina dan Pemerintah, pedagang kecil Bukittinggi membentuk cabang himpunan Saudara Indonesia, sejenis kegiatan koperasi di antara pedagang, diadakan sekitar tahun 1930, seterusnya pedagang-pedagang Bukittinggi berhasil mendirikan berbagai badan usaha seperti PT dan NV.

Demikian kita lihat: Ketika Bukittinggi (Fort de Kock) berkembang dari garnizun tentara Belanda menjadi ibukota Padang Darat, maka seiring dengan itu terjadi pula perpindahan penduduk dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi, ke kota itu. Mereka melihat bahwa di kota itu berbagai peran yang tidak terdapat di negerinya terdapat di sana, karena Bukittinggi berkembang menjadi pusat pemerintahan Belanda, pusat kegiatan pendidikan, dan pusat kegiatan ekonomi. Mereka datang ke kota itu sebagai pedagang, pengrajin/tukang, menuntut ilmu bekerja pada kantor pemerintah dan kantor-kantor perdagangan dan lain-lain.

Bangsa Belanda, Cina, dan Timur Asing datang dan menetap di kota itu baik sebagai pedagang maupun pegawai pemerintah. Pembauran antara penduduk asli dan bangsa asing terjadi dan berkembang sering dengan perkembangan kota itu. Interaksi sosial yang terjadi memberi pengaruh pada berbagai aspek kehidupan sosial, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan berbagai bidang kehidupan di kota itu membuka berbagai kesempatan bagi penduduk kota itu untuk memainkan peranannya. Di samping itu pemukim-pemukim yang berasal dari nagari-nagari sekitar bukittinggi merasa terlepas dari ikatan-ikatan tradisional yang masih hidup di nagarinya. Embrio dan bibit jiwa wiraswasta yang mereka miliki betul-betul mendapat

tanah yang subur untuk tumbuh dan berkembang. Tidak heran kita melihatnya bahwa kesempatan yang ada benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Bukittinggi.

Ada baiknya dikemukakan di sini bagaimana usaha pedagang kecil Bukittinggi meningkatkan kegiatan perdagangannya, dari berdagang kecil-kecilan menjadi perdagangan yang oleh badan-badan usaha seperti PT dan NV.

Guna memupuk rasa persatuan dan adanya forum tempat bermusyawarah dalam membela kepentingan perdagangannya terutama menghadapi saingan yang berat dari Cina, pedagang-pedagang kecil Bukittinggi mendirikan Cabang Himpunan Saudagar Indonesia (HSI) di Bukittinggi pada pertengahan Nopember tahun 1930. Sebagai pusat dari HSI ialah kota Padang. Pada tanggal 27 Desember 1930, melalui wadah HSI, pedagang Bukittinggi membentuk **Abuan Saudagar**, semacam badan usaha yang bergerak dalam simpan-pinjam uang kepada pedagang-pedagang kecil atau menurut istilah sekarang "Koperasi Simpan Pinjam". Sebagai tokoh pendirinya adalah Anwar St. Saidi dan M. Taher Marah Sutan. Awal tahun 1932 Abuan Saudagar meningkatkan kegiatannya sebagai suatu bank. Maka namanya pun ditukar menjadi P.T. Bank Nasional Abuan Saudagar yang pusatnya berkedudukan di Bukittinggi. Sekarang PT Bank Nasional masih berdiri dengan cabangnya di Padang. Atas bimbingan dan bantuan P.T. Bank Nasional, berkembang pulalah badan-badan usaha dagang lainnya seperti : NV. **Inorba**, **NV Nusantara**, **NV Candi Minang**, dan lain-lain.

Patut dikemukakan di sini bahwa PT Bank Nasional Bukittinggi mempunyai andil yang cukup besar dalam perjuangan pergerakan nasional dan revolusi nasional di Sumatera Barat baik dalam bentuk materiil maupun moral. Cukup menarik untuk dikemukakan di sini, bahwa dari 10 orang yang menjadi pendiri PT. Bank Nasional Bukittinggi, 9 orang berpendidikan sekolah dasar sekuler dan seorang sekolah agama.

Dari pendidikan sekuler mereka hanya memperoleh ke-trampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung. Agaknya sikap mental yang positif, kepribadian inovatif dan jiwa wiraswasta yang mereka miliki serta mau memanfaatkan komunikasi masa yang ada memungkinkan mereka membuat lebih kasar dari pendidikan sekuler yang mereka peroleh.

Namun penulis menyadari bahwa asumsinya ini masih perlu dibuktikan dengan penelitian yang intensif dan terarah, karena kurangnya data dan argumentasi pembuktiannya. Mengenai pendidikan Barat atau sekuler yang diberikan di sekolah mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat Bukittinggi. Mereka melihat pendidikan Barat sebagai pintu gerbang bagi mereka untuk memperoleh aneka ragam

pekerjaan dan jabatan terutama pada kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor perdagangan. Di samping itu sifat terbuka masyarakat Bukittinggi terhadap pembakuan, terutama dalam bidang pendidikan, maka respon mereka betul-betul positif.

Bagaimana keterbukaan masyarakat Minangkabau terhadap pendidikan dan ilmu diungkapkan sebagai berikut :

Baa toh, dek sifat urang kito,
amuh batanyo ka nan tahu,
amuh baraja ka nan pandai
suko bercampur jo urang datang,
Jadi tapatan dagang lalu,
Hindu jo Cino jadi juo,
Kaling jo Arab tak bapilih,
Portugis jo Inggris baitu pulo,
Jerman jo Balando elok bana*)

Maksud ungkapan tersebut ialah :

Mengenai sifat orang kita (Minangkabau)
Mau bertanya kepada orang yang tahu
Mau belajar kepada orang pandai (berilmu)
Jadi tempat persinggahan pedagang yang lalu
India dan Cina jadi juga
Keling dan Arab ja
Keling dan Arab tidak dibedakan
Portugis dan Inggris begitu pula
Jerman dan Belanda baik betul.

Dengan cara demikian, dari orang bingung menjadi cerdas, dari bodoh menjadi orang pandai*). (Tjaja Soematra, Rhn 1920). Dari kutipan diatas agaknya dapat kita ketahui untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran orang Minangkabau tidak memilih dari bangsa mana saja datangnya demi menjadi orang berilmu (orang pandai). Karena itu tidak heran adanya perantau ilmu, orang Minangkabau sampai ke Timur Tengah untuk menuntut ilmu.

Sejak sekitar pertengahan abad ke 19 dalam fatwa adat yang berbunyi : "alam takembang jadi guru" tersirat pesan bahwa anggota masyarakat hendaklah mempelajari dunia ini, agar ia dapat hidup bahagia dalam masyarakat. Demi memperoleh ilmu, seorang ibu/bapak mempercayakan anaknya sepenuhnya kepada guru, akan dibuang jauh, digantung tinggi terserah pada gurunya. *) Jadi dari pendidikan tradisional sampai kepada pendidikan modern kedudukan guru merupakan kedudukan terhormat dalam masyarakat Minangkabau. Demikianlah ketika pendidikan Barat diperkenalkan di Bukittinggi 1843 respon masyarakat Bukittinggi dan daerah sekitarnya

cukup tinggi walaupun sekolah itu hanya mengejar anak-anak pribumi membaca, menulis dan berhitung. Fungsi utama sekolah itu adalah untuk melatih calon pegawai sipil pribumi. Atas inisiatif Tuanku Laras Kota Gedang yang dianggap sebagai peletak dasar pendidikan Barat di daerahnya, menyebabkan Nagari Kota Gedang (\pm 5 km dari Bukittinggi) menjadi nagari yang termaju dalam pendidikan Barat di Minangkabau.

Steinmetz, melihat bahwa Bukittinggi mempunyai pelajar-pelajar yang paling baik dalam ketekunan dan kemajuan belajarnya. Jumlah murid yang mendaftar di sekolah nagari meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1855 tercatat 10 orang murid, tetapi pada tahun 1869 meningkat menjadi 81 orang. (E. Graves: 1971). Laporan pemerintah memperlihatkan indikasi bahwa minat masyarakat Bukittinggi untuk menjadi pegawai gubernemen sangat banyak. Masyarakat melihat bahwa melalui pendidikan sekuler terbuka kesempatan baginya untuk menjadi pegawai kantor Pemerintah maupun kantor-kantor dagang Belanda. Ini berarti terbuka sumber pencaharian baru bagi pemuda Minangkabau yang selama ini sebagai petani, tukang, dan pedagang. Dalam rangka penyebaran sekolah nagari didirikan pula sekolah guru yang pertama yaitu **Normaal School** pada tahun 1855 di Bukittinggi. Rakyat Sumatera Barat lebih mengenalnya dengan nama Sekolah Raja. Murid sekolah ini berdatangan hampir dari seluruh daerah Sumatera Barat. Peminatnya cukup banyak, karena profesi guru sangat terhormat pada masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu dalam penerimaan murid; sekolah itu melakukan seleksi yang ketat, sehingga sekolah itu dinamakan Sekolah Raja. Dalam tahun 1870 sekolah itu menjadi lembaga yang paling berprestasi di Sumatera Barat. Dari 233 tamatan sekolah itu, 183 orang yang berasal dari Minangkabau dan selebihnya berasal dari Bengkulu, Tapanuli, Lampung, Riau, Palembang dan Bangka. Walaupun sekolah ini bertujuan mendidik guru-guru, namun sebagian besar bekerja pada bidang pemerintah dan pegawai kantor-kantor dagang.

Dari 28 orang tamatan sekolah **Normaal** angkatan pertama, hanya 12 orang yang jadi guru pada sekolah nagari sedang selebihnya bekerja sebagai pegawai administrasi pemerintah, sebagai jaksa, sebagai parkheris dan lain-lain jabatan. Orang Minangkabau tamatan Sekolah Normal itu, baik guru maupun pegawai sipil lainnya memperlihatkan prestasi kerja yang baik. Hasil kerjanya di luar pikiran orang Belanda. Sebagai pegawai administrasi Belanda, rata-rata menunjukkan hasil yang gemilang. Tahun 1906 minat masyarakat Bukittinggi masih meningkat terhadap pendidikan sekuler. Sekolah yang ada ketika itu tidak dapat menampung keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sehingga anak-anak Minangkabau

ada yang bersekolah di Aceh menumpang pada keluarga mereka yang merantau bersama (E. Geaves, 1971). dalam rangka menampung minat tersebut Pemerintah Belanda mendirikan **Volksschool** (3 th.). Berbeda dari sekolah nagari, sekolah ini langsung di bawah pengawasan Pemerintah Belanda. Jenis sekolah ini bertambah dengan cepat. Pada tahun 1915 jumlah sekolah ini telah menjadi 385 buah. Pada tahun 1914 didirikan pula HIS (Hollandsch Inlandsche School).

Dalam perkembangan selanjutnya berdiri pula sekolah lanjutan seperti MULO dan AMS di Bukittinggi. Di samping itu berdiri pula sekolah swasta seperti HIS-PGI (Persatuan Guru Indonesia) dan MULO **Evoorsa**. Pada tahun 1934, atas inisiatif Anwar St. Saidi berdiri pula Taman Siswa di Bukittinggi. Pada perkembangan berikutnya berdirilah Taman Siswa di berbagai kota Sumatra Barat. Perkembangan pendidikan sekuler itu tidak dapat tidak ada kaitannya dengan perkembangan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan sekuler terbuka berbagai peran dan lapangan bekerja di kota yang sedang berkembang itu. Jabatan-jabatan seperti klerk, komis, demang, jaksa, guru dan dokter menjadi idaman masyarakat. Oleh karena itu betapapun beratnya biaya pendidikan untuk menyekolahkan anak ke tanah Jawa namun tidak mengurangi minat mereka untuk menyekolahkan anak mereka di sana. Kalau ibu-bapak tidak sanggup, tidak jarang kaum secara bersama membiayainya. Bahkan pada tahun 1911 Nagari Kota Gedang dekat Bukittinggi mengirim 2 orang pemudanya melanjutkan studinya ke Negeri Belanda atas biaya **Studi Fonds Nagari**.

Terakhir yang perlu dikemukakan di sini adalah sekolah agama yang didirikan oleh Gerakan Pembaharuan Islam pada permulaan abad ke-20. Pada umumnya sekolah ini seperti Sumatra Thawalib memberikan pengaruh dominan terhadap kehidupan politik nasional di Sumatera Barat. Namun dalam kehidupan sosial ekonomi, sekolah ini juga lapangan kerja baru pada masyarakat. Perkembangan sekolah swasta agama yang dikelola oleh Muhammadiyah dan organisasi lain sangat pesat di Sumatera Barat pada zaman penjajahan. Lebih-lebih ketika **de Yonge** melaksanakan politik reaksioner di sana. Maka banyak tamatan sekolah agama modern itu mengajar di sekolah swasta tersebut, bahkan ada yang keluar daerah Sumatera Barat. Di samping itu banyak juga di antara alumninya yang menjadi pedagang, redaktur dan pengarang yang sukses.

VI. Penutup

Perkembangan Bukittinggi menjadi kota di daerah pertani-

an telah dimanfaatkan sebaik-baiknya masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya. Timbulnya berbagai lembaga baru di kota tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai peran, terutama dalam kegiatan ekonomi. Penyesuaian tingkah laku terhadap lembaga baru benar terjadi dengan cepat.

Lembaga pendidikan barat yang diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19, mendapat respon positif dari masyarakatnya. Walaupun tugas utama lembaga pendidikan adalah sosialisasi dan enkulturasi namun ada kaitan langsung dengan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu jiwa dagang dan wiraswasta yang dimiliki oleh individu-individu yang inovatif dari berbagai nagari di sekitar Bukittinggi merangsang mereka untuk mengadu untung dan memainkan perannya di kota tersebut. Sikap mental positif yang mereka warisi dari sistem nilai budayanya memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang diberikan oleh kota Bukittinggi. Agaknya sistem nilai budaya yang mereka terima melalui pendidikan informal terjalin dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan oleh pendidikan sekuler memungkinkan mereka meningkatkan kehidupan sosial-ekonominya.

Apa yang telah dikemukakan dalam makalah ini perlu diteliti dan dibuktikan lebih baik agar kita mendapat gambaran yang lebih sempurna. Semoga makalah kecil ini ada gunanya, paling kurang tanggapan yang diberikan akan memperjelas dan mempermudah tim penulisan Sejarah Sosial Bukittinggi meneliti dan menulis laporannya.

Sekian terima kasih

DAFTAR BACAAN

1. Abdullah, Taufik : Minangkabau 1900 – 1927, Preliminary Studies in Social Development, Master's Thesis University 1967.
2. Abdullah, Taufik : School and politics The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927 – 1933, Cornell University, Ithaca New York, 1971.
3. Amran Rusli : Sumatera Barat hingga Pelakat Panjang, Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
4. Graves E. Elizabeth : The Ever-Victorious of falo: How The Minangkabau of Indonesia Solved Their "Colonial Question" A Horox Company, An Arbor, Michigan, USA 1971.
5. Koentjaraningrat, Prof. Dr. : Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Djambatan, 1971.
6. Mansyur M. Dahlan : Sejarah Minangkabau, Bhara-tara, Jakarta, 1970.
7. Manan Imran : Ilmu-ilmu Sosial Dasar, Proyek P.M.P.T. IKIP Padang, 1979.
8. Wiener, Myron : Modernisasi. Dinamika Per-tumbuhan, Voice of Ameri-ca Lectures.
9. Surat Kabar Tjaja Soematra Padang th. 1928.
10. Buku Peringatan 40 tahun P.T. Bank Nasional, PT Bank Nasional Bukittinggi, 1970.
11. Monografi Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi 1977.
12. Sango, Dt Batoeah : Tambo Alam Minangkabau Percetakan Limbago, Paya-kumbuh, 1959.

13. Rajab, Muhammad : Perang Paderi di Sumatera Barat 1803 – 1838, Perpustakaan Perguruan Kem. P.P. dan K. 1945.
14. Djamaris, Edwar : Tambo Minangkabau. Tinjauan Struktural, UNAND Padang, 1980.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 611/F I. IV/T 82

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR SEJARAH LOKAL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1982/1983 adalah mengadakan Seminar Sejarah Lokal di Denpasar Bali.
 - b. bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Seminar Sejarah Lokal".
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1982;
 - c. Nomor 237/M Tahun 1978;
 - d. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - b. Nomor 0110/P/1982 tanggal 29 Maret 1982;
 3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1982/1983 Nomor 472/XXIII/3/1982 tanggal 11 Maret 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : a. Membentuk "Panitia Seminar Sejarah Lokal" yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Panitia Seminar" dengan tugas mempersiapkan, melaksanakan serta menyelesaikan Seminar Sejarah Lokal di Denpasar Bali;
b. Panitia Seminar terdiri dari :
1. Panitia Pengarah;
2. Panitia Penyelenggara.
- KEDUA** : Susunan/keanggotaan serta kedudukan dalam kepanitiaan "Panitia Seminar" tersebut pada pasal "Pertama" seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : "Panitia Seminar" harus telah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Agustus 1982, dan mewajibkan Ketua Panitia menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan seminar, hasil seminar serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan;
- KEEMPAT** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dalam rangka penyelenggaraan seminar dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam Daftar Isian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 11 Maret 1982 nomor 472/XXIII/3/1982;
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1982.

DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 12 AGUSTUS 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

NIP. : 130 119 123

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 12 Agustus 1982
NOMOR 611/F.IV/T.82

Daftar Susunan/Keanggotaan Panitia Seminar

Pelindung : Prof. Dr. Haryati Soebadio

Penasehat (teknis/
administratif) : – Drs. Bastomi Ervan
– Dr. S. Budhisantoso

Panitia Pengarah

K e t u a : Dr. T. Ibrahim Alfian

Sekretaris : Drs. A.B. Lopian

Anggota : – Dr. Taufik Abdullah
– Dr. Kuntowijoyo
– Drs. F.A. Sutjipto
– Drs. Abdurrachman Surjomihardjo
– Drs. R.Z. Leirissa. MA
– Drs. Bambang Sumadio

**Panitia Penyeleng-
gara**

: Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDUYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

NIP. : 130 119 123

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretariat Negara
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda
7. Sekjen Dep P dan K.
8. Inspektur Jenderal Dep P. dan K.
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K.
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K.
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K.
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P dan K.
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P dan K.
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
19. Ditjen Anggaran
20. Ditjen Pajak
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan
22. BAPPENAS
23. Ketua DPR—RI
24. Komisi IX DPR—RI
25. Pengurus Pusat KORPRI
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DAFTAR PESERTA / PEMBAWA MAKALAH.

No.	Nama	Judul Makalah
1.	Dr. S. Budhisantoso	Arti Pentingnya Sejarah Lokal dalam Pembangunan Nasional.
2.	Dr. Taufik Abdullah	Sejarah Lokal, Kesadaran Sejarah dan Integrasi Nasional
3.	Dr. Kuntowijoyo, MA.	Kota Sebagai Bidang Kajian Sejarah
4.	Drs. Muchlis	Sejarah Lokal (Tantangan dan Harapan)
5.	Dr. Onghokham	Stratifikasi Sosial dan Kepemimpinan.
6.	Dr. T. Ibrahim Alfian	Sejarah Lokal dalam Kurikulum Universitas, Sebuah Catatan Ringkas
7.	Drs. Munandjar Widiyatmiko	Kepemimpinan dalam Struktur Masyarakat Lio di Nusa Tenggara Timur.
8.	Drs. Frans Hitipeuw	Kerajaan Ternate dan Tidore di Abad ke XIV
9.	Dr. F.A. Sutjipto	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan di Daerah Surabaya. Suatu Studi Perbandingan antara Masa Sebelum dan Sesudah Pertengahan Abad ke-18.
10.	Dra. Mona Lohanda	"Tuan Bek" dan "Inlandsche Kommandant Batavia"
11.	Drs. Mardanas Safwan	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal di Sumatera Barat
12.	Prof. Dr. Ngurah Bagus	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinannya.
13.	Drs. Suyatno	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal di Surakarta.
14.	Drs. H. Ramli Nawawi	Peranan Madrasah pada Masa Penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan.
15.	Drs. A.Á. Gde Putra Agung	Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Bali.

-
16. Drs. Ishaq Thaher Pendidikan dan Perkembangan Sosial Ekonomi di Bukittinggi Periode 1900 – 1942.
 17. Drs. Rusdi Sufi Pendidikan Barat dan Modernisasi Pendidikan Agama di Aceh.
 18. Dra. Marleily Asmuni Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Daerah Riau pada Awal Abad XX.
 19. Drs. Muhammad Ibrahim Gerakan Protes Masyarakat Pedesaan di Aceh terhadap Militerisme Jepang. Kasus Bayu dan Pandrah.
 20. Drs. Soegijanto Padmo Aspek Historis dari Pembangunan Pedesaan di Jawa Tengah.
 21. Drs. R.Z. Leirissa, M.A. Pergolakan di Paulohy (Teluk Eldaputih) 1836 – 1837.
 22. Drs. Suhartono "Wong Cilik" Problema dan Dinamika Surakarta Abad 19.
 23. Drs. Sediono M.P. Tjondronegoro Membangun Prasarana untuk Merangsang Penulisan Sejarah Lokal demi Integrasi Nasional.
 24. Dra. A.M. Djuliaty Surojo Dari Subsistensi ke Perdagangan Desa Pantai Maribaya : 1950–1978
 25. Drs. Ma'moen Abdullah Stratifikasi dan Pola Kepemimpinan Lokal di Daerah Sumatera Selatan.
 26. Drs. Anhar Gonggong Sulawesi Selatan dan Komunikasi; Dalam Rangka Proses Integrasi Bangsa Melangkah ke pemahaman diri melalui Sejarah.
 27. Dr. Nico S. Kalangie Masalah Komunikasi Antar budaya
 28. Drs. J.R. Chaniago Penduduk Bukittinggi sebelum Perang Sebuah Kerangka Studi.
 29. Drs. F.E.W. Parengkuan Orang Manado Sebuah Gambaran Singkat.
 30. Drs. Suwardi M.S. Komunikasi antar Daerah antar Suku Bangsa dan Pembauran di Daerah Riau.
 31. Drs. Helius Syamsuddin Sumbawa Hubungan antar Pulau dan Interaksi antar Suku Bangsa.

32. Drs. Nazief Chatib dan Ir. Pangaduan Lubis Latar Belakang Sejarah dan Interaksi Sosial Peranan Mandailing dan Minangkabau dengan Suku Bangsa Melayu di Medan.
33. Dr. Sriwulan Rujianti Mulyati Sastra dan Sejarah Lokal.
34. Dr. Ayatrohaedi Karya Sastra sebagai Sumber Sejarah.
35. Dr. Edi S. Ekadjati Sumbangan Karya Sastra Sejarah terhadap sejarah Lokal di Indonesia
36. Drs. Suripan Sadi Hutomo Sastra Sejarah dan Penulisan Sejarah Lokal.

DAFTAR PENINJAU SEMINAR SEJARAH LOKAL

1. Dr. Astrid S. Susanto – B A P P E N A S.
2. Dr. R. P. Suyono – Kepala Pusat Peninggalan Arkeologi Nasional.
3. Drs. Uka Tjandarasmita – Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
4. F. X. Sutopo – Direktur Kesenian,
5. Drs. Amir Sutaarga – Direktur Permuseuman,
6. Arimurthi, SE. – Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
7. Dra. Sumartini – Kepala Arsip Nasional RI,
8. Dr. S u k m o n o – Proyek Pemugaran Candi Borobudur.
9. Drs. Djoko Sukiman – Universitas Gajah Mada,
10. Drs. I. Made Sutaba – Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Kanwil Departemen P dan K Propinsi Bali.
11. Drs. A. Adaby Darban – Universitas Gajah Mada,
12. Drs. H. Bambang Suwondo – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional.
13. Drs. Djenen M.Sc. – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
14. Drs. Sugiarto Dakung – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
15. Sutrisno Kutoyo – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional.
16. Zainuddin Ayub – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
17. Drs. S u l o s o – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
18. Drs. R. Sukamto – B A P P E N A S,
19. Drs. Tashadi – Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,
20. Sudiardjo, SH. – Kepala Bagian Perencanaan Ditjen. Kebudayaan,
21. Sunartik Sukotjo – Bendaharawan Direktorat Jenderal Kebudayaan,
22. Firdaus Burhan – Swasta,
23. Drs. Suwadji Syafei – Universitas Indonesia.

LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SEJARAH LOKAL DI DENPASAR

IV

31 Agustus – 4 September 1982

Setelah mengikuti pembicaraan-pembicaraan selama 4 hari, kami menyatakan kegembiraan karena partisipasi yang penuh dari semua peserta seminar. Kegembiraan ini bertambah karena walau pun waktu persiapan relatif terbatas, dan sidang-sidang berjalan dari pagi sampai jauh malam, kegairahan dalam berdiskusi tetap tinggi.

Disamping itu selama seminar, terjalin hubungan profesi dan persahabatan yang lebih akrab antara tenaga-tenaga sejawan dari berbagai daerah. Barangkalai tak perlu kami tegaskan lagi bahwa salah satu suasana yang akan dapat meningkatkan kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan ialah terjalinnya komunikasi yang baik antara para pendukungnya.

Seminar ini selanjutnya ternyata dapat memperkenalkan tenaga-tenaga baru yang selama ini belum tampil ke dalam pertemuan yang bertaraf nasional. Disamping itu yang lebih mengembirakan lagi ialah bahwa seminar ini sesuai dengan yang diharapkan, telah menjadi forum bagi dikemukakannya pengetahuan yang lebih mendalam dan akrab tentang berbagai aspek dari dinamika masyarakat di beberapa daerah di tanah air kita.

Pokoknya seminar ini bukan saja kami rasakan telah mencapai sasaran yang dikehendaki oleh proyek, tetapi juga nampaknya memperkaya cakrawala intelektual para peserta.

UMUM

1. Studi sejarah lokal merupakan pengenalan yang lebih intim dengan dinamika masyarakat setempat, sehingga memungkinkan kita untuk mempertemukan secara strategis hasrat dan rencana pembangunan nasional dengan realitas setempat.
2. Dalam rangka integrasi nasional, studi sejarah lokal dapat mengidentifikasi potensi-potensi nasional yang terbaik yang memungkinkan pemanfaatan secara optimal, potensi masyarakat lokal dalam konteks pembangunan nasional secara keseluruhan.

3. Dilihat dari segi akademis, studi sejarah lokal bisa mempercepat pengindonesiaan (indigenization) dari pada ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian teori-teori dari ilmu-ilmu sosial berdasarkan generalisasinya atas realitas Indonesia, sehingga dapat membantu penyusunan konsep-konsep ilmu sosial dengan masyarakat kita. Dalam usaha "indigenization" dari pada konsep-konsep ilmu sosial, maka sejarah adalah disiplin yang sangat strategis, karena sejarah sangat peka tidak hanya terhadap pola perilaku manusia, tetapi juga terhadap interaksi antara manusia dengan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kekuasaannya.

KESAN—KESAN

1. Seminar sudah lebih terarah bila dibandingkan dengan seminar-seminar sejarah sebelumnya.
2. Walaupun membicarakan sejarah lokal, permasalahan seminar didasari wawasan integrasi nasional.
3. Seminar ini memberikan kemungkinan kepada Proyek IDSN untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penelitian dan penulisan sejarah di daerah-daerah, sekaligus memberi kemungkinan kepada sejarawan lokal menguji hasil penelitiannya dengan rekan-rekannya sebelum diterbitkan dan disebarluaskan.
4. Memberi gagasan-gagasan baru kepada para pengajar sejarah pada waktu menyusun silabus.
5. Merupakan langkah permulaan yang menggembirakan karena makalah-makalah yang disampaikan tidak lagi terbatas pada deskripsi saja.
6. Merupakan sarana untuk talent scouting dari potensi penulisan sejarah di daerah.

BEBERAPA KELEMAHAN

Dengan menyadari bahwa masa persiapan sangat singkat, panitia pengarah mencatat beberapa kelemahan dalam pembuatan makalah :

1. Ketajaman dalam perumusan permasalahan masih kurang.
2. Karena kurang tajam dalam perumusan permasalahan ini, maka seleksi dari fakta-fakta yang relevan belum memuaskan.
3. Konsep-konsep ilmu sosial belum dikuasai dengan baik.
4. Adanya kelemahan dalam metodologi penelitian dan penulisan.

5. Kekurangan imajinasi dalam menanggapi TOR, yang dicerminkan pada pemilihan judul makalah yang harus mengikuti judul-judul TOR.
6. Sistematik dalam penyusunan argumen dengan fakta-fakta relevan perlu ditingkatkan.
7. Akibat dari kekurangan waktu maka *exhaustiveness* dari penggunaan sumber sangat minim.
8. Penggunaan sumber primer masih sangat terbatas.

SARAN

Berhubung dengan hal-hal yang disebut tadi, maka diusulkan untuk mengadakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar supaya makalah-makalah diperbaiki dan dilengkapi untuk diterbitkan kemudian. Untuk melaksanakan maksud ini perlu ditunjuk dewan redaksi yang akan mengadakan seleksi daripada makalah yang dapat diterbitkan.
2. Usaha yang dirintis ini perlu dilanjutkan dengan memberi perhatian kepada daerah-daerah yang belum dijangkau dalam seminar pertama ini.
3. Disamping penyelenggaraan seminar sejarah lokal seperti ini perlu diadakan seminar yang khusus membicarakan metodologi untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan sejarah.

Perpustakaan
Jenderal K

37
G